



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI VI DPR RI
DENGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) DAN
PERUM PERHUTANI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 22 (dua puluh dua)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
Waktu : Pukul 10.35 s.d. 14.21 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Gedung Nusantara I Lt. 1
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Aria Bima
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PDIP)
- Acara : Pembahasan mengenai:
1. Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023;
2. Rencana Kerja Korporasi Tahun 2025; dan
3. Lain-lain
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmi, S.E., M.Si.
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
19 dari 55 orang Anggota dengan rincian:

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F- PDIP)**

4 dari 12 orang Anggota

1. Aria Bima
2. Adisatrya Suryo Sulisto
3. Dr. Rieke Diah Pitaloka
4. Sondang Tiar Debora Tampubolon, S.T.

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F- PG)**

4 dari 8 orang Anggota

1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.
2. Ir. H. Mohamad Idris Laena, M.H.
3. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
4. Drs. H. Dadang S. Muchtar

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F- P. GERINDRA)

3 dari 8 orang Anggota

1. Khilmi
2. Ir. H. La Tinro La Tunrung
3. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F- P. NASDEM)

3 dari 6 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P
3. H. Subardi, S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F- PKB)

1 dari 6 orang Anggota

1. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F- PD)

2 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si.
2. Muslim, S.H.I., M.M.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F- PKS)

2 dari 4 orang Anggota

1. Amin Ak, M.M.
2. Hj. Nevi Zuairina

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F- PAN)

0 dari 4 orang Anggota

-

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F- PPP)

0 dari 2 orang Anggota

-

B. PEMERINTAH/UNDANGAN:

1. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (Mohammad Abdul Ghani) beserta jajarannya;
2. Direktur Utama Perum Perhutani (Wahyu Kuncoro) beserta jajarannya.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan BUMN Industri Perkebunan dan Kehutanan, PT Perkebunan Nusantara III (*Holding*) dan Perum Perhutani, Masa Sidang V Tahun Sidang 2023/2024, Selasa, 25 Juni 2024.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,

**Yang terhormat kawan-kawan Anggota Komisi VI DPR RI,
Yang terhormat Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (*Holding*),
Bapak Mohammad Abdul Ghani,
Direktur Utama Perum Perhutani, Mas Wahyu Kuncoro, beserta
jajarannya,**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa taala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur PTPN III (*Holding*) dan Direktur Utama Perum Perhutani hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

Bapak/Ibu dan hadirin yang saya muliakan,

Menurut laporan Sekretariat Komisi VI, kita sudah dapat membuka rapat hari ini. Nanti, pada saat pengambilan keputusan rapat, kita tunggu untuk kuorum Anggota. Perkenankan saya membuka rapat dengar pendapat hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT: SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.35 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Kami juga minta persetujuan, rapat hari ini akan kita akhiri pukul? Maksimal pukul 12.30, karena Andre perlu makan siang.

(RAPAT: SETUJU)

Rapat dengar pendapat hari ini akan membahas hal-hal yang terkait dengan evaluasi kinerja korporasi 2023, rencana kerja korporasi 25, mohon maaf. Evaluasi kinerja korporasi 2023? 24 dong. Oh, iya.

1. Evaluasi kinerja korporasi 2023; dan



2. Rencana kerja korporasi 2025; dan
3. Lain-lainnya.

Bapak/ibu dan hadirin yang saya muliakan,

Seperti yang kita ketahui bersama, sektor perkebunan dan kehutanan memiliki fungsi vital dan strategis. Sektor perkebunan dan kehutanan diharapkan mampu memberikan dukungan bagi ketahanan pangan, meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, penting situasi saat ini, menghasilkan devisa bagi negara, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.

Terkait dengan hal tersebut, BUMN PTPN III dan Perum Perhutani tidak hanya kita soroti dari aspek *benefit* korporasi, tapi juga *benefit* terkait dengan *agent development*. Ini perlu berperan secara aktif dalam meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor perkebunan dan kehutanan. Misalnya seperti akselerasi swasembada gula ya, dan transformasi hijau, yang kita cermati dari berbagai informasi yang ada dalam skala global, skala nasional, dan skala lokal daerah.

PT Perkebunan Nusantara III sebagai *holding* Perkebunan Nusantara, saat ini juga tengah menjadi sorotan publik terkait dengan berbagai isu terkini yang melingkupinya. Dua sisi utama yang saat ini muncul dan juga menjadi pengamatan kita dalam kaitan swasembada pangan adalah swasembada gula, dan juga transformasi menuju praktik bisnis yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Akselerasi swasembada gula PM, PTPN III sudah kita kawal di Komisi VI ini kurang lebih hampir 3 tahun, Pak Dirut, ya. Untuk memenuhi kebutuhan gula nasional yang akhir-akhir ini masih perlu ada satu akselerasi yang, yang cukup atraktif, apalagi situasi global yang semakin tidak menentu dengan berbagai perubahan geopolitik yang berakibat pada perubahan geoekonomi.

Salah satu fokus utama PTPN III saat ini adalah akselerasi swasembada gula. Perusahaan terus meningkatkan produksi gula melalui berbagai upaya, seperti revitalisasi pabrik gula yang terus kita kawal, meningkatkan produktivitas lahan tebu, serta mengembangkan varietas tebu unggul.

PTPN III kita harapkan aktif membangun kemitraan, terutama dengan petani tebu, untuk meningkatkan pasokan bahan baku. Upaya ini penting menjadi target prioritas dari pengawasan 2023 ya, di mana target pemerintah untuk mencapai swasembada gula 2025, ini sudah 2024, Pak Dirut. Dengan meningkatkan produksi gula, PTPN III diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk memenuhi kebutuhan gula nasional dan tentunya mengurangi impor, apalagi dengan tidak menentunya nilai rupiah terhadap dolar yang diprediksi sampai akhir Desember ini akan terus mengalami penurunan nilai rupiah dan penguatan dolar.



Transformasi hijau, saya agak panjang supaya sambil nunggu kuorum Anggota. Komitmen PTPN III terhadap keberlanjutan lingkungan ini menjadi hal yang penting, ya. Selain fokus pada swasembada gula, PTPN III berkomitmen untuk melakukan transformasi hijau dan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Perusahaan ini telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan dari, dari operasional, seperti penggunaan energi terbarukan.

Penting, Pak, untuk energi terbarukan ini. Nantinya, kita akan menghadapi berbagai hal terkait dengan transformasi energi dengan industri *green industrial* ya, yang sekarang juga menjadi komitmen masalah lingkungan adalah pengelolaan limbah yang lebih baik, serta konversi sumber daya air.

PTPN III kita harapkan juga aktif dengan program-program penghijauan dan restorasi lahan gambut, untuk melindungi lingkungan. Tetapi juga untuk, tidak hanya untuk melindungi lingkungan, tapi juga untuk meningkatkan produktivitas lahan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Isu-isu lain saya kira nanti perlu mendapat perhatian, terutama yang sering muncul adalah kesejahteraan karyawan, kemitraan dengan petani dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Perhutani kita apresiasi terkait dengan transformasi digital yang berkelanjutan. Ini juga hal yang membanggakan, transformasi digital yang kita tunggu-tunggu pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan hutan yang lebih efisien, sehingga Perhutani yang saat ini gencar melakukan transformasi digital dengan berbagai aspek operasional, kita harapkan pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi geografis, *drone*, dan kecerdasan buatan telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan. Mulai pemantauan kondisi hutan, pemetaan potensi sumber daya hingga pengendalian kebakaran hutan.

Keberlanjutan hutan, sama dengan PTPN III, menjaga kelestarian hutan untuk generasi mendatang. Isu-isu yang perlu diperhatikan terkait dengan Perhutani hampir sama dengan PTPN III. Kesejahteraan karyawan perlu terus ditingkatkan, baik dari segi gaji maupun fasilitas, juga konflik lahan, PT Perhutani perlu menyelesaikan konflik-konflik lahan yang masih terjadi dengan masyarakat secara adil dan transparan, dan hilirisasi untuk pengembangan produk hutan, terutama yang nonkayu, perlu ada peningkatan atau pengembangan produk hutan nonkayu untuk meningkatkan nilai tambah hutan dan kesejahteraan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penting peran BUMN untuk sektor perkebunan dan kehutanan, dan kami ingin mendapatkan berbagai informasi terkait dengan kinerja koperasi. Komisi VI ingin mengetahui aksi korporasi, inisiatif strategis yang sedang dan akan dilaksanakan di tahun 2024 dan

2025, dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, sekaligus kontribusi perusahaan bagi negara dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, kami persilakan kepada Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (*Holding*) dan Perum Perhutani untuk dapat menyampaikan paparannya. Sebelum kami persilakan, saya akan mengecek dulu untuk kuorum Anggota. Sudah 6 fraksi dan dihadiri 14 tanda tangan, maka kuorum rapat Fraksi dan Anggota terpenuhi.

Waktu dan tempat kami persilakan pada Dirut PTPN III, selanjutnya nanti ke Direktur Utama Perum Perhutani.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI, dan
Bapak/Ibu Anggota Komisi VI yang saya muliakan,**

Terima kasih atas undangan RDP pada hari ini. Kami ingin memaparkan sebagaimana yang diminta oleh Komisi VI.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI,
Bapak/Ibu Anggota Komisi VI, dan
Teman-teman dari Perhutani, dan
PTPN,**

Bapak Pimpinan,

Kami di sini juga menghadirkan Dirut anak perusahaan, Pak, yang mengelola sawit PTPN IV, PalmCo, Pak Jatmiko, ada yang mengelola gula, Pak Mahmudi, *sugar company* (SGN), dan satu lagi yang mengelola SupportingCo yang kawa, apa, portofolio selain sawit dan gula, Pak. Baik dan kami, Direktur Pemasaran PTPN III.

Baik, Pak, langsung. Tolong. Jadi, mungkin yang menyangkut *profile* perusahaan, saya tidak akan menyampaikan secara spesifik, tapi ingin kami sampaikan sebenarnya bahwa PTPN, sesuai dengan Permenko Nomor 21/2022, kami ini, Pak, diminta menjadi salah satu program PSN. Di antara yang sebagaimana Bapak sampaikan tadi, isunya adalah bagaimana PTPN memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah, pengurangi kesenjangan pemerataan, dan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.



Jadi, dalam *pointer* programnya, kami melakukan hiliri-sawit, di antaranya yaitu melakukan hilirisasi yang selama ini PTPN itu banyak berfokus kepada CPO. Dalam 5 tahun ke depan, kita akan mengolah CPO menjadi minyak goreng menjadi 1,8 juta ton.

Kemudian, untuk produksi gula, targetnya 2 juta ton. Kemudian, kita juga akan melakukan *replanting* minimal 60.000 hektar lahan sawit yang menjadi mitra kami sawit petani.

Kemudian, terkait dengan *sustainability*, kita juga akan membangun atau mengembangkan, biosensing yang kami olah dari limbah cair maupun limbah padat, termasuk biogas dan biodiesel. Kita juga sedang menyiapkan tender untuk pembangunan pabrik biodiesel.

Terkait percepatan swasembada gula sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, di dalam Perpres 40, kami ditargetkan untuk swasembada gula konsumsi tahun 2028. Kami tegaskan di sini, Pak Pimpinan, dan Bapak/Ibu Anggota komisi VI, kami sanggup untuk swasembada. Dan kalau itu tercapai, maka sejak tahun '67, Indonesia sebagai net importir, kita bisa buktikan tahun 2028 kita swasembada. Tentu nanti ada beberapa hal yang kami harapkan dukungan dari Bapak/Ibu Komisi VI.

Lanjut. Jadi, sejak kami, manajemen yang diangkat oleh Pak Erick Thohir tahun 2019, kami telah menyusun program-program transformasi. Di mana untuk periode 2024 dan seterusnya, kita mengarah kepada suatu langkah-langkah (*great leap*) yang mengarah ke *value creation*, Pak.

Sebagaimana diketahui, Pak, tahun lalu kami bulan Desember, jadi PTPN itu tadinya ada 14 PTPN, Pak, di mana PTPN III sebagai induknya atau *holding*. Tahun 2021 dibentuklah *sugar company*, Pak, PT SGN. Dan *Alhamdulillah*, Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI, mulai tahun lalu, gula sudah untung, Pak, dan tahun ini tentu akan lebih untung lagi, meningkat lagi keuntungannya.

Kemudian, akhir Desem, awal Desember 2023, itu dibentuk namanya PTPN IV atau PalmCo yang mengkonsolidasikan beberapa PTPN, yaitu PTPN III, IV, V, VI, dan XIII, menjadi satu entitas namanya PalmCo. Lalu sisanya, PTPN sisanya dikelompokkan menjadi SupportingCo atau PTPN I. Kami ini jelaskan agak sedikit panjang lebar.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Selama ini, 14 PTPN ini, kondisinya itu disparitasnya tinggi sekali. Kalau kita cerita PTPN yang di Sumatera Utara dan Riau, itu memang sehat dari sejak didirikan tahun '96. Tapi untuk PTPN XIV, sejak didirikan tahun 1996 itu sama sekali tidak disentuh, Pak, sehingga lahan-lahannya yang luas itu menjadi *land bank* yang tidak tersentuh selama ini.

Kemudian, kalau cerita disparitas produktifitas, itu dari yang mulai yang 6 ton di Medan, sampai mungkin hanya 2,5 Ton di XIV. Itu dulu ketika masih bentuknya PTPN I sampai XIV. Dengan dilakukan *merge* pada tahun 2023 di 1 Desember, maka tadi saya sampaikan, PTPN III, IV yang di Sumatera Utara, V di Sumatera, di Riau, kemudian VI di Sumatera, di Jambi, Sumbar dan N XIII itu menjadi satu perusahaan. Itu sawit, sawit semua. Kemudian, Pak, lahan-lahan sawit yang dimiliki oleh PTPN lain, itu dikelola oleh PalmCo, Pak.

Jadi, ini satu *merge* yang mendistribusikan kapabilitas modalitas dari PTPN yang kuat tadi, untuk memperbaiki PTPN yang lemah, dalam hal ini PTPN VII di Sumatera Selatan, PTPN XIII di Kalimantan, PT XIV di Sulawesi. Jadi, dengan terbentuknya *subholding* PalmCo itu, maka kelapa sawit semua dikelola oleh mereka. Dan target kami, Pak, 10 tahun ke depan, kita akan memperluas tanaman kelapa sawit kami, dari sekarang 550 menjadi 700.000 hektar, Pak. Jadi, dari mana 700.000 hektar? Kami akan melakukan konversi karet kami dan *land bank* yang kosong di XIV, di Sulawesi untuk kelapa sawit, Pak. Itu bagian dari memperkuat, sebagaimana Bapak sampaikan ke depan tentang kemandirian energi diterbarukan.

Lalu, PTPN-PTPN lainnya, seperti PTPN I di Aceh, PTPN II di Sumatera Utara, sebenarnya sudah sehat. PTPN VII di Sumatera Selatan, sebenarnya kondisi operasional bagus, tapi karena beban hutangnya tinggi, itu ada kesulitan. Lalu, PTPN di Jawa, dari mulai Jawa Barat PTPN VIII, Jawa Tengah PTPN IX, Jawa Timur PTPN X, XI, XII itu dengan PTPN XIV dijadikan satu perusahaan namanya SupportingCo.

Di mana, Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi VI, lahan-lahan tebu milik SupportingCo itu di-KSO-kan dengan SugarCo. Jadi, nanti seluruh tanaman tebu itu dikelola oleh PT SGN, ini supaya fokus. Jadi, nanti untuk *komoditi* tebu yang *ngelola* PT SGN, yang sawit PalmCo. Nah, *supporting* itu mengelola *komoditi* lain, yaitu *komoditi* karet, teh, kopi, dan sebagian apa namanya, pariwisata dan tentang lahan-lahan kawasan dan sebagainya.

Bapak Pimpinan yang saya hormati,

Jadi, dengan cara seperti ini, tadi Bapak singgung juga, dengan dibentuknya 3 *subholding*, maka isu-isu yang selalu Bapak-Bapak sampaikan kepada kami tentang isu karyawan, pensiunan, itu sudah otomatis terselesaikan. Ambil contoh seperti PTP VIII di Suma, *eh*, di Jawa Barat, itu selama ini *terhutang*, itu santunan hari tua sampai 300 miliaran. Kami akan selesaikan dalam 2-3 tahun, Pak, karena ada arus pendanaan dari PTPN yang sehat.

Kemudian, mungkin kami ingin laporkan kepada Bapak/Ibu Komisi VI, di Jawa Barat itu ada 20.000 hektar kelapa sawit, Pak. Jadi, di, ada di kabupaten, *eh*, di Provinsi Banten, selama ini, Pak, produktivitasnya itu paling

12-13. Saat ini, Pak, dengan dikelola oleh PalmCo, itu sudah tahun ini mungkin 18, Pak, dan target kami 20.

Kemudian, satu lagi di Jawa Timur, Pak, kami punya tanaman kopi, Pak, kopi arabika di dataran tinggi Jember sana, Pak, di Situbondo. Selama ini, yang menyedihkan adalah kopi arabika itu harganya sangat tinggi, bahkan tahun ini 8,4 dolar per kilo. Tetapi produktivitasnya rendah, Pak, selama ini 300-an.

Sudah kita kelola, kerja sama dengan PalmCo, maka tahun ini itu sudah di atas 400. Dan kami optimis targetnya nanti sampai 1 ton. Jadi, bahkan kami melakukan perluasan kopi arabika, dan kami juga akan kolaborasi dengan Perhutani untuk peserta petani perhutanan sosial. Kita bantu mereka untuk memperbaiki tanamannya, kami tampung sebagai *offtaker*, sehingga harga petani tidak dimainkan oleh tengkulak.

Jadi, ini semua dampak dari reorganisasi PTPN. Jadi, arahnya ke arah, jadi dengan demikian, *roadmap* PTPN ke depan tinggal bagaimana mempercepat apa-apa yang sudah disampaikan, kami sampaikan.

Kemudian, selanjutnya kami ingin sampaikan kepada Bapak, selama transformasi yang kami lakukan dari tahun 2020 sampai saat ini, itu PTPN, itu selama 3 tahun sudah mengumpulkan laba 11,7 triliun, Pak. Lalu, kami sudah membayar kewajiban kepada perbankan, 11,3 triliun. Hutang pokok kami turun, Pak, selama 3 tahun, 11 triliun.

Lalu, hutang santunan hari tua tadi sudah 3,7 triliun, Pak, kami bayar. Lalu, iuran pensiun yang dulu kami *enggak* pernah bayar, sudah kami bayar 3 triliun. Masih belum lunas, Pak, tahun depan baru lunas. Jadi, mungkin tahun 2026, PTPN itu pasti akan meloncat, baik *kemampulabaan*, maupun *cashflow*-nya, Pak. Jadi, *Inshaallah* tahun depan kita sudah selesai urusan dengan karyawan, kemudian urusan tentang pensiun dan sebagainya. Jadi, itu semua tentunya kami tidak melupakan atas dukungan Komisi VI

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Jadi, tinggal berapa utangnya, Pak?

DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):

Ya, Pak?

Tinggal 30-an triliun dari 43. Iya. Jadi, itu semua kami tidak melupakan atas dukungan dari Komisi VI yang luar biasa.

Kemudian lanjut, mungkin secara singkat, kami ingin sampaikan, Pak, PTPN dengan transformasi yang dukungan dari Komisi VI selama 3-4 tahun ini, maka kinerja kami secara korporasi itu sudah setara *best practices*, Pak.



Itu ada Astra Agro Lestari, Salim Ivomas, Sampoerna. Itu rasio-rasio tentang kinerja keuangan kita sudah setara dengan mereka.

Mungkin isu yang masih mengganjal di PTPN adalah *labour cost*-nya lebih tinggi, karena memang standar gaji PTP lebih tinggi dari swasta, Pak. Yang kedua, *Debt to EBITDA* kami masih tinggi, karena hutang masa lalu yang masih tinggi.

Lanjut. Kemudian, *highlight* tentang PTPN III, kinerja tahun 2023. Kami agak akan sampaikan datanya, memang tahun lalu agak sedikit penurunan, karena harga CPO yang turun sekitar 2000, 2,5 triliun, Pak. Akibat harga turun dari 2000, 12.500 menjadi 11.100, tapi tahun ini kinerjanya meningkat kembali, Pak. Di halaman berikutnya kami sampaikan bahwa di tahun 2024, baik parameter tentang pendapatan, *gross profit*, *net income*, menaik lagi mendekati tahun 2022.

Jadi, itu yang kami lakukan, dan sebagaimana kami sampaikan kepada Bapak, program kami di 5 tahun ke depan adalah memperluas tanaman kelapa sawit, mengurangi tanaman karet, dan memperbaiki, merehabilitasi tanaman teh dan kopi, Pak. Teh dan kopi di Pulau Jawa akan kami perbaiki, karena teh di Pulau Jawa itu sudah 25 tahun tidak bangkit. Kami perbaiki dengan cara memper, memper, apa, menambah populasinya, kemudian dikelola dengan kultur teknis yang baik.

Ada dua hal yang ingin kami sampaikan dan mungkin dukungan Bapak dalam rapat hari ini, di halaman berikutnya.

**Jadi, Bapak/Ibu Komisi VI, dan
Pimpinan yang saya hormati,**

Kami ingin sampaikan, Pak, berita baik tentang tata kelola tebu di PTPN. Jadi, tadi kami sudah sampaikan, bahwa di tahun lalu, EBITDA-nya hampir 1 triliun mendapatkan laba. Tahun ini sepertinya lebih baik dari tahun lalu, Pak, dan kami ingin tegaskan ke Bapak, target kami ini akan mengangkat produktivitas tebu petani 8 ton, Pak.

Jadi, ini, kalau petani itu bisa kita angkat, petani itu hampir 300.000 hektar, ditingkatkan produktivitasnya sekarang dari 4 ke menjadi 8. Dan angka 8 itu, Bapak Pimpinan, itu bukan angka yang muluk-muluk, karena di tahun 2012, ketika waktu itu menterinya Pak Bungaran Saragih, karena waktu itu program, program apa namanya, Program Bongkar Ratoon, itu ekstensif, itu *udah* tercapai, Pak. Jadi, kita tidak jauh-jauh di meniru di tahun 2012, bahkan di sebelum tahun 2000, 1975, itu prioritas kita selalu di atas 8-9 ton.

Jadi, hanya yang perlu kami dukungan dari Komisi VI adalah yang pertama adalah tentang, terutama yang terkait dengan ini, Pak, batasan KUR, Pak. Kredit Usaha Rakyat selama ini, Pak, itu ada pagunya, Pak. Parganya 500, kalau seorang petani sudah meminjam 500 juta dalam satu siklus, satu periode, itu berikutnya bunganya sudah tidak disubsidi lagi, Pak. Akhirnya,



petani mengganti namanya, nama orang lain, anaknya. Jadi, itu *kan* sebenarnya menurut saya, lebih bagus, menurut saya, kalau ini dibebaskan. Artinya, petani didukung dengan kredit yang berbunga rendah dengan subsidi, maka petani memilih kapasitas untuk membeli pupuk dan sebagainya.

Kebetulan di Kementerian BUMN sudah dibentuk Program Makmur, Pak. Jadi, Program Makmur itu melibatkan PTPN, RNI, produsen pupuk, perbankan, bahkan asuransi, di mana untuk petani tebu tidak perlu pupuk subsidi, tapi yang penting ada pupuknya dan bisa dibeli. Dengan ekosistem Makmur ini, maka petani otomatis bisa memenuhi kebutuhan sarana produksinya.

Lalu, yang perlu kami laporkan kepada Bapak/Ibu dari Komisi VI, kepercayaan petani kepada PTPN sekarang sudah luar biasa. Mereka, apa namanya, percaya sama kami, terutama apa yang kami lakukan adalah dalam kaitan dengan kepastian transparansi rendemen dan penjualan gula petani, Pak.

Jadi, gula petani kita tidak lepas mereka sendiri, tapi mereka menggunakan *platform* kami. Kemudian, ketika harga turun, kami tahan, kami tidak menjual produk kami, yang petani yang dijual. Sehingga, *alhamdulillah*, di tahun ini, rata-rata sudah di atas 15, 14.500, Pak, sesuai dengan harga acuan dari pemerintah. Jadi, ini semua acuan pembelian dari pemerintah. Jadi, itu semua perlu dijaga ke depan. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sangat bagus, Pak, untuk diteruskan.

Dan terutama kaitan dengan Internal PTPN, Pak. Jadi, kami sekarang sedang membentuk, mungkin dalam waktu 2-3 bulan akan terbentuk, Pak Pimpinan, yaitu organisasi PTPN yang khusus menangani tebu rakyat. Selama ini *enggak* ada, Pak. Tebu rakyat. Jadi, nanti kami ada satu CVP yang nanti tebu rakyat, dari mulai perencanaan, dari mulai tanam sampai nanti terbang.

Karena menurut kami, isu gula di Indonesia, itu bukan isu pabrik, Pak, dan bukan isu varietas, tapi isu bagaimana petani menanam tebunya dengan kultur teknis yang benar. Kami telah, sebenarnya kami mengharapkan dari Komisi VI bisa mengunjungi proses terbang di Jawa timur. Kami telah melakukan *piloting*, Pak, di Jatiroto. Dengan dikontrol 100%, Pak, itu produksi gulanya bisa di atas 18 ton, Pak. Rendemennya 8, produksinya 205, berapa? 250 lebih, Pak.

Jadi, artinya, kami ke depan *haqqul yaqin* untuk PTP, mungkin bukan 8 ton, mungkin 10 ton. Kebetulan kami, Pak, sedang dalam proses persetujuan Menteri BUMN, kita akan membangun apa namanya, *water management system* di lahan-lahan HGU.

Jadi, untuk petani, dukungan yang kami harapkan dari Bapak Komisi VI, yaitu tadi tentang pagu pinjaman itu tidak dibatasi KUR-nya. Yang



berikutnya, kebijakan dari pemerintah sekarang terutama, Bappenas, Pak, sudah cukup baik, di mana, Pak Kepala Bappenas, ketika menetapkan harga acuan pembelian, itu basisnya adalah memperhatikan margin petani, Pak. Jadi, harga tidak ditekan di bawah, sehingga petani memperoleh insentif.

Bapak Pimpinan yang saya hormati,

Petani sekarang sudah tidak menjual tebu, Pak, tapi mereka bagi hasil. Karena kalau menjual tebu, tebu itu isinya bisa gula dan bukan gula *kan*, Pak. Nah, isu-isu yang perlu kami perbaiki adalah terkait perbaikan varietas, kemudian bongkar *ratoon*. Saat ini, Pak, luas petani yang *ratoon* 3 ke atas itu 87%, Pak. Nah, kita akan membantu bongkar *ratoon*, supaya petan, dengan bongkar *ratoon* itu, yang standar *kan* mestinya *kan* 25%. Jadi, kalau kita belajar tahun 2012, waktu itu bongkar *ratoon* besar-besaran, sehingga petani bisa produktivitasnya meningkat.

Kemudian, barangkali ini masih *preliminary*, mungkin ke depan, Bapak Pimpinan, perlu di industri gula, itu perlu seperti di BPD di Sawit, Pak. Kalau sawit setiap ekspor, itu akan dikenakan *levy*, *levy*-nya ditaruh di BLU yang namanya BPDPKS. Nah, mestinya di gula harus ada, Pak. Karena kalau gula petani dilawankan dengan gula impor, pasti kalah, Pak, sampai kapan pun kalah.

Maka, ketika katakanlah gula petani harga pokoknya sekarang Rp12.000,00 ketika impor masuk 10.000, maka harus ada dikenakan *levy*, katakanlah Rp1.000,00. Uangnya untuk petani, bukan untuk PTPN atau swasta. Untuk petani membantu, apakah membantu penelitian tentang plasma nutfah, tentang varietas, tentang, dan bibit, dan sebagainya. Jadi, itu yang harapan kami, mungkin tidak jangka pendek, tapi jangka panjang yang perlu kita pikirkan, agar *sustainability* kemandirian petani.

Di, di paparan yang kami sampaikan sebelah kiri, Pak, kami ingin jelaskan kepada Bapak. Jadi, saat ini *kan*, prioritas petani *kan* antara 4 sampai 5 ton, Pak. Kalau 4, kalau 5 ton katakanlah, itu harga pokok peta, harga pokok gula petani, Pak, ini sudah dipotong bagi hasil dan biaya olah, itu sekitar 9 koma, 9.700, Pak. Target kami ,petani harus bisa menaikkan 8 ton. Kalau 8 ton, beban pokok petani, HPP-nya, itu cuma 6.300. Artinya, kalau 6.300, Pak, petani mungkin tidak perlu dibeli sekarang 14.500, kemahalan, Pak. Karena, tentu kalau kemahalan yang kasihan konsumen. Mungkin kalau nanti petani sudah mencapai 8 ton, mungkin harga gula perlu diturunkan, katakanlah menjadi 12.000. Jadi, petaninya lebih sejahtera dari sekarang, konsumennya lebih sejahtera juga, karena tidak membeli gula lebih mahal.

Cuma, kami ingin memohon dukungan Komisi VI, sebelum produksi peta, produktivitas petani mencapai 8 ton, tolong kami dilindungi. Jangan masuk gula impor yang, kalau gula impor masuk gila-gilaan, kami mati dan petani tidak bisa memperbaiki agronominya, Pak. Tapi ketika nanti sudah 8 ton produktivitas petani, maka kita bisa bersaing dengan gula impor. Ini tentang gula, Pak.



Yang berikutnya tentang kelapa sawit, Pak. Jadi, untuk yang Bapak sampaikan tadi, kalau kita ingin membangun kemandirian energi baru terbarukan, sebenarnya kelapa sawit kita itu kalau memang mau istilahnya B100, sanggup, Pak. Saat ini, dari produksi CPO kita sekitar 50 juta ton, kebutuhan untuk bahan bakar solar itu kan cuma 35 kilo liter, Pak. Artinya, 35 juta atau 40 juta ton, cukup untuk swasembada *bio, biosolar*, Pak. Persoalannya kalau itu dilakukan sekarang, maka kemampuan ekspor akan berkurang, sehingga devisa akan berkurang.

Kami mengusulkan, sebenarnya ini sudah menjadi kebijakan politis pemerintah, Pak. Pemerintah itu sekarang akan menaikkan bantuan, Pak, subsidi peremajaan sawit rakyat, dari 30 ke 60. Saya mendengar itu keputusan pemerintah sudah ada, tinggal secara administratif. Mudah-mudahan, dalam minggu ini atau minggu depan akan diputuskan oleh Komrahnya BPDPKS. Kalau bantuan pemerintah, bantuan BPDPKS itu bisa dinaikkan dari 30 ke 60, maka petani yang selama ini peremajaan sawit terakhir itu hanya 20-30.000 ton, Pak, eh, 20 sampai 30.000 hektar. Sementara yang mau di *replanting* itu 3 juta. Jadi, perlu waktu 150 tahun, tentu ini tidak, tidak, tidak mungkin.

Kenapa masalahnya demikian? Karena ada isu-isu terkait dengan legalitas lahan, kemudian dia kemampuan, apa, masalah petani yang apa namanya, sertifikatnya digadaikan, jadi *enggak* bisa pinjam bank. Jadi, dengan kebijakan pemerintah yang akan menaikkan *levy* yang sebenarnya berasal dari petani menjadi 60 juta, maka otomatis kebutuhan *replanting* sekitar 75 juta, itu yang 15 jutanya cukup dari perusahaan mitranya, tidak harus PTPN, Pak. Jadi, PTPN kebetulan programnya 60.000 hektar, kami kalau dengan ini dinaikkan, kami sanggup, akan mungkin 100.000 hektar juga sanggup, Pak.

Jadi, ini barangkali perlu dukungan dari Komisi VI, agar BPDPKS segera me, merealisasikan kebijakan pemerintah, supaya bantuan 60 juta per hektar itu segera tercapai, karena sangat menyedihkan, Pak. Jadi, saat ini ada 3 juta hektar lahan petani yang umurnya di atas 30 tahun. Kalau di atas 30 tahun, Pak, *protasnya* paling 2 ton, Pak, dia tidak memiliki uang untuk *replanting*.

Tapi, dengan bantuan BPDPKS ini, di mana petani itu 42%, kalau sekarang katakanlah dana *levy* 60 miliar, 60 triliun, kalau 42% kan 24 triliun kan, Pak. Kalau 1 tahun kita mau, mau *me-replanting* 550.000 hektar per tahun, itu kalau kali 60 kan sekitar 30, 33 triliun. Selama ini kita petani hanya menggunakan dana *levy, enggak* sampai 10%. Artinya, dalam 5 tahun ke depan kita harus kejar, sehingga kalau itu tercapai maka produksi CPO kita nantinya antara.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Mas Bima.



**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

60 sampai 70.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Mas Bima.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Juta ton.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Mas Bima, Mas Bima.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Mungkin itu.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Boleh tanya *enggak* dikit, Pak. Kenapa hanya 10% baru dana BPDPKS itu? Kenapa ditahan dana itu?

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Enggak.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Enggak diturunin?

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Enggak ditahan, Pak. Persoalannya karena petani *kan gini*, Pak, ketika petani mau melakukan *replanting*, itu *kan* uangnya 30 *enggak* cukup, Pak, karena kebutuhannya 75. Dia harus *ngambil* dari bank, Pak. Nah, ketika mengambil dari bank, ada syarat ketentuan, Pak. Yang ke bank itu *kan* petani mungkin sertifikatnya digadaikan atau sudah dijualbelikan, kemudian petani mungkin dulu pernah waktu bangun di awal tahun, 30 tahun yang lalu mungkin dia *enggak* bayar kreditnya, sehingga *blacklist*, jadi itu rumit kali.

Dan sekarang Kementerian Pertanian sebenarnya sudah bagus, Pak, membangun pola peremajaan sarat dengan pola kemitraan. Jadi, cukup nanti misalkan kalau PTPN atau perusahaan swasta dengan BPDPKS, harapan saya *sih* mungkin di situ bisa masuk katakanlah BPKP, kemudian Kejaksaan ikut memonitor, supaya tidak ada permainan-permainan. Lebih mudah, Pak. Jadi, di Kementerian, ekosistemnya *udah* dibangun.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Sudah ada, solusi *udah* ada?

DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):

Udah ada solusi, Pak. Jadi, minta dukungannya supaya lebih cepat. Jadi, kalau ini tercapai, Pak, programnya pemerintah untuk B100, sebenarnya lebih cepat, lebih baik.

Mungkin, Pak, demikian kami sampaikan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kami persilakan Dirut Utama Perutani.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Baik, terima kasih.

Pak Pimpinan yang kami hormati, Pak Aria Bima, Ibu/Bapak Anggota Komisi VI yang kami hormati, Pak Gani dan tim dari PTPN Group, Rekan-rekan Perum Perhutani,

Selamat pagi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,

Terima kasih, Pak Pimpinan, telah mengundang kami di, Perhutani untuk bisa hadir menyelenggarakan RDP dengan Komisi VI. Izin, Pak Pimpinan, mungkin sebelum kami sampaikan materi, kami ingin memperkenalkan tim kami terlebih dahulu, Pak Pimpinan. Kami hadir lengkap dengan Direksi Perhutani, Pak. Sebelah kiri kami, Pak Endung. Ini Direktur yang membidangi perencanaan. Kemudian sebelah kirinya, Pak Anis. Ini Direktur yang membidangi Perhutanan, Direktur Operasi. Kemudian paling kiri, Pak Anggar, ini Direktur yang membidangi Komersial. Di belakang kami, Bu Dewi. Direktur yang membidangi Keuangan dan Manajemen Risiko. Sebelahnya, Pak Denny. Direktur yang membidangi SDM Umum dan IT.



Kemudian, kami juga menghadirkan Dirut-Dirutnya anak perusahaan, Pak Pimpinan, Ibu/Bapak sekalian:

- Ini Pak Tedy. Ini Direktur yang membidangi Perhutani Alam Wisata Atau Palawi, Pak Dirutnya; Kemudian
- Sebelahnya, Pak Oman. ini Dirutnya Inhutani I yang beroperasi di Kalimantan dan Sulawesi; Kemudian
- Yang paling kiri, Pak Dicky. Ini Direktur Utama Inhutani V, ini wilayahnya ada di Lampung.

Jadi, ini tim kami, Pak, kami hadir lengkap.

Ibu/Bapak sekalian,

Mohon izin, kami akan menyampaikan sesuai agenda dari Pimpinan, bahwa pagi hari ini kami akan menyampaikan evaluasi kinerja korporasi tahun 2023, kemudian kami juga akan sampaikan rencana ke depannya.

Ibu/Bapak sekalian,

Mohon izin. Yang pertama, perlu kami sampaikan tentang isu-isu strategis dan tren industri kehutanan, mungkin ini sangat berbeda dengan tempat Pak Ghani tadi. Kami ini satu, bentuknya Perum, Pak. Jadi, perusahaan umum, tidak terbagi atas saham. Kemudian, kami ini menjalankan model bisnis dengan berbasiskan PP (Peraturan Pemerintah). Kami diminta untuk mengelola hutan di Pulau Jawa dan Madura. Jadi, kami ini pengelola hutan.

Ibu/Bapak sekalian,

Sebagaimana yang kami sampaikan, bahwa di sektor kehutanan, ini ada beberapa isu strategis, Pak, di Indonesia:

- Tentang peluang sektor kehutanan di energi baru terbarukan; Kemudian juga
- Kami selalu diminta untuk mendukung dan berkontribusi, sektor kehutanan ini terhadap program *food security* dan *bioethanol*. Ini mungkin nanti sedikit terkait dengan tempat Pak Ghani; Kemudian berikutnya juga
- Dukungan sektor kehutanan untuk mencapai *net zero emission*. Karena kami salah satu BUMN yang menyerap emisi; Kemudian yang berikutnya
- Ada isu terkait dengan peningkatan *economic value* sumber daya hutan dan pemberdayaan masyarakat. Tadi Pak Pimpinan juga berpesan tentang hal ini;
- Juga tentang peningkatan nilai tambah produk hasil hutan;
- Tuntutan pengelolaan wisata alam dengan adaptasi digitalisasi dan berkelanjutan.

Tentunya isu strategis industri kehutanan di Indonesia ini tidak bisa terlepas juga dari tren industri kehutanan global, di mana:

1. Peningkatan kebutuhan energi baru terbarukan yang berbasis biomassa, ini cukup pesat pertumbuhannya; kemudian juga
2. Ada pergeseran tentang bagaimana mengelola hutan. Kalau dulu *single commodity*, sekarang sudah mulai di-*introduce* tentang multi usaha kehutanan. Artinya, kawasan hutan itu bisa ditanami tanaman-tanaman sela, yang tidak melulu membudidayakan tanaman-tanaman kehutanan; kemudian juga
3. Kontribusi NDC. Ini *Nationally Determined Contribution*, ini kami juga tentunya harus berkontribusi terhadap penurunan emisi, dengan target 2030 berkurang sebesar 29%; dan
4. Penggunaan teknologi dan digitalisasi untuk pengelolaan hutan;
5. Hilirisasi. Ini juga menjadi tren global yang tidak bisa kita hindari. Tadi Pak Pimpinan juga menyampaikan tentang perlunya hilirisasi hasil hutan bukan kayu di Perum Perhutani; terakhir
6. Tentang tren peningkatan kebutuhan wisata berbasis alam.

Jadi, Ibu/Bapak sekalian, dari isu strategis dan tren industri kehutanan secara global, kami di Perhutani mencoba membuat respons:

1. Tentunya kami terus mengacu kepada pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan bersertifikasi. Jadi, seluruh hutan yang kami kelola sudah tersertifikasi secara internasional;
2. Kami juga terus melakukan hilirisasi produk hasil hutan kayu dan bukan kayu. Kami akan sampaikan nanti, Pak Pimpinan, seperti pesan Bapak;
3. Kami juga mulai mendesain model bisnis terkait dengan *Green Economy* melalui inovasi model bisnis solusi berbasis alam. Ini yang sering Ibu/Bapak dengar barangkali tentang *carbon trading*, kami juga melakukan hal tersebut; kemudian
4. Di sektor multi usaha kehutanan, kami diminta untuk men-*support* PTPN dan RNI untuk menyediakan tebunya. Nanti kami akan sampaikan di materi, apa-apa yang sudah kami lakukan; dan
5. Tentunya penggunaan teknologi dan digitalisasi di sektor kehutanan;
6. Kami juga diminta untuk melakukan penguatan *talent-talent* di Perum Perhutani.

Selanjutnya, Ibu/Bapak sekalian, kami sampaikan bahwa Perhutani sebagai perusahaan umum, mengacu kepada peraturan pemerintah untuk menjalankan kegiatannya. Kami memiliki tiga anak perusahaan dari yang sebelumnya ada 8. Jadi, tahun 2022 kami melakukan aksi korporasi, melakukan penggabungan, Pak Pimpinan, Inhutani I, II, dan III kami gabung ke I, Inhutani IV dan V, serta satu anak perusahaan kami, kami gabungkan ke V, dan satu anak perusahaan *stand alone*, yaitu Perhutani Alam Wisata.

Jadi, Ibu/Bapak, kami sampaikan bahwa kami mendapatkan tugas untuk mengelola hutan. Ini kalau bicara luasan itu 2,4 juta hektar, ini hutan di pulau Jawa, ini kira-kira luasnya 1,9% dari seluruh luas hutan di Indonesia yang 125 juta hektar. Memang terdengar luas *nih*, Pak, 2,4 juta, tapi kami hanya bisa memanfaatkan di hutan produksi saja yang luasannya 890.000. Dan kami melakukan penebangan itu diatur oleh Kementerian LHK, tidak bisa menebang sembarangan. Kami, dalam 1 tahun, kami hanya boleh menebang rata-rata 5.000 hektar saja. Jadi, memang kelihatan luas yang kami kuasai, tapi sebenarnya yang bisa kami produksi hanya terbatas di hutan produksi.

Kemudian, anak-anak perusahaan kami, ini juga punya, dulu namanya HPH atau HTI, sekarang namanya menjadi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan). Inhutani I ini memiliki, I dan V memiliki 1,2 juta hektar. Ini wilayah kerja kami, meliputi di Pulau Jawa dan Madura oleh Perhutani, kemudian Kalimantan, Sulawesi oleh Inhutani I, dan di Sumatera oleh Inhutani V.

Berikutnya, kami akan sampaikan terkait dengan kegiatan tanaman dan tebangan. Jadi, Ibu/Bapak sekalian, ini yang sering kali kami di-*challenge*, kenapa luas hutan yang dikelola sangat luas, tapi produksinya hanya sedikit. Tadi kami sampaikan, Pak, bahwa setiap tahun, kami memiliki semacam rencana kerja dan anggaran perusahaan, tapi model di Kementerian LHK.

Jadi, kami itu 1 tahun, itu dijatah tebangannya, kira-kira hampir 5 sampai 6.000 hektar per tahun. Dan kami setiap tahun juga mendapatkan kewajiban untuk melakukan penanaman dengan rasio 1 banding 5, maupun 1 banding 10, Pak. Jadi, setiap menebang 1 hektar, kami menanam 5 hektar sampai dengan 10 hektar, sehingga grafik ini menggambarkan luasan tanam kami setiap tahun, serta luasan tebangan kami setiap tahun.

Berikutnya, kami dalam menjalankan model bisnis ini, ada dua *revenue stream* kami, Pak. Yang pertama, kami menjual kayu dan industri kayu sedikit, serta kami menyadap getah pinus. Getah pinus ini kami olah menjadi gum rosin, terpentin, dan derivat. Kami juga memiliki objek wisata, serta hasil hutan lainnya.

Ibu/Bapak sekalian,

Kami sampaikan tentang sertifikasi dan pengembangan usaha, bahwa seluruh wilayah hutan yang kami kelola, ini seluruhnya sudah bersertifikat. Kemudian, kami juga mengembangkan hutan tanaman energi. Ini kami menanam dua jenis tanaman, Gamal dan Kaliandra, saat ini posisinya di luasan 36.858 hektar. Kemudian, kami juga mendesain dua model bisnis, *carbon trading*, ini melalui Inhutani I. Konsesi yang dimiliki oleh Inhutani I, kami kemas menjadi model bisnis *carbon*, saat ini masih dalam proses monetisasi.

Kami juga melakukan penanaman tebu. Ibu/Bapak sekalian, bahwa posisi sampai dengan 2023, luasan tanaman tebu yang kami tanam sudah



seluas 11.000 hektar dan sampai dengan akhir tahun ini, target di RJPP kami seluas 18.000 hektar.

Kemudian, mengenai kinerja keuangan. Jadi, Ibu/Bapak sekalian, kami sampaikan, Pak Pimpinan, bahwa di 2023, ini memang tahun yang relatif cukup sulit bagi kami. Dengan sektor industri yang mengolah hasil kayu atau industri mebel turun cukup signifikan, tapi kami masih mampu menahan *revenue*, Pak. Jadi, *revenue* kami di 2023, secara rerata, CAGR-nya tumbuh 2,9% selama 5 tahun terakhir.

Aset kami tidak sebesar Pak Ghani memang, karena sekali lagi, kami tidak mencatatkan luas hutan itu sebagai aset kami. Kami hanya mencatat jumlah pohon di area produktif saja yang menjadi aset kami. Aset kami tumbuh 1,8%, CAGR ini, *Compound Average Growth Rate*, selama 5 tahun terakhir dengan *net profit after tax* tumbuh 19,6%. Jadi, cukup baik yang bisa kami capai di 2023. Dari parameter-parameter keuangan, ini yang sering kali Kementerian BUMN *memandorikan* ke kami, semua aspek keuangan kami masih di posisi yang hijau.

Berikutnya, kami sampaikan tentang kinerja operasi dan komersial. Jadi, dua produk utama kami, yaitu produksi kayu dan produksi getah pinus, ini rasanya masih cukup bagus. Kami menebang rata-rata 900.000 m³, di mana sebagian didominasi kayu jati dan sebagian didominasi oleh kayu rimba.

Kemudian, untuk produksi getah pinus. Ini di 2023, ini capaian tertinggi selama hampir 14 tahun terakhir, Pak Pimpinan. Jadi, produksi getah pinus kami mencapai 104.000 ton. Inilah yang menjadi *driver revenue stream* di 2023.

Nah, tadi kami sampaikan, Bapak Pimpinan, Ibu/Bapak sekalian, tentang kondisi komersial di 2023. Di mana kondisi ekonomi makro, sebagaimana data BPS menunjukkan penurunan ekspor, dan secara spesifik, ekspor *furniture*, itu turun 13 sampai 58%, Pak Pimpinan.

Jadi, ini juga mempengaruhi daya serap industri pengguna kayunya Perhutani, sehingga di akhir tahun lalu cukup besar persediaan akhir kami, karena industri pengolah kayu yang memang mengalami perlambatan dalam penyerapan kayu kami. Sehingga, secara total, komoditas utama kami, yaitu kayu itu turun 4%, Pak, di 1,9, 1,69 triliun dari tahun 2022 yang 1,7 triliun. Dan industri gum rosin, terpentin, dan derivat, ini turun cukup besar, 6,1%, *year on year*-nya atau 1,7 triliun dari tahun 2022 yang 1,8 triliun. Ini kira-kira yang mewarnai kegiatan usaha kami di 2023.

Kemudian, ada beberapa gambaran terkait dengan negara tujuan ekspor, Pak. Kami, hasil hutan bukan kayu kami, yaitu gum rosin, terpentin, dan derivat, ini mayoritas kita ekspor dengan tujuan negara di India, China, Jepang, Belanda, dan Pakistan. Sementara, kalau kayu, kayu *log*, ini kami

diserap oleh industri pengguna kayu lokal dan ada beberapa produk olahan yang kami juga lakukan ekspornya.

Berikutnya, kami sampaikan gambaran halaman 5, ini terkait dengan arahan dari Kementerian BUMN untuk *men-support* BUMN gula dalam hal penyediaan bahan baku tebu untuk pabrik gulanya. Jadi, Ibu/Bapak sekalian, di 2023, realisasi kami menanam 11.000 hektar, dan di 2024 targetnya 18.000. Jadi, ada tambahan kira-kira 7.000 di tahun ini. Tanaman tebu kami tersebar di beberapa KPH dan memang tanaman tebu ini kami desain untuk berdekatan dengan PG-PG yang dimiliki oleh PTPN dan RNI, sehingga memudahkan *handling*-nya nanti ketika memang pada saatnya akan dipanen.

Kami sampaikan juga tentang pengembangan bisnis biomassa di Perhutani, tentang pengembangan *cluster* hutan tanaman energi di Perum Perhutani. Ini kami sudah menanam 36.000 hektar dan kami akan perluas menjadi 58.000 hektar sampai dengan akhir tahun ini.

Jadi, Ibu/Bapak sekalian,

Sebagai informasi, kami sudah melakukan *commercial agreement* dengan PLN untuk *men-supply* pembangkit listriknya PLN yang di Sukabumi dan Rembang. Jadi, nanti kami akan membuat serbuk kayu, ini yang akan menjadi campuran PLTU-nya PLN dalam menjalankan pembangkitnya. Kapasitas kami 11.500 di Sukabumi dan 14.300 di Rembang, saat ini baru berjalan. Ini agak terlambat, yang harusnya tahun lalu, karena perizinan AMDAL yang membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Kemudian, satu pabrik kami akan bangun di tahun ini di Semarang, Pabrik Brumbung. Ini khusus *wood pellet*. Jadi, nanti kami dari serbuk, kami akan *peletizer* menjadi *pellet* dan kami akan selesaikan sampai dengan akhir tahun ini.

Kemudian, Ibu/Bapak sekalian, kami akan teruskan tentang kawasan wisata yang ada di Perum Perhutani. Jadi, kami ada sebagai konsekuensi mengelola hutan, tentunya obyek-obyek wisata kami terkait dengan hutan yang kami kelola. Ada ragam daya tarik wisata kami, mulai air terjun, bumi perkemahan, *goa*, pegunungan, air panas, sungai, telaga atau waduk, hutan alam, taman rekreasi, situs, pantai, kawah, dan peminatan khusus. Jadi, total dari objek wisata kami, ini lebih kurang 685 lokasi. Ini memang berkurang dan bertambah, Pak, karena dulunya, karena hutan ini *accessibility*-nya sulit dan masyarakat sekitar hutan membutuhkan rekreasi, ini *nampaknya* kami mulai mencoba membuat uji coba wisata.

Jadi, tahapan satu uji coba, tahapan berikutnya nanti menjadi rintisan, kemudian setelah *advance*, menjadi wana wisata. Nah, ini yang menyebabkan *in out* jumlah dari wisata kami. Tahun lalu, pengunjung wisata kami catat 17,3 juta, sedikit menurun dibandingkan 2022 yang 18,9, *tapi* sampai dengan bulan Mei sudah naik lagi 8,1 juta atau naik 70%. Dengan pendapatan tahun lalu hampir 200 miliar, khusus untuk wisata ini.



Ibu/Bapak sekalian,

Mungkin perlu kami sampaikan juga tentang penyerapan tenaga kerja, ini cukup banyak. Kami menyerap tenaga kerja di sekitar wilayah hutan, hampir ada 9.247 orang yang bekerja di sektor wisata ini dengan nilai keekonomian bagi masyarakat 400 miliar. Ini kami *share*, Pak, bahwa kami mengelola wisata itu bekerja sama dengan masyarakat sekitar hutan. Jadi, ada yang bagian dari teman-teman masyarakat sekitar Desa Hutan.

Kemudian, dua *slide* terakhir, ini terkait dengan kontribusi finansial kepada negara. Ibu/Bapak sekalian, kami sampaikan, secara rata-rata 5 tahun Perum Perhutani, ini hampir setiap tahun kami berkontribusi, baik penerimaan negara bukan pajak maupun pajak, sebesar 814 miliar. Ini terdiri dari PNBP dan pajak. Di PNBP sendiri ada unsur dividen, Pak. Kami di tahun lalu termasuk penyumbang dividen juga, meskipun tidak besar, 100 miliar kami setorkan *divide,n* atas laba tahun 2022.

Kemudian, *multiplier effect* kelola sosial. Ini sebagai perwujudan misi kami, peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Dalam menjalankan proses bisnis, Perum Perhutani terus memberdayakan tenaga kerja masyarakat Desa Hutan. Serapan tenaga kerja hampir 925.000 orang dan jumlah desa yang ada di sekitar hutan, itu ada 5.485 desa dan masing-masing desa rata-rata membuat satu organisasi lembaga masyarakat Desa Hutan. Sehingga, total jumlah lembaga masyarakat Desa Hutan ada 5.395, dan jumlah anggota LMDH ini hampir 1 juta orang.

Yang terakhir, Pak Pimpinan, Ibu/Bapak sekalian, kami sampaikan tentang rencana kerja korporasi di 5 tahun mendatang. Karena kami *mandatori* dari Kementerian BUMN harus menyusun RJPP 2025-2029. Ada beberapa *mandatori*, bahwa kami harus mensinkronkan tentang 8 agenda perubahan. Lima prioritasnya Kementerian BUMN dan prioritas-prioritas dari Perhutani sendiri. Di mana secara ringkas perlu kami sampaikan, Pak Pimpinan, Ibu/Bapak sekalian, bahwa sampai dengan akhir periode 2029 nanti, kami mentargetkan beberapa target-target kuantitatif, mulai dari *revenue* yang 6,5 triliun, kemudian pertumbuhan CAGR-nya itu 7,9% dengan *net profit* 855 miliar atau *net profit* marginnya 11,8%.

Kami juga akan memberdayakan anak-anak perusahaan, sehingga di akhir tahun 2029 nanti rencana kami, kontribusi anak ini sudah cukup dominan 33%, dengan total *capex*-nya 3,6 triliun dan *revenue* dari *green business* portofolio mencapai 3,7%.

Demikian, Pak Pimpinan, Ibu/Bapak sekalian, yang bisa kami sampaikan. Tentunya, kami mohon arahan dan dukungan dari Komisi VI, supaya Perum Perhutani ini sebagai salah satu Perum yang mungkin sudah *enggak* banyak lagi bentuknya, dan untuk bisa tetap *eksis* dan berkontribusi kepada negara.



Demikian dapat kami sampaikan, Pak Pimpinan.

Terima kasih, kami kembalikan ke Bapak.

*Wabilahitaufik walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih kepada Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (*Holding*) dan Direktur Utama Perum Perhutani yang telah menyampaikan penjelasannya.

Selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada kawan-kawan Anggota Komisi VI untuk menyampaikan tanggapan maupun masukan terhadap penjelasan yang telah disampaikan oleh mitra kerja kita hari ini. Yang terdaftar, sebelah kanan, Pak Andre Rosiade, Pak Rudi, Pak Subardi, Bu Rieke. Sebelah kiri, Pak Herman Khaeron, dan Pak Muslim.

Kami persilakan Pak Andre Rosiade.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Baik.

**Mas Bimo, Pimpinan kami yang saya hormati, terima kasih atas waktu dan kesempatannya,
Teman-teman Anggota Komisi VI, lalu
Pak Ghani dan jajaran, dan juga
Pak Wahyu dengan jajaran,**

Untuk Pak Wahyu, saya rasa tidak perlu banyak yang saya *tanggapin* ya, karena memang sudah *on the track* ya, apalagi pengalaman Pak Wahyu mantan Deputy Kementerian BUMN ya. Sudah panjang kali lebar kali tinggi, ya. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan, Pak, program-program yang disampaikan. Itu untuk Perhutani.

Untuk PTPN. Berarti Pak Ghani ini dipanggil sekarang PTPN (*Holding*) ya, Pak? *Eenggak* ada lagi PTPN III berarti, ya?

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Secara legal.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):



Masih ada? Oh, tapi lebih baik dipanggil Direktur Utama PTPN Perkebunan, *gitu*. Baik, Pak, jadi, Pak Ghani, ada berapa hal yang saya ingin tanggap, tolong direspons saja. Pertama, tadi *kan* soal *problem* sawit, ya. Bagaimana kita ke depan, Bapak ingin meningkatkan, apa namanya, jadi 750 hektar, sehingga program pemerintah Pak Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, B100 ini bisa terlaksana? Saya rasa, ini perlu kita dukung.

Yang kedua, juga saya melihat bahwa Pak Ghani sangat optimis, bahwa kita bisa swasembada gula dengan teori tadi, bahwa kita bisa meningkatkan produksi gula dari 4 ton sampai 8 ton, minimal. Bahkan Pak ya Ghani meyakini bisa 10 ton. Nah, setahu saya, Pak, kita itu eks, impor gula itu 3,5 juta ton setahun ya, Pak. Betul ya, Pak? Sekarang ini produksi gula kita dalam negeri itu sekitar 1,1 atau 1,5 juta ton, Pak?

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Dua koma empat.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Dua koma empat. Di luar 2,4 kita masih impor 3,5 juta ton. Betul, Pak? Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak, kalau seandainya kita bisa 8 juta ton, otomatis seluruh kebutuhan dalam negeri bisa kita terpenuhi. Betul, Pak, itu tanpa perlu ekstensifikasi? Cukup intensifikasi?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Konsumsi, ya?

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Hah?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Konsumsi?

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Untuk konsumsi ya, mas?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Gula-gula konsumsi.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Jadi, sehingga itu cukup dengan lahan Bapak yang ada.



**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Jadi, di Indonesia, Pak.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ya.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Ada 500.000 hektar lahan.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Oke.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Kalau kali 8 kan 4, 4 juta ton.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Oke.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Kebutuhan konsumsi itu cuma 3,2.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Oke.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Jadi, cukup untuk konsumsi. Nah, untuk, apa, industri makanan/minuman, perlu perluasan. Nah, itu salah satu mungkin Program *Food Estate*, kebetulan kami ingin laporkan ke Bapak/Ibu Komisi VI, kami sudah merintis *piloting* di Merauke, Pak.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Oke.



**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Orang katakan, katanya di Merauke *enggak* cocok tebu, tapi kami sudah sampai 5 bulan, tebu itu bagus.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Oke.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Di sana, cuma ada isu-isu lain tentu hal yang lain nanti.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Kita.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Makasih.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Saya mau masuk ke Merauke itu, Pak. *Nyalain aja* itu. Di Merauke itu, yang saya dengar sekarang, bukan hanya PTPN saja yang mulai *nanam* sawit.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Ya.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Eh, *nanam*, *nanam* apa? *Nanam* tebu, tapi juga perusahaan swasta.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Dan produksinya juga bagus katanya. Yang kedua, saya juga dengar sawit pun hasil produksinya lebih bagus, bahkan yang saya dengar dari salah

satu pengusaha sawit nasional, Pak, itu produksi sawit di Merauke itu, dua kali lipat produktivitasnya dibandingkan sawit yang ada di Kalimantan.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Satu.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Itu.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Setengah kali lipat, iya.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Katanya dua kali lipat. Informasi yang saya dapatkan hari Minggu lalu, Pak. Nah, ini mohon mungkin, bahkan juga pemerintah, Mas Bimo, saya sampaikan informasi, bahwa salah satu program Pak Prabowo ya, untuk bisa berswasembada beras ke depan, itu salah satunya kita akan menanam padi di Merauke. Nah, sehingga harapan saya, Pak, tolong dipertimbangkan juga peningkatan selain gula, sawit juga bisa dipertimbangkan di Merauke, karena beras pun nanti, sawah akan dicetak banyak di Merauke.

Sehingga, ke depan ya, saya berharap sebagai Fraksi Partai Gerindra, Pak, partai pendukung Presiden Prabowo dan Mas Gibran di 2024-2029 ini, kita berharap PTPN sebagai BUMN dan bisa mendukung pemerintah ke depan melaksanakan janji-janji kampanyenya. Jadi, tidak sebatas narasi atau *omon-omon* saat kampanye, Pak. Dan saya meyakini sebagai partai pendukung Pak Prabowo, bahwa janji Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa diwujudkan. Swasembada beras, swasembada gula, dan juga biodiesel ini bisa menuju B100.

Nah, mohon dukungannya dan mohon sekali lagi Bapak tinjau kembali Merauke ini, karena lahannya bagus, sangat luas, sangat kondusif. Mudah-mudahan, dengan sawah ya, cetak sawah baru di sana, gula, sawit, ekonomi masyarakat di Papua pun meningkat. Ya, harapannya seperti itu. Mohon itu dipelajari, Pak.

Lalu, yang kedua, soal sawit rakyat tadi. Itu menarik, Pak. Sawit rakyat ini, Mas Bimo, menurut saya ini sangat menarik, bahwa PTPN kalau bisa berinisiatif, apalagi kan ekosistemnya sudah dibangun oleh Kementerian Pertanian dan BPDPKS. Nah, saya rasa, Pak, ini peran BUMN, Pak, bukan hanya mencari untung, tapi membantu masyarakat.

Nah, harapan saya, Pak Tani, eh, Pak Ghani, bisa berikan target yang jelas, berapa puluh ribu hektar per tahun, Pak. Dan nanti dilaporkan kepada kami secara berkala, ya. Misalnya di kampungnya abang-abang saya ini, yang Nasdem ini *kan*, pasti itu kendalanya beliau ini, calon Bupati ini, bahwa bagaimana *replanting* ini bisa. Dan kami misalnya, Pak, di Sumatera Barat, kami *kan* ada PTP VI ya, mungkin Bapak bisa bantu juga di Sumatera Barat, petani-petani sawit di Sumatera Barat yang kesulitan untuk *replanting*, khususnya di Dharmasraya ya, lalu di Pasaman ya, di Dapilnya Bu Nevi itu, di Pasaman Barat, Pasaman, lalu di Dapil saya di Dharmasraya, itu *kan* banyak sekali sekarang sawit-sawit tua, Pak.

Nah, tolong ini menjadi catatan, Pak. Ini aspirasi daerah, Pak. Program ini juga di-*announce* ke PTP VI, *gitu loh*. Karena dari tadi PTP VI *nih* kurang dilirik-lirik itu, karena Dirut PalmCo-nya *kan* di PTP V *tuh*, Pak Jatmiko *gitu loh*. Ya, memang sawit ini memang primadonanya di Sumatera Utara dengan Riau.

Nah, tapi tolong Sumbar jangan dilupakan. Dapilnya Bu Nevi itu di Pasaman, Dapil saya di Dharmasraya. Karena petaninya butuh, Pak, mereka kesulitan *replanting* sekarang, karena betul yang Bapak sampaikan tadi, rata-rata kalau di Dharmasraya itu trans, Pak, yang *megang* sawit itu. Teman-teman yang puluhan tahun dari tahun 80-an awal transmigrasi, programnya Presiden Soeharto, itu kesulitan. Dan itu pemilihnya saya, Pak, pemilihnya Andre Rosiade. Pak Prabowo menang di Kabupaten Dharmasraya itu, Pak. Nah, dan kewajiban saya untuk memperjuangkan itu, *gitu loh*. Nah, itu bang, kita harus memperjuangkan rakyat, jangan *omon-omon aja* pas pemilu, kasih janji palsu, habis itu kita lupa sama rakyat, *gitu loh*. Nah, jadi ini tolong.

Lalu, tebu tadi menarik *tuh* soal KUR tadi, Pak. Saya rasa, Pak Ghani sudah urus itu. Permenkonya sudah keluar, tinggal kita kawal saja. Mungkin, Mas Bimo nanti kita dorong Pak Menteri BUMN melalui Himbara, memastikan program Permenko yang sudah terbit itu bahwa KUR itu tidak hanya 500 juta, bisa meningkat untuk petani tebu, itu bisa kita kawal, sehingga target-target pemerintah 2024-2029, kita bisa swasembada beras, swasembada gula, dan B100 bisa kita wujudkan.

Sekali lagi, terima kasih Pak Ghani, Pak Wahyu. Tingkatkan kinerja, *Insyah Allah* kita kawal bersama-sama keberlanjutan dari pemerintah Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Masuk *tuh* barang.



Terima kasih, Pak Andre. Gubernur, Menteri atau Pimpinan Komisi VI? *Gimana*, kita lanjutkan Andre dulu, *enggak* ini?

Kami persilakan Pak Herman Khaeron.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ini baru calon Menteri *nih*. Ayo, Pak Menteri, mainkan.

F-PD (Dr. Ir. H. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Pasrah, pasrah.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan, dan
Seluruh Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Saudara Direktur Utama PTPN III (*Holding*) beserta seluruh jajaran
Direksi dan Staf yang hadir,
Saudara Direktur Utama Perum Perhutani beserta seluruh Direksi dan
jajarannya,**

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Pertama, tentu saya memberikan apresiasi ke, atas kerja keras dan hasil-hasil yang dicapai, baik oleh Direksi PTPN III maupun Perum Perhutani. Namun, satu hal yang harus diwaspadai, bahwa kalau melihat dari penghasilan, EBITDA, maupun *net income*, kita akan melihat bahwa ada tren penurunan di 2023. Dan saya meyakini bahwa tren penurunan ini terjadi karena harga komoditas internasional. Sehingga, bisnis di sektor perkebunan dan kehutanan ini sangat tergantung terhadap harga komoditas internasional. Khawatirnya bahwa ke depan, harga semakin turun, semakin kompetitif, produknya semakin kompetitif, malah kemudian harga semakin turun. Dan saya yakini 2024, meskipun diproyeksikan lebih tinggi, kalau ini terjadi, maka laporan keuangan tahun 2024 nanti, itu akan trennya menurun. Oleh karena itu, memang harus dilakukan inovasi.

Ke Pak Ghani, PTPN memiliki luas areal hutan, areal tanahnya 1,2 juta kurang lebih. Jadi, 1 juta 180 sekian, 1,2 juta *lah*. Dan baru dimanfaatkan secara ekonomis, itu baru sekitar 800.000 hektar. Masih tersisa, dan tentu di dalamnya bukan masalah tersisa luas lahan yang ini bisa dikembangkan, tetapi menurut saya ini sangat tergantung juga dengan situasi sosial ekonomi masyarakat. Karena bagaimanapun, di mana-mana terjadi okupasi, dan ini harus diselesaikan dengan baik dengan masyarakat.

Tadi, berbicara persoalan gula. Saya ingin juga meluruskan, karena bagaimanapun tidak bisa dipisahkan antara gula konsumsi dan gula untuk industri. Ini *enggak* bisa dipisahkan. Kebutuhannya cukup besar, bahkan



kalau hanya berbicara gula konsumsi *kan* hanya, kita butuhnya 3,2 juta kebutuhannya, dan impor kita masih 2,2 juta, impornya. Nah, selebihnya tentu dipenuhi oleh kebutuhan dalam negeri.

Dulu, kami ingin memperluas lahan areal tebu 500.000 hektar saja, sulitnya minta ampun. Jadi, memang tidak mudah, meskipun kalau menghitung terhadap jumlah area yang dimiliki oleh PTPN, masih sekitar ada 500.000 hektar, tetapi ini menurut saya tidak mudah juga, *gitu*. *Kan* semuanya juga sangat bergantung kepada lahan produktif. Apakah di sana tersedia airnya, tersedia infrastrukturnya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, yang harus segera dilakukan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas, baik di tanaman-tanaman yang ini langsung dikelola oleh PTPN maupun yang dikelola oleh kemitraan dengan masyarakat.

Nah, yang saya ingin tanyakan satu, Pak, ini *kan* PTPN juga sekarang dengan aturan yang ada, boleh untuk memberikan areal pertambangan. Ini *enggak* pernah muncul *nih* dalam presentasinya Pak Ghani, seberapa luas dan seberapa banyak, seberapa, ada beberapa kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang menggali pertambangan di lahannya PTPN.

Saya ingin, kalau memang bisa terbuka, silakan terbuka di sini, tapi kalau memang cukup tertulis, ya tertulis saja. Artinya bahwa kita *explore* dari kemampuan PTPN saat ini pada jenis tanaman, tetapi sesungguhnya ada bisnis-bisnis lain yang ini tidak *ter-explore*. Bahkan, kalau melihat sekarang di areal perkebunan teh, di daerah-daerah yang itu premium, itu saya melihat sebagian besar justru swasta yang memanfaatkan.

Kenapa kemudian PTPN tidak berinvestasi? Kita juga Komisi VI, pernah Pak Bimo melakukan kunjungan kerja, misalkan ke daerah Cipanas, yang sebagian areanya adalah memang ada irisan, ada milik PTPN, ada milik Perhutani, tapi sebagian besar bahwa itu *di-explore* atau dieksploitasi oleh swasta, *gitu*.

Nah, kenapa PTPN sendiri tidak bisa membuat sesuatu yang tentu ini bagian daripada inovasi korporasi, membangun sebuah kawasan yang nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harus menanam teh, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harus menanam kelapa sawit, misalkan. Karena apa? Itu menjadi destinasi yang luar biasa, daya minatnya tinggi, nilai ekonomisnya tinggi, dan kita bisa menjual berbagai produk yang dihasilkan juga dari PTPN, *gitu*.

Saya juga *appreciate lah*, terhadap Pak Ghani yang saya lihat kesungguhan untuk bisa membangun PTPN ini, dengan membangun, misalkan, restoran di Bandung, di daerah yang sangat strategis, yang dulu tidak pernah dilihat. Dulu hanya mereknya Walini saja di sana, tapi sekarang sudah bisa menghasilkan *steak* yang enak, *steak* yang, apa namanya, yang ya cara penyajian yang lebih modern, pelayanan yang lebih baik. Tentu ini bisa dikembangkan di tempat-tempat lain.

Oleh karenanya, menurut saya, PTPN juga tidak terpaku kepada persoalan hanya berbicara persoalan gula, persoalan PalmCo, *palm oil*, berbicara persoalan hilirisasi minyak, *gitu* ya, kemudian berbicara persoalan komoditas karet, dan lain sebagainya. Tidak di situ, menurut saya. Ini harus ada inovasi yang *out of the box*, yang ada hubungannya dengan bisnis utamanya dari PTPN.

Nah, ini kalau ini ada, ah, berarti masa depan PTPN cerah. *Tapi* kalau Bapak masih *berkutit* dengan persoalan tebu, persoalan dengan sawit, persoalan dengan ini, ini menurut saya, pada suatu saat nanti akan sangat dipengaruhi oleh harga internasional. Dan produktivitas itu ada batas waktunya. Sehingga, ketika kemudian sampai kepada produktivitas yang, yang sudah pada titik jenuh, yang sudah waktunya harus diremajakan, uangnya tidak ada. Seperti tadi, sawit produktivitasnya masih rendah, kemudian tebu juga rendemennya ya begitu-begitu *aja*, tidak bisa melompat tinggi. Ya, pada akhirnya, kita sangat bergantung kepada dana, dana BPDPKS pun, yang saya turut membidani lahirnya BPDPKS, Pak Wahyu tahulah, ya. Dan, pada akhirnya juga hanya 10% diserap pada peremajaan. Ya, ini menurut saya, akan sampai tahun kapan ini berbicara persoalan ini? *Kan* mestinya sudah selesai *gitu*. Butuh 30 triliun, ya ada *dong* 30 triliun hari ini semestinya. Toh, BPDPKS *kan* sudah 100 lebih dana kutipnya, kenapa 30 triliun *aja* susah, *gitu*.

Oleh karena itu, saya usul, Pak Bimo, mungkin ke depan kita undang juga BPDPKS di sini, karena ada relevansinya dengan pengembangan sawit, baik di PTPN maupun di plasma lainnya, *gitu*. Karena PTPN *kan* punya plasma 500.000 hektar juga. Nah, sehingga ini menurut saya bisa dikembangkan ke depan, dan kita bisa kunci di sini. "Anda, BPDPKS dulu lahir karena untuk meremajakan, untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat". Nah, ini ada *nih* 500.000 *nih* yang punya PTPN atau kita bisa perluas lagi plasmanya, kalau memang BPDPKS mau memberikan modal, *kan* begitu harusnya. Nah, ini menurut saya ke depan bisa kita lakukan.

Selain itu, menurut saya, PTPN juga harus sekarang sudah memulai tapal batas, Pak, ya, supaya jelas, *gitu*, pengelolaan. Karena kalau PTPN *kan* basisnya adalah HGU, *gitu*, beda dengan Perhutani. Perhutani itu adalah perusahaan milik Kehutanan, yang dibuat atas batas-batas kehutanan. Dia bisa dilebarkan, bisa dikecilkan kapan pun oleh Kehutanan, *gitu*. *Tapi*, kalau Pak Ghani *kan* sudah di luar kawasan kehutanan, karena sudah dalam bentuk HGU. Ini yang menurut saya harus lebih inovatif, lebih agresif mengembangkan korporasinya.

Oleh karena itu, harus ada keputusan-keputusan politik yang tepat menurut saya untuk PTPN. Dan *appreciate lah*, kalau dulu utangnya 42 triliun, sekarang tinggal 30 triliun, luar biasa. Pak Ghani *enggak* usah diganti dulu, di situ terus sampai lunas hutang, *gitu* ya, sampai lunas hutang, Pak. Karena kalau nanti Pak Ghani diganti atau dipindahkan, dipromosikan ke BUMN lain karena prestasinya cukup baik di PTPN ini, nanti PTPN dipimpin oleh kelasnya yang mundur lagi, *kan* sayang, *gitu*.



Jadi, saya mengusulkan, Pak Andre *enggak* ada, kepada Pak Khilmi.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Siap, siap.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Menurut saya ini harus dilanjutkanlah, ya.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Siap.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Sampai kepada hutang paling tidak tinggal 20 triliun *lah*. Kalau hutang tinggal 20 triliun, itu mungkin lebih ringan nanti melunasi ke depan.

Ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, Perhutani menurut saya memang, dikasih kepala, tapi buntutnya dipegang. Dikasih tangannya untuk bergerak, kakinya dipegang, *gitu*. Jadi, memang *enggak* bisa leluasa di bisnis Perhutani. Dan saya lihat, memang saat ini hanya tergantung kepada penebangan kayu, *gitu*. Penebangan kayu, dan berbicara persoalan penebangan kayu *kan* sudah juga pada titik jenuh. Mungkin sekarang produk-produk yang berbasiskan nonkayu itu lebih berkembang dibandingkan dengan kayu. Nah, sehingga juga Perhutani menurut saya juga larinya harus kepada hal yang lebih atraktif *lah*, yang lebih *out of the box* juga. Yang penting *kan*, Perhutani tidak merusak kawasan dari kewajiban untuk mempertahankan tanaman keras, *kan* begitu.

Nah, satu hal yang tadi saya agak miris sebetulnya, terkait dengan pengembangan energi baru terbarukan biomassa, *gitu*. Ini *kan* biomassa ini *kan* lahir dari James Watt tahun 1700-an, menemukan ketel uap, *gitu* ya, yang basisnya *kan* dengan pemanasan kayu, *gitu*. Jadi, kalau hari ini dibicarakan biomassa sebagai proses inovasi, ketinggalan. Ini hanya reinkarnasi dari tahun 1700-an. Bahkan, kalau berbicara biomassa ini bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik, itu *kan* 1800-an Thomas Alva Edison juga melahirkan dari energi yang sama, dengan basis ketel uap. Jadi, Bapak, menurut saya, terlalu, terlalu jauh ini mundur ke belakangnya, *gitu*.

Justru kalau mau maju ke depan, *kan* kawasan-kawasan kehutanan rata-rata sekarang memiliki potensi, misalkan dengan geotermal. Ya, Perhutani harus punya kawasan geotermal, Pak, *gitu*. Memang, memang lini bisnisnya adalah listrik di situ, sebagai pembangkit listrik, sebagai energi primer bisnisnya. Bapak melahirkan bisnis energi primer di kawasan Perhutani, Bapak juga bisa melahirkan kawasan-kawasan yang berbasiskan pariwisata.



Jadi, menurut saya, tidak harus juga terpaku kepada, kepada kayu, *gitu* ya. Justru pengembangan-kembangan di luar kayu itulah yang harus dikembangkan. Rotan sekarang hidup kembali *loh*, Pak, *gitu* ya. Maka itu, rotan coba dihidupkan kembali, di mana rotan harus menjadi lini bisnis utama ke depan. Kayaknya *enggak* terlalu susah kok *nanam* rotan. Dulu rotan itu adalah pohon yang begitu saja tumbuh, bisa tumbuh sendiri, dibiarkan saja tumbuh. Apalagi kalau kita tanam dan kita rawat, pasti lebih baik. Perusahaannya di Cirebon sudah mulai tumbuh sekarang, Pak, yang dulu sempat mati, sekarang tumbuh kembali rotan. Oleh karenanya, kalau memang pengembangannya ke arah-arrah yang lebih bernilai ekonomis, menurut saya Perhutani juga akan tidak terbelenggu oleh, apa namanya, bisnis konvensionalnya, yaitu di bidang kayu.

Nah, yang kedua, pariwisata, Pak. Pariwisata ini menjadi luar biasa. Banyak negara, kalau saya datang, mereka sumber daya alamnya tidak cukup kuat untuk bisa memakmurkan ataupun menjadi sumber pendapatan, tetapi mereka sekarang larinya kepada pariwisata, *gitu* ya. Semua sekarang pariwisata menjadi andalan, karena di situ *cash and carry*. Orang datang, berbondong-bondong, keluar uang, masuk uang, dan uang itu bisa menjadi sumber pendapatan.

Jadi, wilayah-wilayah ataupun kawasan kehutanan yang ini memiliki keunggulan seperti Tangkuban Perahu, jangan dilepas. Dulu punya Perhutani, jangan dilepas, Pak. Paling tidak paruh-paruh *lah*, 50-50 *gitu*. *setong-setong* kata orang Madura. Ini kalau dilepas, ya habislah situ, tidak punya pendapatan di situ. Perhutani hanya punya di sekeliling-sekeliling sananya. Dapat kompensasi atas kunjungan-kunjungan di sekitar, ya tidak besar *lah*, kecil sekali. Dulu Kawah Putih juga begitu. Saya waktu Pimpinan Komisi IV, tolong kembangkan Kawah Putih. Dikembangkan, sekarang bagus. Akhirnya, Jawa Barat bisa tumbuh, bisa untung dari Kawah Putih, *gitu*.

Nah, Situ Patenggang, bisa kerja sama dengan PTPN. Ada *enggak* kerja sama sekarang dengan PTPN? Menurut saya *enggak* itu. Coba sekarang kerja samakan, Pak. Jangan swasta tumbuh di sebelah kanannya sana bagus-bagus, tapi yang memiliki kawasan yang sesungguhnya ini menjadi zona pariwisatanya *enggak* pernah tumbuh, yaitu kawasan Perhutannya di kawasan hutan, kawasan PTPN-nya di kawasan danaunya. Ini *kan* bisa, Pak. Coba dibangun di situ bekerja sama, duduk, Pak Ghani dengan Pak Wahyu, duduk. Ayo bicara di situ, cari investor boleh, supaya tidak *menggelantungi* terhadap keuangan internal. Kemudian bagi hasil, *kan* bisa. Masih banyak *lah* menurut saya, kalau mau diceritakan.

Tentu dalam waktu yang terbatas ini, mudah-mudahan ke depan harga komoditas akan tetap baik dan ini akan menjadi modal untuk bisa melakukan akselerasi kegiatan usaha lainnya, bukan hanya pada sektoralnya yang sekarang secara konvensional membelenggu, menurut saya, terhadap usaha di sektor, baik di PTPN maupun di Perhutani.

Jangan kembalilah ke zaman James Watt tahun 1700, Thomas Alva Edison tahun 1800-an menemukan bohlam itu. Dan, bohlam ya. Menurut saya terlalu mundur. Pakai *dong* yang lebih canggih. Sekarang Perhutani, Pak, laporkan. "Mulai tahun depan kami punya kawasan eksplorasi untuk geotermal. Kami akan jual energi primer kepada PLN". Itu *dong*, itu *top* baru. "Kami punya kawasan-kawasan yang ini akan menjadi destinasi wisata dunia, Pak. Ini luar biasa. Kami akan kembangkan". Kalau itu yang dipresentasikan hari ini, tentu ada hal yang baru. Tapi kalau tetap berpaku kepada materi ini, rasanya kita masih yang lama-lama, hanya *me-review* saja dan tentu hanya menunjukkan bahwa "Kami, perusahaan kami hanya bergantung kepada harga komoditas internasional".

Saya kira demikian, Pak Bimo.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Selanjutnya Pak Rudi Hartono Bangun.

F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.AP.):

Makasih, Pimpinan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan, dan
Seluruh rekan Anggota,
Yang saya hormati Pak Dirut PTPN III,
Dirut Perum Perhutani, dan
Direktur-Direktur *Subholding* dan jajaran,**

Pertama, ini untuk Pak Ghani, karena RDP kita ini evaluasi kinerja korporasi, Pak. Jadi sebagai Anggota, harus kita menyampaikan apa-apa saja yang menjadi aspirasi dan masukan.

Pertama, Pak, ini begini, ada beberapa hal yang ingin saya juga minta penjelasan detail dari Pak Ghani dan jajaran, yaitu tentang kinerja *Subholding*, Pak. Karena ada kita PalmCo sekarang ini dan SupportingCo. Dulu, Pak, beberapa bulan lalu, saya ingat, saya ke Pak Erick itu Kementerian BUMN. Pas rapat, saya meminta juga *ngusulkan* langsung, ya kan, ke Pak Erick, rapat BUMN, agar disegerakan realisasi pembentukan PalmCo dan *Supporting* ini *kan*. Jadi, agar segera terbentuk dan *subholding* ini bekerja, *kan gitu*, Pak. Itu yang saya minta kepada Pak Erick waktu itu, pas rapat *gitu*. Dan itu masih ada datanya, Pak, saya pikir, di TV Parlemen.



Nah, yang saat ini, Pak, setelah terbentuk ini *kan*. Saya dan, saya utamanya ya, mungkin teman-teman, belum pernah pun, sekalipun ini, Pak, ya *kan*, mendapat misalnya laporan, paparan atau penjelasan, Pak, *gitu*, tentang bagaimana sebenarnya kinerjanya si PalmCo ini atau *Supporting* ini, *gitu*. Dan dalam teknis pembagian kerja-kerjanya, Pak, yang selama ini *kan* di bawah kendalinya Bapak, *Holding, gitu*.

Jadi kami belum dengar ini, setelah kita minta, "Pak Erick, tolong direalisasikan". Setelah realisasi kami belum tahu, Pak, dibagi ke *Subholding* ini, *nangani* berapa lahan *region* atau PTPN *kan*, si *Supporting* berapa ini, belum kami mendapat detail, Pak. Dan siapa-siapa yang jadi Dirut dan Direksinya, *gitu*, di *Subholding* Bapak ini. Itu, Pak.

Kemudian, saya lagi dapat masukan, Pak, aspirasi *nih*, di internal *lah*. *Eenggak* mungkin saya sebutkan, mungkin di internal PTPN. Jadi, di PalmCo dan *Supporting* ini *kan*, katanya ada indikasi atau dugaan penggemukan akhirnya birokrasi *gitu*, Pak. Nah, ini infonya ya, bisa salah, bisa benar. Bapak nanti tolong jawab.

Dulu, Pak, contohnya di PTPN II, III, IV, V, VI. Di situ dulu, Pak, sebelum dibentuk *sub-sub* ini, ada 2 direktur ya, Pak, ya. Eh, 1 direktur dan ada 4 SPV ya, Pak? Nah, 2 atau 3 SPV. Dan kabagnya hanya tinggal 2 atau 3 ya, Pak, ya? Kabagnya, *gitu*. Jadi, *tapi* sekarang di *Subholding* ini *kan*, sudah ada *subholding* dan 2 *subholding* ini ada 1 dirut, 6 atau 7 direksi, Pak, *gitu kan ini kan*.

Dan lalu di wilayahnya, di *region*-nya lagi, *region*-nya di PTPN I sampai VI tadi, Pak, sampai XIII, ada kepala *region*, terus ada *SEVP*, dibanyakin *kan*, Pak, lebih dari 4 sekarang, Pak, *gitu*. Ada kepala *region* yang menggantikan Direksi tadi dan Kabagnya juga *kan* tetap banyak. Itu informasi yang dari internal. Artinya, apa? Apakah ini birokrasinya makin gemuk dan panjang? *Gitu. Kan* dulu niat kita itu *kan* kita cerita supaya lebih *fast*, lebih cepat ya, Pak, ya. Nah, ini yang ingin saya butuh penjelasan Pak Ghani tentang kinerja-kinerja sekarang ini, *gitu*.

Kemudian, Pak, ada juga ini *kan*, laba *subholding*, laba *holding* yang Bapak sampaikan 2023 ini *kan* mencapai 5,51 T, ya *kan*, Pak. Artinya, ini paling tinggi dalam tahun-tahun dari '90, '80, sekaranglah sejarah yang paling tinggi di tangan Pak Ghani, *gitu*. Dan ini ya, seperti Pak, apa tadi, Herman, kita beri apresiasi apa adanya, berarti Pak Ghani dan jajaran bekerja maksimal, *gitu*.

Dan juga, Pak, ini juga harus dijelaskan, setelah mendapat laba setinggi ini, ya *kan*, ini dari *region* atau *subholding* mana saja, Pak? *Gitu*. Agar kita di DPR RI ini paham, mana PTPN atau *region* namanya sekarang, yang maksimal bekerja, Pak, dan mana yang minim, Pak. Minim itu artinya hanya, ya maaf cakap, menggerogoti dan hanya minta di subsidi terus, Pak, *gitu*. Jadi akhirnya, dialah yang menggerus keuntungan laba PTPN.



Dan yang ketiga, Pak, ini *kan* kinerja, ini masukan lagi, Pak, aspirasi kre. Ada kinerja keuangan di PTPN *Group* ini, setelah ada *subholding*, Pak. Ini bagaimana sebenarnya, Pak Ghani, *gitu*. Pak Ghani atau *subholding* ini, Pak Jatmiko ya, Pak. Lalu, *subholding* satu lagi, Pak, siapa, Pak? *Hah?* Pak Teddy, *gitu*.

Nah, jadi apakah birokrasinya ini makin panjang, Pak? Karena katanya begini, Pak, semua urusan sekarang harus *nunggu* tanda tangan persetujuan *subholding*. Ini saya dapat kabar beberapa waktu lalu. Dan dari katanya, katanya ini, Pak, nanti Bapak yang jawab. Dari awal tanggal 1 bulan, tahun lalu, sampai 6 bulan 7 ini, bulan 6, di keuangan *region-region* itu agak macet atau sendat, Pak, untuk operasi atau bayar-bayar vendor. Nah, ini apakah benar atau kabar burung? Nah, ini yang ingin saya, jawaban dari Bapak, karena ini aspirasi dari bawah, *gitu*.

Dan yang keempat, Pak, tadi *kan* juga disampaikan tentang perluasan lahan, Pak. Bapak sampaikan akan memperluas lahan kebun kelapa sawit dengan cara konversi. Nah, jadi ingin saya tanya ini, kira-kira kita lahan ini *kan* makin sempit, Pak, ini yang mau dikonversi apakah si tebu kita yang di Jawa dikonversi ke sawit atau lahan karet? Nah, ini harus jelas. Dan di mana lokasi-lokasi lahan yang mau dikonversi ini, Pak? *Gitu*. Ini harus kita detailkan di sini, Pak, supaya ada kejelasan.

Dan yang kelima, Pak, tadi penyampaian tentang BPDPKS, saya setuju, Pak. Yang Bapak sampaikan ada uang *levy* itu, Pak, ya. Yang atau uang apa, kalau bahasa, biasanya uang kutipan *lah*, kutipan setiap petani sawit, termasuk kami *lah*, Pak. Nah, itu apakah, Pak Ghani *lah* yang mewakili 500.000 misalnya hektar petani sawit negara. Petani, maksudnya kebun negara. Itu selama ini, apakah tidak dibuat perjanjian atau *agreement* antara BPDPKS dengan PTPN *Group*, Pak? *Gitu*. Misalnya, setelah kami dikutip, nanti akan dipakai anggaran kutipan ini ke mana, *gitu*, Pak. Apakah *enggak* ada *agreement* kita, Pak? Karena *kan* Bapak paling luas *tuh* mengelola 500.000 dan kutipannya, nilainya Bapak hitung sendiri, *gitu*. Dan BPDPKS ini, dulu pernah saya di XI juga, dia paparkan itu, puluhan triliun dikelola dia, Pak. Dan waktu mereka paparkan itu, Pak Edi namanya itu, mereka juga belum fokus ke PSR itu, Pak. Mereka masih membeli minyak bio-bio itu, Pak, *gitu*. Jadi, ke pembesar-pembesar juga aliran uang kutipan petani sawit itu, Pak, *gitu*. Jadi, bukan ke sawit rakyat.

Dan belakangan inilah setelah banyak kritikan, ke mana uang BPDPKS, ke mana diarahkan, mulailah, Pak, saya lihat ke Jambi, ke Sumatera Utara, ke Padang, dan lain tempat. Dan ini saya minta, Pak Ghani juga harus memberikan suara, karena memang di PTPN yang paling besar, selain punya swasta, Pak. Karena puluhan triliun ya, Pak, uangnya *gitu*. Ini harus jelas *agreement*-nya saya sarankan, karena untuk kebutuhan PSR ini memang besar, Pak, *gitu*. Rakyat ini hanya butuh ke mana selama ini dikutip *gitu*, Pak. Itu ya masukan dari kami-kami selaku petani sawit, Pak, *gitu*. Itu

gambaran, Pak Ghani dan jajaran, dari masukan saya ke PTPN (*Holding*), *gitu*.

Kemudian, ini ke Perhutani atau Inhutani ini ya. Saya, mana yang jelas ini mohon dikoreksi. Saya ini hanya sedikit, Pak, Pak Wahyu, apa namanya. Saya ingin mendapatkan jawaban detail, Pak, sebenarnya berapa labanya ini untuk tahun 2001 *lah* Bapak, 2002, 2003, di Perhutani ini yang Bapak kelola ini? *Gitu*. Lan, labanya kotor, laba kotor setelah dipakai dikurangkan EBITDA dan lain-lainnya itu, berapa, Pak? *Gitu*. Apakah inu, apakah satu lagi, Pak, Inhutani ini punya hutang ke pihak ketiga? Atau Perhutani ini punya hutang ke pihak ketiga? Dan berapa jumlah hutangnya, Pak, saat ini? *Gitu*.

Dan yang berikutnya, Inhutani ini disampaikan punya lahan strategis, Pak. Tadi Bapak bilang jutaan hektar, 1 juta koma. Nah, yang saya ingin tanya ini, di mana letaknya sekarang, Pak? Di provinsi, kabupatennya, di mana saja, *gitu*. Dan seandainya begini, Pak, seandainya Bapak punya *hutang*, si Perhutani ini, kalaulah dijual tanahnya karena nilainya sudah strategis, apakah dapat *menutupin* hutang Perhutani atau Inhutani itu? *Gitu*. Karena Bapak secara aset mungkin kaya, *gitu*. Bapak mengelola banyak jutaan hektar, *gitu*.

Dan yang terakhir, Pak. Begini, kalaulah sebagai BUMN, Pak, Bapak kelola ini tidak ada laba, Pak. Devidennya Bapak bilang 100 miliar ya, betul ya, Pak, ya? *Cuma* bisa ke negara ya, 100 miliar? Untuk rakyat, untuk negara, *gitu*. Dengan aset yang puluhan atau ratusan triliun, *gitu kan*. Ini *kan* kalau baiknya ini, sebenarnya apa *enggak* layak kita, Pimpinan, usulkan proses dulu di PPA, di yang sakit diobati dulu, kalau sakit terus kita tutup, *gitu*. Karena untuk apa, Pak? Hanya nanti dikelola jutaan hektar, 100 miliar. Itu *kayaknya* hanya kebun, satu kebun di apa itu, Pak, satu kebun berapa ratus, berapa ribu hektar, *gitu*, per tahun. Hasil kebun itu, Pak, Pak Direktur Utama, Pak Ghani paham itu, *gitu*.

Dan yang lagi tragisnya, Pak, Bapak mau belanja *capex*, mau belanja modal. 3,6 triliun *kan*, Pak? Coba, bagaimana maksudnya belanja mau 3,6, yang diberi negara cuma 100 miliar, Pak? *Gimana* ini maksudnya? Maksudnya, saya belum paham ini pola berpikirnya dan kebijakannya Perhutani, Pak. Pendapatan *enggak* ada, mau main belanja, barang, *project* atau apa pun, 3,6 triliun. Dari mana nanti uangnya, Pak, *gitu*. Apakah Bapak mau jual lahan itu? Nah, ini mohon Bapak berpikir dan jelaskan itu, Pak, *gitu*. Jangan asal-asalan juga kita buat-buat di sini, *gitu*.

Nah, kemudian satu lagi ini, usulan juga untuk, ini selesai, Pak, Pak, untuk Pak, apa, Direktur *Subholding* atau apa, Pak namanya, yang Direktur dulu P6. Ah, ini Pak Jatmiko ya, Pak, ya. Ini dulu pernah juga ada usulan dari masyarakat, ya *kan*. Ya *kan*, para pekerja ataupun vendor. *Tapi* masa, usulan itu, responsnya kurang lancar *lah*, kurang baik, *gitu* ke Pak Jatmiko. Mungkin merasa Bapak penting *kan*, tapi kami ini di bawah, Pak, rakyat biasa.

Jadi, begitulah cara bahasa menyampaikan aspirasi, Bapak harus maklum, Pak. Rakyat itu butuh, ya makan, butuh berjalan mereka, ya. Jadi, itu masukan, Pak, semua.

Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Lanjut ke Pak Muslim.

F-PD (MUSLIM, S.H.I., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Dirut PTPN (*Holding*), Pak Ghani beserta seluruh jajarannya, Pak Wahyu Kuncoro, terima kasih, beserta jajaran Perhutani dan Inhutani,

Pertama, ke Pak Ghani selaku Dirut PTPN (*Holding*). Ya, tentu kita bersyukur setelah *holding* ini, saya lihat perkembangannya cukup signifikan, Pak Ghani, baik pun dalam sisi pengelolaan keuangan maupun sisi manajemen.

Pertama memang, saya menyoroti sedikit berkaitan dengan pemberdayaan petani, kaitan dengan swasembada gula ini, Pak Ghani. Tentu, kita tahu betul di beberapa tahun terakhir ini, bicara gula ini *kan*, seolah-olah *enggak* akan habis, dan bahkan pernah mencapai harga hampir 30.000 per kilogram. *Tapi* hari ini, *Insha Allah* sudah stabil.

Artinya apa? Kita tentu berharap, konsep yang disiapkan oleh PTPN III atau PTPN (*Holding*) menyangkut pemberdayaan petani tebu, iya *kan*, dalam rangka meraih swasembada pangan. Tentu dalam hal ini, khususnya swasembada gula, Pak. Kita pada prinsipnya sangat sepakat, Pak. Artinya kita tahu betul di beberapa tahun sebelumnya, bagaimana perkembangan petani gula, Pak, termasuk di Aceh, Pak. Saya ingat betul di Aceh ada Cot Girek begitu besar pabrik gulanya, Sumatera Utara, kemudian di Pulau Jawa juga sama.

Tentu harapan ini memang betul-betul harus diberangi dengan juga dengan regulasi, Pak. Di sini saya melihat ada dalam rangka meningkatkan produktivitas petani tebu, rakyat menjadi 8 ton, Pak, gula per hektar, termasuk saya lihat di sini ada beberapa dukungan dibutuhkan. Saya pikir ini penting,

Pak, baik pun dengan kementerian terkait. Di sini saya lihat semua sudah termaktub. Saya, kita dukung, Pak, sepenuhnya.

Artinya apa? Kalau ini bisa bersinergi, persoalan gula ini saya yakin tidak akan terulang kembali, Pak. Jangan kita hanya bergantung kepada misalnya Gulaku dan lain-lain, ya. Kalau ini betul-betul menyangkut hajat hidup orang banyak, kita berharap PTPN harus menjadi garda terdepan, termasuk juga Perhutani, Pak. Karena Perhutani ini, Pak Wahyu saya lihat juga sudah luar biasa ini, termasuk dalam rangka pengembangan tebu ya, dan biomassa.

Kemudian juga, termasuk juga khususnya dengan *spirit* Perhutani adalah swasembada gula ya, untuk 2028, Pak. Silakan, bagaimana termasuk juga, saya yakin dengan era teknologi hari ini, Pak Ghani, banyak sekali langkah-langkah kita lakukan. Kita bisa melihat dari China, Thailand, maupun Vietnam, ya *kan*. Termasuk juga bagaimana melakukan langkah-langkah terhadap strategi *marketing*-nya, kemudian juga penetapan HAP ya, khususnya berkaitan dengan petani tebu.

Yang kedua, sangat menarik tadi, Pak, berkaitan dengan dana BPDPKS, Pak. Waktu itu saya di Komisi IV sebagai mitra Pak Ghani maupun Pak Wahyu. Kita sepakat betul, Pak, kalau kita lihat hari ini berkaitan dana BPDPKS ini, saya belum dapat gambaran. Mungkin Pak Ghani bisa juga dijawab secara tertulis. Sampai 2024 ini, berapa dana kutipan dari BPDPKS yang dikumpulkan? Seingat saya waktu itu sudah di atas 80 triliun, Pak Ghani.

Namun demikian, mungkin saya ingin menyoroti terhadap dampak terhadap para petani tebu, Pak. Kalau saya lihat tahun 2023 ini ada sekitar 142.000 petani tebu yang ikut PSR, sementara sampai Mei 2024 ada sekitar 150.000. Artinya apa? Kita berharap ini *kan* terus meningkat, Pak. Sementara, penyaluran dana BPDPKS ini *kan* agak tersendat, Pak. Makanya kita berharap hari ini, PSR ini, khususnya binaan PTPN, Pak. Nah, ya *kan*, tentu kita dorong juga nanti BPDPKS, Pak Ketua, untuk segera merealisasi peningkatan yang tadi. Hari ini adalah 30 juta, kita harapkan di, naik di 60 juta. Kita akan *support*, Pak.

Kenapa saya katakan demikian? Karena hari ini, yang menikmati dana BPDPKS kebanyakan para konglomerat, Pak, para perusahaan-perusahaan besar. Saya *ndak* usah sebut, termasuk Sinarmas, Wilmar, dan lain-lain. Sementara, yang jatah petani sedikit sekali, Pak.

Kita berharap, PTPN menjadi garda terdepan, Pak, di sini. Kita tahu betul hari ini cukup luas sekali lahan-lahan petani, mungkin jutaan hektar, Pak, yang tidak tersentuh, Pak. Jadi, kalau kita lihat di sini hanya 150.000, jauh sekali dari harapan. Ini kita minta PTPN menjadi garda terdepan untuk, khususnya berkaitan dengan memperjuangkan. Kita minta realisasi langsung nanti, Pak Ketua, dari peningkatan 30 juta, yaitu per hektar menjadi 60 juta. Mungkin ini khusus berkaitan PTPN.



Yang terakhir, berkaitan Perhutani, Pak. Pak Wahyu, saya lihat di sini halaman keempat, yaitu kinerja operasional dan juga komersial. Saya lihat di sini, di halaman agenda yang pertama adalah saat ini terdapat dua prioritas produksi Perum Perhutani dan menjadi penopang utama pendapatan, yaitu kayu dan getah pinus dengan kontribusi lebih kurang 90% dari total pendapatan per. Artinya apa? Ternyata dari sektor kayu ini paling terbesar, Pak, kayu. Saya ingin dapat gambaran, Pak. Saya ingat betul ini, ketika kayu ini dimaksudkan, kayu apa, Pak? Apakah kayu jati atautkah kayu yang betul-betul masuk areal Perum Perhutani atautkah memang yang ditanam oleh Perum Perhutani? Saya ingat betul dulu *kan* bagaimana besarnya ketika kayu jati, khusus di Pulau Jawa, Pak, saya ingat betul itu zaman Pak Zulhas dulu, orang harus *mengurusin* izin-izin di pemasaran dan lain-lain. Ini bisa digambarkan oleh Pak Wahyu ini, apalagi saya liat di sini, capaian pendapatan di tahun 2003 ada 1,69 triliun. Memang ada penurunan, Pak. Kemudian di, kemudian di DGT-nya ada 1,71 triliun.

Saya ingin dapat gambaran, Pak. Tentu, peran di sini penting, Pak. Di samping kita memotong, tentu kita harus menanam. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga, berapa yang sudah dipotong? Termasuk jati-jati peninggalan Belanda dulu, Pak. Dan sudah ditanam berapa? Jadi, kita tahu betul kebutuhan kayu nanti, pada akhirnya kita tidak harus bergantung pada impor. Padahal kalau kita lihat di sini, negara-negara yang menjadi ekspor, khususnya produk-produk Perhutani kan besar, Pak, termasuk China, dan Italy, Amerika, Jerman, dan lain-lain. Ini mungkin silakan dijawab secara *real*.

Terakhir, Pak Wahyu, berkaitan dengan wisata Perhutani *Group*. Saya sepakat, Pak. Artinya bahwa hari ini ada sekitar 685 lokasi dengan melibatkan 9.247 orang, dengan nilai ekonomi memang masih jauh, Pak, masih 410,3 miliar. Artinya apa? Ini saya berharap juga bisa dikerjasamakan, Pak. Karena saya tahu betul, jutaan hektar punya Perhutani ini, saya pikir banyak sekali langkah-langkah dilakukan untuk menghasilkan pendapatan, khususnya termasuk pendapatan negara, Pak, dari Perhutani.

Yang paling penting melibatkan masyarakat, Pak. Kalau hari ini kita lihat ada 9, ke depan kita harapkan terus melibatkan, bukan hanya, di sini saya lihat ada dari Jawa, Jawa Tengah, Pak, ya? Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. Di luar ini saya kurang tahu, Pak, apakah ada, ada yang lahan Perhutani.

Terakhir, berkaitan getah pinus, Pak. Di sini saya lihat tadi salah satu pendapatan. Saya mungkin pernah sampaikan Pak Wahyu *nih* berkaitan keberadaan pinus-pinus di Aceh, Pak. Ini banyak sekali masyarakat mendatangi kami, Pak. "*Gimana* kami dilibatkan?" Dan kalau *ndak* salah hanya satu perusahaan, Pak, yang di sana diberi peran untuk menampung pinus-pinus, khususnya getah-getah pinus.

Saya berharap, Perhutani tampil *nih*, Pak Ketua. Jadi, masyarakat juga bisa mudah menjual atau terlibat langsung dalam pengelolaan getah-getah

pinus yang ada di Aceh. Ini adalah punya Pak Prabowo dulu, Pak Ketua. Ini sangat luas. Ya, betul, Pak Wahyu, ya? Yang sudah cukup lama ditinggalkan. Ini beberapa hal, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Selanjutnya, Pak Subardi.

F-P.NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan, dan
Segenap Anggota DPR RI Komisi VI,
Pak Ghani, dan
Pak Wahyu sebagai mitra ya, mitra, dari Perhutani maupun PTP dan
seluruh jajarannya yang saya hormati,**

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini ya, Pak Wahyu dulu *lah*. Tadi *kan* selalu Pak Ghani dulu, ini tak coba balik, Pak Wahyu dulu. Hanya satu hal, Pak Wahyu, saya coba ingin minta penjelasan dari Pak Wahyu, soal hilirisasi.

Rupanya, kalau itu dilakukan di Perhutani, sangat menarik, menurut saya, sangat menarik. Karena apa? Perhutani itu dihuni oleh sekitarnya masyarakat-masyarakat yang relatif ya, penghasilannya kurang, ekonominya di bawah. Ketika Perhutani mencanangkan adanya hilirisasi, produk-produk daripada Perhutani yang melibatkan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam arti masyarakat lokal, ya tentu mereka akan mendapatkan nilai tambah dari kehidupan sehari-hariannya. Nah, oleh karena itu, saya belum tahu persis apa yang telah dilakukan hilirisasi itu? Produknya apa? Tolong, Pak, *jelasin*. Mungkin ada satu inovasi-inovasi, sehingga berkembang. Hilirisasi itu betul-betul bisa menyentuh rakyat, untuk masyarakat sekitar. Istilahnya itu menyentuh rakyat hutan. Ya benar, namanya rakyat hutan, ya? Rakyat hutan, masyarakat hutan, bukan rakyat hutan, masyarakat hutan. Itu sangat luar biasa kalau itu dilakukan, ya.

Yang juga itu, soal dulu saya pernah mendengar informasi juga dari Pak Ghani *ndak* salah, kaitannya dengan kerja sama Perhutani. Lahan Perhutani mau dipakai untuk tanam tebu, yang tidak dikelola. Menurut saya *enggak* efektif. Karena apa? Perhutani ini *ditak* oleh zaman Belanda. Orang



Belanda tidak bodoh. Menentukan hutan itu *ndak* mungkin tanahnya subur, tidak ada air dan sebagainya. Kalau itu dilakukan oleh, apa, untuk *nanam* tebu oleh PTP, ya *enggak* bakal hidup. Mungkin infrastrukturnya juga susah, juga lahannya juga *enggak* akan sesuai. Mungkin dari pandangan saya itu. Itu yang khusus untuk Pak Wahyu. Ya, saya kira, ya, optimalisasi *aja* daripada Perhutani, untuk apa? Untuk peningkatan, apa namanya, produk-produk daripada jenis hutan, apa kayu hutan yang lain. *Monggo*, daripada dilakukan sebuah penanaman dengan tebu, tapi mungkin *enggak* akan berhasil ya, mungkin.

Nah, kemudian yang berikutnya ini dengan Pak Ghani, PTP III, PTP (*Holding*). Sekitar tahun 2002 kalau *ndak* salah, waktu itu paparan dari PTP di ruang ini, ya. Saya tertarik, karena Pak Ghani paparnya dengan semangat dan menarik, *gitu*. Salah satunya judulnya adalah yang saya tangkap pada waktu itu, bahwa tahun 2025 akan ada swasembada, akan bisa dilakukan swasembada gula, ya. Ini yang saya ingat dan saya catat juga waktu itu. Paparannya sangat menarik.

Nah, waktu itu akan dibikin *holding*, kemudian juga akan di, tadi *udah* dijelaskan juga ada SugarCo, ada PalmCo, sudah dilakukan dan intinya adanya transformasi soal gula. Waktu itu kalau *ndak* salah pemahaman saya, transformasi tidak hanya sebatas manajemen, tentunya berkaitan dengan lahan, berkaitan dengan pola tanam, dan berkaitan dengan tadi juga disinggung oleh Pak Ghani, soal petani tebu. Di transformasi, ya tidak hanya sebatas manual atau tidak sebatas secara kultur biasanya begini, tapi harus ada satu perubahan ataupun persentuhan daripada teknologi maupun ilmu.

Kemudian, juga *diceritain* zaman Belanda dulu, apa, produksi gula, ya kira-kira 90 tahun yang lalu *lah* itu, ini ceritanya. Itu kita memproduksi gula itu bisa *export* 2 juta. Benar, Pak Ghani, ceritanya? Saya ingat *loh* Pak Ghani ini, masih ingat. Ini yang cerita Pak Ghani sendiri *kan*. Nah, 2 juta, kebutuhan kita 1 juta. Sehingga apa? Sebenarnya kita itu punya kemampuan yang luar biasa, tapi setelah 90 tahun, saat ini, lahan yang ditanam tebu itu dua kali lipatnyanya daripada tahun 2000, tahun waktu Belanda. Tapi kita, mohon maaf, kekurangan.

Nah, dari hasil itu, kemudian kami mencoba menelusuri. Di tahun 2022 itu, eh, 2023, dari data kami yang sekarang *peroleh*, produksinya menurun, ya, produksi gula, karena ada alasan El Niño. Nah, kemudian berkaitan 2024, tadi *udah* dipaparkan, tapi yang perlu ingin saya tanyakan itu, karena target swasembada gula tahun 2025. Yang pertama, sejauh mana realisasi transformasi, transformasi dari *subholding* yang telah terbentuk ini? Tadi, berkaitan dengan lahan, berkaitan transformasi lahan, apa namanya, pola tanamnya ataupun produksi tanamnya. Kemudian termasuk ini, pabriknya, seperti apa? Revitalisasi pabrik itu seperti apa? Karena pabrik-pabrik kita kebanyakan juga peninggalan zaman Belanda, hanya direvisi *lah*, diservis atau apa. Sehingga juga mungkin belum, mungkin itulah dulu yang disampaikan oleh PTP ya kepada kita semuanya.

Nah, kemudian yang berikutnya adalah secara kelembagaannya, ya. Kelembagaannya *udah* dipaparkan, ada SGN, ada PalmCo, dan sebagainya *udah*. Mungkin, tapi seperti apa? Kewenangan yang diberikan seperti apa? Atau jalannya seperti apa?

Nah, sehingga perlu kami mendapatkan informasi, hambatan-hambatan apa yang kemungkinan nanti di 2025 itu tidak mencapai target yang diinginkan? Artinya, swasembada gula ini. Nah, perkembangan tentang, apa namanya, tadi transformasi itu, soal lahan tadi sudah. Mungkin sedikit sudah di, tapi tadi tolong, sudah disampaikan Pak Ghani, tapi tolong *dijelasin*, Pak, lahan itu, tadi juga sedikit sudah disampaikan, tapi mohon *dijelasin*, yang sekarang ada, yang perlu mau masih bisa dikelola berapa, tapi tolong tidak usah dihitung Perhutani *lah*, kasihan Pak Wahyu nanti berkurang lahannya.

Nah itu, sehingga apa? Estimasi swasembada gula itu *real*, konkret. Jangan dianggap nanti Pak Ghani tidak punya *legacy*, artinya hanya di PHP. Nah, kasihan *lah*. Nah, kemudian dulu pernah juga, itu pernah disampaikan, adanya investor yang masuk di dalam SGN. Nah, sekarang bentuknya seperti apa? Apakah inspektur *dah* jalan-jalan? Apakah ada kendala? Revitalisasi pabriknya seperti apa? Hambatannya *gimana*? Nanti mohon dijelaskan, Bapak.

Nah, kemudian soal ini, Pak, adanya rencana riset ya, yang dilakukan di Australia maupun kerja sama Australia dan Brazil. Sejauh mana itu dilakukan? Ketika bicara riset atau bicara pendidikan atau ilmu, saya sangit itu, sangit, sangat ingat betul pada waktu itu, saat masih belum tua seperti ini, Yogyakarta itu ada namanya AGN (Akademi Gula Negara) yang saat, saat ini bangunannya masih utuh, megah, luas lima hektaran di jalur utama. Dulu, pada waktu aku kecil itu jaya itu, namanya AGN. Orang kalau masuk di AGN itu sudah top ya. Berubah LPP ya, sebelah PP. Mungkin, saya *enggak* tahu sekarang untuk apa, ya. Sekarang *enggak* tahu untuk apa.

Nah, kaitannya dengan riset teknologi. Nah, apakah tidak memungkinkan ketika, ya, ketika kita punya keinginan untuk swa, swa, swasembada gula, tempat itu dikerjasamakan dengan sektor pendidikan? Ya, yang itu bisa untuk mendidik, melakukan satu, apa, edukasi, para pelaku-pelaku, ya. Tentunya bukan pelaku petani *diusungin gitu, enggak*.

Ya, artinya *leader-leader* daripada kawasan itu, dididik lagi seperti zamannya AGN dulu. Kalau AGN dulu *kan* yang didik adalah pegawai-pegawai PTP. Nah, sekarang rakyat. Agar apa? Rakyat cinta terhadap *nanam* tebu, merasa untung dengan *nanam* tebu, ya. Bukan berarti *ninggalin* beras, *ndak* mungkin *ninggalin* beras, ya. Tapi *kan* tebu akan lebih untung, karena ada penambahan lahan tadi dan mengefektifkan lahan yang ada. Nah, sehingga ada nilai produktivitas dan lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, mohon nanti, ya bisa dijelaskan. Saya *enggak* tahu, terus-terang, sekarang itu isinya apa di LPP, *enggak* tahu, Pak. Tapi yang jelas tahu saya, karena dekat jejeran sama rumah saya, itu yang LPP Garden. LPP Garden, terus LPP *Convention*, itu dekat, satu RT sama saya. Jadi, hafal persis tamu-tamu itu.

Tamu-tamu tadi, bukan PTP lagi sekarang, umum sekarang, sudah hotel laris lah, gitu kan, ya.

Nah berikutnya, yang terakhir, Pak. Saya sepakat yang disampaikan Pak Ghani tadi. Ketika sektor tebu atau sektor gula ini diberlakukan sama dengan sawit, kalau sawit ada satu subsidi daripada, apa namanya, apa tadi ya. Nah, kalau gula ya, itu importir gula. Importir gula agar bisa bersaing. Maka, ditarik *fee* atau diminta *fee*, bukan untuk masuk kantong, yang mungkin seperti sekarang mungkin loh ya, mungkin. Tetapi untuk ini, apa, intensif. Apakah petani atau pendidikan, apakah itu riset, dan tentunya itu memerlukan payung hukum, ya. *Ndak* mungkin dilakukan oleh PTP, tapi adalah suatu perpres atau apalah itu. Itu sangat luar biasa menurut saya. Sehingga apa? Perkembangan, peningkatan impor itu akan diikuti dengan tanggung jawab moral *importer* kepada rakyat, sehingga swasembada bisa terpenuhi.

Itu aja, Pimpinan, dan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Terakhir, Mbak Rieke Diah Pitaloka.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu,

Yang kami hormati Pimpinan, dan

Anggota Komisi VI DPR RI,

Yang kami hormati Direktur Utama Perum Perhutani,

Direktur Utama *Holding* PTPN, yaitu dengan *leading* sektor PTPN III beserta jajarannya,

Hadirin yang hadir di balkon, dan semua yang hadir di ruangan Komisi VI DPR RI,

Terima kasih untuk pemaparannya, juga ada beberapa pencapaian yang saya turut mengapresiasi, baik di Perhutani maupun di PTPN. Sebelum pada pokok-pokok persoalan yang ingin saya sampaikan, izinkan saya sekilas balik sedikit bahwa, baik Perhutani maupun PTPN, ini, tadi sudah dikatakan Pak Bardi, ini adalah sebetulnya lanjutan dari apa yang dirintis oleh pemerintahan kolonial Belanda, begitu, Pak, ya.

Kebetulan saya Duta Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak, jadi, *roadmap* atau *pondasi* pertama, bagaimana PTPN dan Perhutani ini dikembangkan, ada di dalam arsip dokumen Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang disusun, diawali dengan lanjutan riset dari Belanda pada pemerintahan Indonesia, dipertajam di tahun 1957, begitu. Lalu, masuk nasionalisasi aset yang dikuasai oleh kolonial Belanda, masuk ke dalam Republik Indonesia, yang diperkuat dengan riset di tahun 1957, masuk ke dalam Indonesia sebagai negara kepulauan dalam Deklarasi Djuanda, Bapak. Lalu kemudian, setelah itu, riset tersebut disusun oleh 513 Anggota MPR RI pertama, Bapak, dibantu 600 pakar dari berbagai kampus yang ada saat itu. Di seluruh bidang, termasuk juga di bidang sektor pangan ya, pengembangan sumber daya alam mineral dan sebagainya.

Intinya bahwa konsep awal dari PTPN dan Perhutani juga, tentunya adalah terkait bagaimana Indonesia menjadi negara industri dengan postulat pentingnya, syarat pentingnya adalah berbasis riset ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu, Bapak. Lalu, disusunlah ada 5 prioritas industri nasional, saat itu:

- Pertama adalah industri sandang, pangan, dan papan;
- Yang kedua, industri bahan baku industri;
- Yang ketiga adalah industri energi khususnya energi terbarukan;
- Yang keempat, adalah industri farmasi dan obat-obatan tradisional; dan
- Kelima adalah industri pariwisata.

Itulah prioritas industri yang digagas oleh para pendiri bangsa kita, dipimpin oleh Bung Karno, tentu saja. Tetapi, Tim Dewan Perancang Nasional, pimpinannya adalah Prof *Mister* Muhammad Yamin. Saya menggambarkan ini, supaya kita punya gambaran yang komprehensif, sehingga PTPN dan juga Perhutani masuk di dalam, tadi ada *roadmap*, Bapak, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi.

Bagaimana ke depannya PTPN dan Perhutani, ini tidak lepas pada *pondasi* awalnya menjadi bagian dari industri pangan tadi. Betul, Bapak, ya? Tadi komoditas itu *kan* juga pangan, industri papan, sandang, lalu industri biodiesel, itu industri bahan baku, industri energi terbarukan, lalu kemudian industri farmasi obat-obatan tradisional, industri pariwisata Perhutani tadi. Makanya, sebetulnya mungkin ada baiknya kita *flashback* sedikit.

Nah, oleh karena itu, saya kira juga, kita tidak bisa lepas dari adanya Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang 11/2019 yang mensyaratkan semua kebijakan itu harus berbasis pada riset. Dunia usaha, swasta, maupun badan usaha negara, ketika mengalokasikan anggarannya untuk riset, itu akan memperoleh *tax deduction*. Dan sudah keluar ya, Bapak, ya, peraturan dari termasuk PMK-nya tentang bagaimana perusahaan, termasuk BUMN mendapatkan *tax deduction*.

Oleh karena itu, pertama, tentu saya mohon bantuan Bapak untuk memberikan data. Izin, sekretariat, mohon dicatat, data tentang riset-riset



yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh PTPN dan Perhutani. Lalu, bagaimana riset dengan negara-negara lain, misalnya. Bapak, tolong kita sama-sama berpegang pada Undang-Undang Sisnas Iptek, bahwa riset tersebut juga tetap pada perspektif politik bebas aktif. Kita tidak anti asing dan riset itu tidak mungkin Indonesia sendiri, tetapi, Bapak, meskipun sambil menguap karena *ngantuk* dengar saya *ngoceh*. Yang terakhir, faktor U, Pak, ya, faktor umur. *Gapapa*, manusiawi. Bapak, tolong diberikan risetnya dengan siapa saja tadi dan berapa alokasi anggarannya dengan lembaga riset luar. Bapak alokasikan berapa persen, dan mana saja, tadi Pak Bardi sudah menyebutkan, dan dengan perguruan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi mana saja, dan berapa persen alokasi dan total jumlah uangnya. Perhutani maupun PTPN.

Yang kedua, adalah mengenai Perhutani. Perhutani itu tadinya dari 8 anak perusahaan menjadi 3 anak perusahaan dengan dasar hukum PP 72/2010 tentang Perhutani, PP 73/2014 tentang *Holding* BUMN Kehutanan, SK Menteri Lingkungan Hidup, penugasan HP dan HL di Jateng, Jatim, Jabar, Banten.

Areal pengelolaan 2,4 juta hektar di Pulau Jawa. Ini adalah 1,9% luas hutan Indonesia ya, Bapak, data dari Bapak, yang luas totalnya 125,6 juta hektar dan 1,2 juta hektar. Ini izin pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan di luar Jawa, 0,9% dari jumlah total Indonesia sendiri, hutan Indonesia. Dengan *core business* tadi produksi kayu, produksi getah pinus. Pak, ini masuk ya tadi di skala prioritas industri, bagus sekali sebetulnya.

Oleh karena itu, Pak, tolong berikan data kepada kami. Perkembangan dari, tadi bagaimana pariwisata, *roadmap*-nya, Pak. *Roadmap*-nya tentu harus ada risetnya, Pak. Jadi, tidak asumsi saja. Saya yakin ada risetnya.

Nah, kemudian saya masuk ke PTPN. Eh, satu lagi. Mohon, Bapak, kalau ingin bekerja sama dengan Perhutani, ini masyarakat, tolong sampaikan bagaimana SOP-nya untuk khususnya tadi menuju industri pariwisata yang berbasis lingkungan, Pak. Bagaimana jika masyarakat lokal maupun swasta ingin bekerja sama. SOP-nya seperti apa. Lalu kemudian, mekanisme investasinya, Bapak, kalau ada investasi di Perhutani, mohon kami diberikan mekanisme investasi di Perhutani.

Kemudian, PTPN. Nah, PTPN ini adalah, Pak, luar biasa, juga sudah disampaikan, merupakan pimpinan perkebunan terbesar di dunia. Luar biasa, Bapak, sehingga ini menjadi, kalau dikelola dengan baik, saya kira pasti bisa *lah* ini memberikan keuntungan besar untuk republik ini. Dengan pengelolaan, pengolahan, pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, tembakau, aneka kayu, buah-buahan, dan coklat, Pak.

Tolong dikasih, Pak, ya, sebarannya di mana juga. Tidak bisa dipaksakan, Bapak, tiba-tiba, hasil riset itu menjadi penting, PTPN, pasti juga Anda orang-orang pintar semua, saya yakin. Mana unsur hara tanah yang



cocok untuk kopi, mana yang untuk teh, begitu ya, dan mana untuk yang hal-hal lainnya.

Jangan sampai dengan alasan penugasan, rasionalitas ilmiah tentang, misalnya topografinya, hara tanahnya, lalu anda dipaksakan. Jangan, Pak, jangan, karena pasti perusahaan rugi, akibatnya juga akan terjadi kerusakan lingkungan. Saya mendukung langkah yang dilakukan oleh PTPN untuk tidak terburu-buru melakukan instruksi dari atas ya, untuk *nanam* ini, *nanam* ini. Riset dulu, Pak, di mana tadi mau menanam itu daerah mana, dan apa alasannya. Jangan hanya karena perintah unsur politik, *enggak* bisa, Pak. Mengelola perusahaan, *research and development* itu menjadi penting juga untuk PTPN.

Termasuk juga kakao atau coklat. Ini tadi saya belum, PTPN XII di Jawa Timur, saya kira. Betul, Pak, ya? Itu adalah salah satu produsen coklat terbaik di dunia, Bapak, kopi juga. Ini lagi butuh banyak kopi dengan orang *trend* minum kopi. Nah, berikan data kepada kami, Bapak, berapa nilai ekspor masing-masing, terutama tadi kopi, coklat, dan berapa nilai yang dilaku, yang bisa diserap produksi komoditas tersebut di dalam negeri.

Nah, kembali mundur sedikit tadi, rencana pembangunan pertama itu menetapkan lima bidang industri, Bapak, sebagai prioritas. Alasannya *simple*, kenapa *sih cuman* lima bidang industri yang prioritas? Tapi industri lain mereka kerjakan semua, termasuk semen juga ada di sana. Mereka katakan, para pendiri bangsa kita, "Karena bahan baku kita punya, pasar kita punya", dan untuk pasar hasil produksi PTPN maupun Perhutani, kita punya, Pimpinan, lebih dari, kurang lebih 260-an, 270 juta rakyat.

Yang kemudian ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan di halaman 5. Ini Bapak menyampaikan tentang beberapa ,PTPN *historical performance* dalam bidang keuangan. Ada laba 11,7 triliun, lalu ada pembayaran total hutang 18 triliun. Nah, Bapak, mohon berikan data kepada kami, hutang sebelumnya itu *kan* ada beberapa itu *loh*, Pak, yang dulu itu, anak perusahaan yang bergabung dalam *holding* ini. Hutang setiap perusahaan yang bergabung dulu, *before and after*, ini berapa, yang sudah dibayarkan pokok hutang berbunga 11,3 triliun.

Lalu kemudian, simpanan hari tua pekerja 3,7 triliun, dan iuran pensiun 3 triliun dari 2021 sampai dengan Mei 2024. Nah, iuran pensiun. Pimpinan, ini saya kira perlu kita kupas khusus dengan dapan-dapan, itu dengan Menteri BUMN. Kenapa dibebankan kepada perusahaan atau yang sekarang *nih*, karena sebenarnya iuran itu *kan udah* dari dulu. Justru yang menjadi pertanyaan kami, dana potongan gaji pensiunan itu di mana? Ya.

Kenapa sekarang jadi, manajemen yang baru harus pontang-panting? Hampir di semua BUMN saya kira, harus membayar dana pensiun yang sebenarnya orang *udah* dipotong gajinya setiap tahun. Bersisa simpanan hari tua di pemberitaan terakhir 7 Mei yang saya baca adalah ada 6.000 purnakarya atau pensiunan karyawan PTPN VIII Jawa Barat, Banten, PTPN

IX Jawa Tengah, belum menerima santunan hari tua. Koreksi jika data saya salah, senilai 356 miliar. Mau dibebankan lagi kepada perusahaan yang sedang berjuang untuk restrukturisasi. Ada persoalan ketenagakerjaan menyangkut jaminan hari, jaminan sosialnya yang harus dibenahi.

Koreksi jika saya salah, Bapak, tapi saya inisiator Undang-Undang BPJS. Semua pekerja di perusahaan swasta maupun negara, termasuk di BUMN, wajib mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Kasih data kepada kami, adakah iuran yang macet di anak-anak perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan menyangkut jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Sudah ada jaminan hari tua, kenapa harus ada simpanan hari tua yang, Bapak ini kalau bisa di-*cut off*, *cut off*, tapi bayar dulu, bayar dulu yang sebelumnya. Di-*cut off* untuk masuk ke jaminan hari tua. Jangan sampai terjadi *double* pengeluaran untuk hal yang sama. Kalau saya tidak salah, jaminan hari tua itu ada skemanya sendiri dan pasti harus. BUMN tidak mungkin, karena kalau tidak, Anda pidana. Simpanan hari tua, itu tidak berbasis pada potongan iuran, begitu, Bapak, ya?

Nah, mohon datanya, Bapak, dan juga Perhutani, berapa tunggakan terhadap BPJS? Jika ada, ya. Kalau tidak ada, ya *alhamdulillah* atau nanti saya cari datanya sendiri.

Kemudian, terakhir. Izin, Pimpinan, tentang BPDPKS. Sama dengan teman-teman yang lain, dengan tadi BPDPKS, apakah PTPN ini, perkebuannya dibandingkan dengan, saya waktu itu ada *sih* datanya, ada yang lebih besar dari Bapak ya, Pak, ya? Paling besar, Bapak? Nah, berarti, Pak, sebetulnya yang paling besar menyumbangkan BPDPKS, ya PTPN *gitu* ya. Datanya kasih ke kami, Pak. Berapa PTPN telah menyetorkan BPDPKS? Dan BPDPKS ini adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ya, yang dibentuk berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang 39 Tahun 2014. Dana himpunan dari pelaku usaha perkebunan, berupa *supporting fund* atau CS, CSF ya, Pak. Yang sumbernya dari, pertama, tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor, CPO, produk turunan, iuran pelaku usaha perkebunan sawit. Nah, ini saya simpan di yang terakhir, Pimpinan. Rasanya kita perlu memberi *support* kepada PTPN.

Kasih data ke kami, Bapak, berapa sudah kontribusi dari rincian skema BPDPKS yang diberikan oleh PTPN? Karena itu harus digunakan untuk mendorong penelitian dan pengembangan promosi usaha, meningkatkan sarana prasarana, pengembangan industri, dan selanjutnya juga biodiesel, *replanting*, peningkatan jumlah mitra usaha, penyaluran dalam bentuk ekspor, serta edukasi sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit.

BPDPKS ini sudah masuk pada ranah penyelidikan hukum ya, Bapak, ya. Betul, Pak? Ada dana untuk biodiesel. Ini bayangkan, Mas Bimo, saya *gak* tahu, PTPN dapat jatah berapa, *Masya Allah*. Ini untuk produsen biodiesel, tadi sudah disebutkan namanya oleh teman terdahulu, ada tiga perusahaan

besar, biodieselnnya itu dia dapat kurang lebih, koreksi kalau data saya salah karena saya bukan PPATK, 72,5 triliun untuk tiga perusahaan itu. Dan sudah diluncurkan periode 2015 sampai 2023, menyentuh 176,1 triliun, persentase 91,3%, disalurkan pada para produsen biodiesel sebagai insentif untuk menip selisih antara harga indeks pasar biodiesel dan solar. Tapi, Pimpinan, yang untuk hal lainnya, mendorong penelitian, *replanting*, jumlah mitra usaha, penyaluran ekspor, edukasi masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit. *Subhanallah*, itu hanya dialokasikan 0,37% sampai 0,27%.

Oleh karena itu, data Bapak menjadi penting. Komisi VI, Pak, tolong bantu, Pak, PTPN itu penyumbang terbesar BPDPKS ya. Tahu saya benar atau *enggak*, tapi dengan jumlah lahan yang paling besar sebetulnya, penyumbang besar BPDPKS.

Terakhir, saya memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung.

PESERTA RAPAT:

Tujuan BPDPKS untuk apa?

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Tujuan BPDPKS itu adalah mendorong penelitian dan pengembangan promosi, pengembangan, sawit, tentu saja, promosi usaha, meningkatkan sarana prasarana pengembangan industri, pengembangan biodiesel, *replanting*, peningkatan jumlah mitra usaha, dan jumlah penyaluran dalam bentuk ekspor, serta edukasi sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit. Dibentuk berdasarkan tata kelolanya, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, sekretariat tolong dicatat, nomor 113/PMK.01/2015, tanggal 10 Juni 2015. Hanya untuk biodiesel 91,3%. Data saya mungkin salah, makanya saya, kalau ada yang punya data yang benar.

Replanting itu, pengembangan perkebunan kelapa sawit penelitian dan seterusnya, termasuk *replanting*, hanya 0,37%. Pengembangan, *hah?* Kurang lebih. Kurang lebih, ya, nanti Bapak perbaiki data saya, Pak. Tapi intinya, 9, 80, 90% biodiesel dengan masuk pada perusahaan-perusahaan 3 besar tadi, dengan indikasi ada *politically expose person* (PEP), atau ordal. Betul, Pak, ya? *Gak* berani *ngangguk*, tapi senyum. *Gapapa*. Gede, Pak, 176,11 triliun. Saya tidak ingin PTPN menjadi sapi perah bagi *praktek-praktek* indikasi ordal. Saya mendukung Kejaksaan Agung untuk terus mengungkap, *kok* berhenti dari 2023, kurang *rame* lagi ini.

Nah, tapi untuk Komisi VI, izin, Pimpinan, mohon menjadi catatan juga, seperti yang disampaikan oleh Pak Herman tadi. Sebetulnya dana BPT, BPDPKS ini, siapa yang bersumbangsiah terbesar? PTPN. Ya kita juga, Pak, tolong bantuannya. Saya kira lintas fraksi, *Insya Allah* mendukung, BPDPKS diberikan juga porsinya untuk PTPN.

Terima kasih

Iya, yang mitranya PTPN. Petani sawit ya, petani sawit juga. Terima kasih.

Wallahul muwafiq ila aqwamith tharieq,

Mohon maaf kalau kepanjangan. Kalau datanya salah, dikoreksi, karena saya bukan PPATK.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih untuk kawan-kawan Anggota Komisi VI.

Dari meja Pimpinan, terkait dengan PTPN, mengenai tebu, kita sepakat, Pak. Awalnya saya kemarin memang agak ragu, apakah pengembangan target swasembada gula ini hanya berbasiskan korporasi. Tapi tadi terlihat bagaimana keterkaitan usaha kita, swasembada gula, khususnya konsumsi, itu sangat korelatif dengan peningkatan kesejahteraan petani, ya. Ini penting, apalagi kalau yang industri, nanti kita bisa perhitungkan perluasan lahan untuk gula industri, apakah itu nanti berbasiskan korporasi atau memang masih ada tebu rakyat. Karena tadi *kan*, gambaran kita ke Papua ya. Tapi juga dipikirkan, *ngusung* pekerja ke sana juga tidak mudah. *Food estate* ideal dalam narasi kalkulasi-kalkulasi perhitungan matematis. Tapi persoalan sosiologis, juga harus dipertimbangkan. Menurut saya, 6,5 juta hektar lahan kering, bukan lahan tidak subur, itu ada, Pak.

Daerah saya, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, ya. Itu semua ada lahan kering. Tolong pertimbangkan *empowering* lahan kering, lahan subur yang kurang air sebenarnya, ya. Ini perlu dipertimbangkan untuk pengembangan tebu rakyat, yang dulu sebagian besar juga perkebunan-perkebunan zaman Belanda. Misalnya untuk Delanggu. Wilayah Delanggu saat ini, lahannya karena pabrik Gondangbaru tutup, itu dipakai untuk tanaman pisang raja, Pak. Itu.

Jadi, banyak lahan-lahan kering yang perlu diberdayakan kembali, yang saat ini kehilangan komoditas utama setelah beberapa pabrik gula itu tutup. Untuk gula industri, idealnya memang masih berbasiskan tebu rakyat dan korporasi. Tadi disampaikan oleh Pak Dirut, 3 juta ton untuk kebutuhan gula, Pak, ya? 1,5 juta ton untuk konsumsi? Oh konsumsi sudah 3 juta?

DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):

Untuk konsumsi 3,2, industri 3,29.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh, jadi kebutuhan nasional kita sekarang hampir sekitar 6 juta ton. Untuk kebutuhan gula konsumsi yang 3,2 jutaan, 2 ton. Kemampuan produksi nasional swasta dan BUMN, berapa sampai sekarang?

DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):

Total saat ini 2,4.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dua koma empat? Berarti kita masih sekitar 800.

DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):

Kurang untuk konsumsi.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Konsumsi, kurang 800.

Sekarang itu kita, dulu gini, Pak, *scheme* 800.000, benar, ya? 800.000 ton ini, siapa, Pak? Dulu *kan* importir produsen, importir produsen terutama PTPN. Selisih keuntungan tadi untuk *on farm* sama *off farm* yang sebagian perlu kita benahi. Kita *udah* tekankan, bahwa kenapa menutup defisit gula konsumsi, tetapi *size* keuntungan kita jadikan pemberdayaan untuk petani? Kita *ndak* ingin 800.000 ton ini diberikan kepada *raw sugar* yang dikelola oleh gula industri. Ini adalah *scheme* jatah dari gula konsumsi yang keuntungannya adalah untuk peningkatan kualitas di *on farm* dan *off farm*.

Nah, ini yang saya kira Pak Dirut harus *kekeh*, ya. Karena, jangan sampai defisit ini dimanfaatkan pemburu rente untuk mencari keuntungan yang tidak terkait *linkage* dengan target swasembada gula kita. Ini sudah kita tekankan kepada Menteri BUMN. Maka, jangan justru *size*-nya banyak di PPI atau di BULOG, ya *kan*. Kasihkan *size* untuk importir produsen yang tetap kita tekankan, supaya keuntungannya masih dalam *roadmap* usaha swasembada gula nasional kita. Karena untuk mencapai target 800.000 ton, bukan hal yang mudah, Pak, apalagi sekarang rendemen bagus *didelapankan*. Tapi untuk mesinnya berapa? Kapasitas yang 1 miliar atau 2, eh, 1 triliun atau 2 triliun, Pak, yang.

DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):

Dua setengah.



KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dua setengah itu berapa kapasitas, TCD?

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

TCD.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

TCD. 10.000 ya, Pak. 10.000 TCD itu berapa ton, Pak?

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Sepuluh ribu hektare, kira-kira.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sepuluh ribu hektare ya, Pak, ya. 10.000 hektare. Jadi, kita bayangkan kalau 800.000 ton ini kita masih membutuhkan berapa hektare dan berapa pabrik, *kan gitu*, Pak, hitungannya.

PESERTA RAPAT:

Sepuluh pabrik.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sepuluh pabrik dengan 100.000 hektare, *kan gitu*, Pak. Saya kira ini penting, harus di rencanakan. Kalau target tadi diundurkan oleh Pak Ghani ke 2027, Pak, ya? 2008? Nah, ini yang perlu kita *breakdown*kan situ, Pak. Nah, banyak petani tebu rakyat yang karena ditutupnya pabrik tebu, karena terkait standar SNI kemarin, ya, saya menyesalkan itu memang. Beberapa pabrik yang standar SNI-nya kurang, itu akhirnya ditutup, walaupun itu juga tidak beracun sebenarnya kalau kita minum gula yang agak kuning, terus kalau kita *udek gitu*, terus ada *kemerampulnya* itu *kan* sejak kecil kita juga kayak *gitu*, Pak.

Saya perpanjang sampai 13.30.

(RAPAT: SETUJU)

Jadi itu, Pak. Saya apresiasi, Dirut PTPN III, yang *keukeuh*, Pak, karena jangan sampai ada seolah-olah yang *me-maintain*, supaya target swasembada gula konsumsi ini tidak tercapai. Karena, ketergantungan kita terhadap impor yang *di-drive* oleh para pemburu rente.



Tetapi kita pernah kelabakan, Pak, apalagi kalau, ini, minyak fosil naik. *Food* menjadi *fuel*, itu yang dapat PO untuk impor pun *enggak* dapat *raw sugar* dan *enggak* dapat gula, Pak. Karena kondisi perubahan harga minyak fosil, sehingga makanan yang berubah, baik itu kedelai, baik itu tebu, maupun jagung, jadi biodiesel, ya.

Maka, menyandarkan pangan nasional, menyandarkan kebutuhan pangan nasional dengan pangan yang kita produksi sendiri itu adalah hal yang penting, karena suatu saat, pasar bebas itu kadang *ndak* ada, ya. Pasar bebas kadang, akhirnya, makanan kembali pada kepentingan nasional *interest*-nya masing-masing, karena itu terkait dengan ketahanan dan cadangan pangan nasional. Kita sekarang untuk cari beras sudah cukup sulit, Vietnam, Thailand, sudah tidak menjadikan komunitas beras menjadi B2B sudah G2G, bahkan India pun sudah menutup.

Padahal, semakin hari, kebutuhan impor pangan kita, terutama beras, dari 2 juta, 3 juta, dan 2024 ini kita tembus sampai kebutuhan 5 juta, yang belum tentu bisa kita dapatkan juga. Ini penting terkait dengan PTPN. Sepuluh tahun fondasi Pemerintahan Jokowi dengan infrastruktur kita harapkan, mampu *me-leverage* aset-aset PTPN maupun Perhutani untuk menjadi aset yang lebih produktif, sehingga mendongkrak PDB maupun mendongkrak penerimaan negara itu bisa terwujud. Hilirisasi menjadi penting dalam berbagai aspek.

Teh, Pak. Kita kunjungan ke PTPN VIII. Teh kita yang di hilirisasi, itu perlu diindustrialisasi ke teh, Pak. Nah, PTPN VIII ini hilirisasinya sudah, sudah jauh lebih besar, yang kita serap menjadi industri teh, kalau tidak salah hanya sekitar 8 sampai 15%, Pak. Sulitnya apa membuat pabrik teh, Pak? Ini *ndak* ada yang tidak minum teh, Pak, 170 juta ini minum teh. Bahkan, teh-teh PTPN yang dulu andalan, tidak, tidak ada yang tidak kenal Goalpara itu *kan*. Hampir unggul dengan produk teh lain. Sekarang ada kecenderungan, kenapa tidak segera ditingkatkan hilirisasi, sementara tadi kemampuan duitnya dan apakah juga terlalu membutuhkan modal besar untuk meningkatkan pabrik teh di Indonesia ini.

Nah, hilirisasinya tidak terserap, Pak, ya. *Enggak* tahu kenapa Unilever atau pabrik lainnya, sekarang menurun. Ini perlu di tingkatkan hilirisasi di sektor teh. Begitu juga di sawit. Sawit rakyat, Pak, waktu kita *gombyeng* minyak goreng kemarin, PTPN juga hanya baru mampu memberikan, apa, dukungan minyak goreng *kan* kecil, Pak, ya.

Saya berharap, dengan CPO adalah hilirisasi, industrialisasi ke minyak gorengnya juga harus ditingkatkan. Saya sepakat tadi dengan *holdingisasi*, ya, bagaimana *unified*, tidak terfragmentasi antara PTPN yang di Aceh, kemudian di Riau, di yang lainnya bisa dikoordinasikan satu kesatuan. Untuk teh, coklat, tebu, saya kira menjadi skala prioritas.

Kemudian, untuk *roadmap* keuangan. Moga-moga, Pak, utangnya semakin terbayar, begitu juga Perum Perhutani. Tinggalan utangan lama sampai sekarang, saya melihat perlu di, di, dicermati, karena sebelum Pak Wahyu masuk itu, kecenderungan Perhutani mau bangkrut itu *kan* terjadi, Pak. Maka, kita harapkan dengan Pak Wahyu hadir, minimal kondisi keuangan itu bisa teratasi dengan baik. Jangan sampai terjadi situasi yang seperti dulu ya, *cashflow*-nya menipis. Bahkan, dulu pernah terjadi, apa, kalau tidak salah, pembayaran gaji karyawan pernah mengalami kesulitan, Pak, dulu ya.

Kita harapkan sekarang, bagaimana persoalan-persoalan keuangan ini bisa lebih, lebih bisa teratasi, begitu juga utangnya, Pak, ya. Utangnya masih cukup tinggi, ya?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Enggak, Pak. Enggak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Berapa T, Pak?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Oh, enggak nyampai triliun.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

*Enggak nyampai, Pak, ya. Saya kira cukup membanggakan, bagaimana korporasi Perhutani ini harus semakin kuat. Dan kita harapkan, komoditas untuk mendongkrak PDB kita memang tidak bisa lepas, ada *blue gold*, itu perikanan, ada *green gold*, itu adalah pertanian perkebunan, ada *black gold*, itu sumber daya mineral, dan pariwisata.*

Nah, kontribusi instrumen APBN dan instrumen BUMN, itu sangat penting dalam situasi ketidakpastian ekonomi global. Bagaimana PTPN yang memang tidak banyak tergantung pada impor, Pak. PDB kita ini, *enggak* tumbuh-tumbuh, karena BUMN-BUMN banyak sekali yang justru memberikan beban pada hal yang terkait dengan peningkatan impor.

Nah, kita harapkan, PTPN justru BUMN yang bisa genjot ekspornya, Pak, ya. Nah, untuk yang ekspor, usahakan terutama di Perhutani, kebutuhan kayu dan sebagainya, itu agak di, dilonggarkan, Pak. Saat ini *jor-joran* ekspor *aja*, Pak. Yang bisa di-*export*, apalagi dengan *disruption* teknologi informasi saat ini, *buyer* dan *user* sekarang ini bisa ketemu dengan berbagai alat komunikasi yang ada.

Para diaspora kita ini sekarang juga menjadi *marketer-marketer*. Kita kunjungan kemarin keluar, ketemu diaspora, kita ketemu apa itu, teman-



teman di luar. Akses informasinya ketemu, cuma bagaimana mempertemukan misalnya Perhutani atau PTPN yang *go global* dengan berbagai produk yang bisa dia jual itu, masih menjadi kesulitan.

Maka, bagaimana peningkatan ekspor kita yang direncanakan secara matang maupun yang karena kreativitas-kreativitas para diaspora kita ini semakin membutuhkan. Produk-produk yang apa dia bisa bawa dan bisa jual, intinya begitu, Pak, ya. Sampai beras organik *aja* kemarin, beberapa informasi yang masuk ke Komisi VI, minta dibantu. Betapa Amerika, berapa, betapa Eropa itu membutuhkan beras yang belum bisa tercukupi oleh, oleh produsen nasional kita.

Itu yang bisa kami sampaikan. Kesejahteraan karyawan, saya berharap terus ditingkatkan. Fasilitas-fasilitasnya, kesehatan, pendidikan, ya, begitu tunjangan. Jangan hanya gaji saja yang dipikirkan. Kemudian, tata kelola perusahaan menjadi hal yang penting untuk menambah nilai tambah dari produksi, nilai tambah hal-hal yang terkait dengan produk-produk di PTPN dan di Perhutani.

Demikian dari Pimpinan. Masih ada tambahan dua Pimpinan, baru hadir. Kalau mau disampaikan, silakan Pak Sarmuji.

WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Bimo.

Sedikit *aja*, saya. Perhutani mungkin, ya. Perhutani ini wilayahnya sangat dekat dengan wilayah rakyat, ya, dan beberapa produk yang ada di sekitar Perhutani itu sebenarnya ada produk yang ditanam dengan harapan bisa mendapatkan nilai tambah yang besar. Ini melanjutkan hilirisasi, Pak Bimo, ada isu hilirisasi barangkali yang juga tidak berkaitan dengan sesuatu yang sangat mewah.

Misalkan sawit itu *kan* sangat mewah, membutuhkan program yang mungkin juga besar. Tetapi, ada produk-produk yang di Jawa Timur khususnya, itu ditanam, sempat ditanam secara masif dan produk akhirnya itu mahal sekali. Saya sebut saja porang, misalkan. Porang itu, kalau Pak Bimo *pingin* makan beras porang, itu harganya 90.000, Pak, ya, di All Fresh, di mana itu. saya sampai *enggak* berani makan beras porang, karena kalau saya ditawari "Pak, ini beras porang, Pak, sehat". Saya yang saya bayangkan *enggak* berani itu, karena apa? Zakatnya pasti susah ini. Nanti kalau, karena makanan utama itu zakatnya juga harus makanan itu. Jadi, saya bayangkan, siapa yang mau *nerima* zakat porang nanti? *Kan* jarang orang miskin kasih zakat porang sama zakat beras *kan* sama saja nilainya, sementara harganya porang itu 90.000. Di petani, harga porang itu hanya 5.000, maksimal 7.000 hari ini. Artinya ada gap yang jauh sekali sebenarnya, nilai tambah dari produk pertanian yang mentah sampai ke produk jadi, itu besar sekali, nilai tambahnya itu besar sekali.



Nah, kalau Perhutani bisa ikut di dalam situ, terus lahan-lahan Perhutani yang saya tahu banyak luas, banyak sekali, karena porang itu *kan* bisa tumbuh di bawah hutan jati, bisa tumbuh di mana saja. Dan itu bisa dikerjasamakan dengan rakyat di sekitar Perhutani. Itu rakyat sekitar hutan itu, itu pasti sejahtera itu, asal harga porangnya bisa dijaga. Kalau kita, negara bisa hadir melalui pencapaian nilai tambah yang besar dari satu jenis saja yang bisa ditanam oleh rakyat kita, rakyat kita akan sangat merasakan kehadiran negara, ya.

Mungkin ada produk-produk lain yang serupa dengan itu, yang tidak bisa saya sebutkan saat ini. Bapak-Bapak mungkin tahu ada produk-produk yang lain yang juga punya nilai tambah yang besar. Taruhlah kayu apa, kayu semak-semak yang punya nilai untuk pelet. Pelet yang kalorinya tinggi itu, kayandra apa namanya? Kaliandra ya.

Misalkan pohon kaliandra, itu *kan* bisa tumbuh di mana saja juga. Di mana saja bisa pohon kaliandra, punya kalori yang sangat tinggi untuk pakan ternak, batangnya juga, kalau dijadikan pelet, itu bisa melebihi batu bara, dan itu bisa juga mendukung *green economic*, yang tadi di isu apa, juga ada isu di Perhutani tentang mendukung usaha untuk *zero emission* dan sebagainya.

Maksud saya, mari kita hadir pada hal-hal yang bagi sebagian orang bukan isu penting, tetapi sangat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Kalau kaliandar itu ditanam di lahan-lahan Perhutani atau porang ditanam lahan-lahan Perhutani oleh rakyat, lalu hasilnya bisa, Perhutani bisa menjadi *off taker*, ada pabrik yang bisa menjadi hilirisasinya, itu rakyat di sekitar hutan Perhutani akan sangat berterima kasih pada negara.

Saya pikir itu, Pak Bimo. Itu contoh saja, nanti mungkin kita bisa kaji lebih jauh lagi, bisa teliti lagi apa saja yang bisa ditanam dengan mudah di lahan-lahan Perhutani, dan bisa mensejahterakan rakyat kita.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bapak/Ibu dan Saudara sekalian,

Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya di dalam pendalaman materi rapat hari ini.

Saya akan beri kesempatan kepada Pak Dirut PTPN maupun Perhutani untuk memberikan respons beberapa hal, banyak masukan yang memang perlu di



**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Baik.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

... sampaikan. Kami persilakan.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan, dan
Bapak/Ibu Anggota Komisi VI,**

Saya akan menyampaikan secara *highlight*, jawaban umum. Nanti secara detail, terutama yang memerlukan data seperti Bu Rieke tadi, kita akan sampaikan secara tertulis, Bu, ya.

Baik, tadi dari Pak Andre, banyak saran, Pak. Jadi, terkait dengan, apa namanya, di Sumatera Barat kita juga punya program PSR juga, Pak. Jadi, artinya sistem, termasuk di Aceh juga ada, Pak. Di Sumatera Utara juga ada. Jadi, kita 60.000 hektar itu minimal dalam 5 tahun, Pak.

Tapi kalau ada dukungan tadi segera keluar, BPDPKS menetapkan peningkatan, dari 30 juta bantuannya menjadi 60, tentu kami akan bisa lebih luas. Dan itu mestinya menjadi gerakan bersama, Pak, Bapak Pimpinan, karena ada 3 juta hektar lahan petani sawit yang umurnya di atas 25, Pak. *Lah* itu kalau selama ini sepertahunnya hanya 20, berarti *kan* perlu waktu 150 tahun.

Sebenarnya dulu Pak Jokowi tahun 2015, *pinginnya* 500.000 setahun, tapi ada isu terakhir. Ketahuan isunya adalah petani tidak memiliki kapasitas untuk mendapatkan kredit. Nah, di situlah masalah rumit, termasuk asas, terkait dengan syarat ketentuan tentang legalitas lahan dan sebagainya.

Dengan bantuannya ditingkatkan dari 30 ke 60, Pak, itu pasti lebih gampang, karena kekurangannya, mitranya sendiri bisa. Kami sanggup PTPN mengeluarkan 15 juta, nanti dibayar setelah petani, apa namanya, bisa panen. Jadi, itu lebih sederhana, Pak.

Kemudian dari Pak Herman. Pak Khaeron tadi, kami sependapat, Pak. Jadi sebenarnya, kami ini, Pak, ada tiga *subholding*. Satu, sawit, konsentrasinya memperluas sawit dari tanaman konversi karet. Kenapa karet kami konversi? Karet itu sudah 50 tahun sebenarnya. Itu harus sudah dikonversi, Bu, karena di karet itu sekarang juga ada 3,5 juta hektar karet petani yang harus kita pikirkan, karena tidak memberikan hasil apa-apa.



Mungkin perlu jadi pemikiran kita bersama, mau dibawa ke mana? Mungkin perlu dikonversi menjadi sawit atau menjadi tebu barangkali. Untuk petani di Sumatera bagian Selatan, Bengkulu, dan Jambi Pak, ada tiga.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Memang jatuh betul, Pak, ya, karet ini?

DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):

Jatuh luar biasa. Tahun ini naik, Pak, tapi saya yakin, sebentar *aja*, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kenapa, Pak?

DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):

Tahun ini naiknya luar biasa, tapi saya yakin itu hanya, apa.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kan ada.

DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):

Tentatif saja.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kan ada perubahan bahan baku karet ke bahan baku

DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):

Iya, karena sekarang kalau kita lihat ban *aja*, Pak, sekarang ban, kita punya ban *kan* karetnya mungkin sudah 1/10-nya dari 10 tahun yang lalu. Karet, apa, ban sekarang *enggak* pakai karet, *gitu ya*, Pak. Jadi, kami itu, PalmCo yang *nangani* masalah sawit di hilirisasinya juga, termasuk dukungan kepada petani. Untuk gula, tadi kami jelas, Pak, kami sanggup, Pak, untuk swasembada, asal kami mohon dukungan Bapak-Bapak terutama di halaman tadi, ada beberapa poin dukungan dari pemerintah. Mohon didukung itu. Tidak banyak-banyak *kok*, Pak.



Yang pertama adalah tadi, masalah kredit, KUR-nya tidak dibatasi. Terus, apabila lebih baik lagi seperti Pak Pimpinan sampaikan tadi, kalau setiap impor gula itu harus ada semacam *levy* yang dikumpulkan. Karena yang sampaikan Ibu Rieke tadi, itu Undang-Undang Perkebunan, Bu, tentang latar belakang dibentuknya BPDPKS. Itu sebenarnya tidak harus kelapa sawit, tapi bisa dikembangkan. Kalau selama ini yang ekspor yang kena, nanti yang impor juga kena, sehingga nanti ada *balancing*. Ketika ada disparitas antara biaya produksi petani, contohnya, saya ambil contoh, Pak.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Bentar, saya interupsi *dikit*, Pak.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Ya.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Jadi, Undang-Undang Perkebunan itu dulu saya Ketua Panjanya saya.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya, Bapak, ya itu.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Ya. Dan pembentukan lembaga pengepul keuangan itu, pengumpul keuangan itu, itu sebetulnya karena keprihatinan atas, atas produktivitas sawit rakyat.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Semestinya, dikumpulkan dari setiap *export* itu, itu yang diperuntukkan untuk peremajaan sawit rakyat.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Betul, Pak.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):



Harusnya itu. Sekarang dialokasikan ke *biofuel*. Wah itu yang menurut saya betul, harus diperiksa *tuh* oleh Kejaksaan, *gitu*.

Makasih.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Tapi, izin, Pak, Pak Khaeron. Sekarang sudah terjawab, Pak, dengan dinaikannya itu bantuan dari 30 ke 60, *Insya Allah* akan selesai, mungkin 5 tahun sampai 7 tahun untuk, untuk apa namanya, peremajaan sawit rakyat.

Kemudian, kami sampaikan tadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Herman, terutama kaitan dengan lahan-lahan PTPN. Kita ada lahan PTPN yang diusahakan, tapi nilainya kecil, Pak. Ada yang batu bara di Kalimantan Selatan, kemudian ada geotermal di Jawa Barat. Tapi, yang, yang kami ingin laporkan, memang seperti dengan, tadi kami tidak laporkan, tidak sampaikan secara detail, yang seperti dilakukan oleh Perhutani, itu wisata. Jadi, sekarang itu agrowisata luar biasa, Bapak/Ibu sekalian. Saya ambil contoh di Gunung Mas, Pak. Kami punya, punya areal 300-an hektar. Itu setahun pendapatannya sampai 40-50 miliar, Pak. Jadi, untungnya banyak. Jadi, kita tentu arah ke sana. Tapi tentu, tentu saja untuk pengembangan yang terkait dengan apa namanya, agrowisata, kita kolaborasi dengan para pemain yang, yang paham di industrinya.

Jadi, khusus untuk N1 atau *supporting*, itu nanti fokus kepada pengelolaan aset, Pak. Jadi contohnya, kita punya kawasan industri ada dua, satu di Sumatera Utara, pertumbuhannya bagus, Pak, di Sungai Mangke. 1 di Batang, juga bagus. Kemudian, kita sedang, di Medan ada kawasan *residential*, dan kita sedang bangun, Pak, di Walini, Pak. Jadi, kalau Bapak ke Bandung, kilometer 106 itu sedang, sedang dipersiapkan untuk menjadi kawasan *residential*. Yang dulunya menjadi bagian dari kereta cepat. Jadi, kita keluarkan dari kereta cepat, kita kembangkan menjadi kawasan, dan di tempat lain seperti itu.

Kemudian, tentang tapal batas Pak Her, Pak Herman. Memang, ketika PTPN belum di-*merge* menjadi *subholding*, timbul masalah, Pak. Beberapa PTPN Dhuafa, seperti yang di Pulau Jawa dan sebagainya Itu, membayar untuk perpanjangan HGO *aja* tidak memiliki dana. Tadi Bu Rieke sampaikan juga tentang SHT dan sebagainya, juga tidak terbayarkan.

Mungkin kami sekaligus menjawab pertanyaan Bu Rieke. Jadi *gini*, Bu, Peraturan tentang BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan itu *kan* baru muncul tahun 2015 barang kali ya, Bu, ya? Eh, 2004 ya, Pemerintahan Pak SBY.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Undang-undang 2011.



**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Dua ribu sebelas, ya, Bu. Ya, kebetulan, Bu, sebelum ada undang-undang itu, kita itu sudah ada ketentuan Permentan waktu tahun 1990-an. Itu bahwa setiap karyawan pada akhir masa dinasnya mendapatkan santunan hari tua. Itu 100% uangnya dari perusahaan.

Kemudian, dana pensiun, Bu, juga 100% dari perusahaan, Bu. Jadi, kalau yang masalah yang terutang tadi, itu adalah sebelum diberlakukannya Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan. Setelah berlakunya undang-undang itu, maka pembayaran, apa namanya tadi, SHT maupun pensiun, mengacu kepada peraturan yang baru. Jadi, itu sisa masa lalu yang akan habis, Pak. Tidak akan selamanya berjalan terus.

Kemudian dari Pak Rudi. Mungkin yang detail-detail akan kami jelaskan ya, Pak Rudi. Tapi mungkin dari yang Bapak sampaikan, memang, Pak, ketika *subholding* terbentuk di bulan Desember, mungkin 4 bulan itu kami lagi transisi, jadi, transisi, banyak pembayaran-pembayaran yang terlambat, tapi sekarang sudah tidak, Pak. Dan koreksi, Bapak, kami, kita selalu berkomunikasi dengan Bapak, setiap keluhan-keluhan tentang, terutama mitra UMKM. Tentu kami beri perhatian, karena itu bagian dari KPI kami, Pak. Jadi, ketika perusahaan ini melakukan transaksi kemitraan, itu diminta oleh kementerian, Pak. Jadi, kalau UMKM-nya tidak ditangani dengan benar, KPI kami turun.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Izin, Pimpinan, izin, Pimpinan, sedikit.

Pak, dalam asas hukum kita itu kan menganut *Lex posterior derogat legi priori*, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Betul.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Tadi, kalau tentang simpanan hari tua, oke, itu berarti hanya menyelesaikan dari aturan yang lama, yang baru kita masuk dalam rezim jaminan sosial.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Betul.



F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Nah, saya harap juga ini nanti mungkin jadi materi dengan Menteri BUMN, termasuk dengan jaminan pensiun.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Ya.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Karena kalau saya baca dari data Bapak di halaman 5, Bapak harus membayar hutang pensiun.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Masa lalu.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Pensiun yang besar, 3 triliun, Pak, ya. Nah, ini *kan* ada masalah dalam tata kelola dana pensiun. Sekalian *aja*, Pak, nanti sebelum yang lainnya. Saya kira, ada tunggakan di BPJS Ketenagakerjaan. Sebentar. Jadi, mumpung masih isunya di sini. Tunggakan dan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan, nanti dikoreksi, PTPN III 3.409.511, PTPN IX 48.290.000, PTPN VII 1.767.000, PTPN XI 2.432.000, PTPN XII 28.000.000, PTPN XV 21.000.000, Perhutani 66.721.708, Inhutani 9.587.100. Mungkin jumlahnya dianggap kecil, *tapi* ini *kan* nasib orang yang bekerja, Pak, ya. Mohon dukungannya, terima kasih.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Baik, saya tambahkan, Pak, ya. Jadi, Bu Rieke, tadi saya sampaikan, jadi peraturan lama, itu Peraturan Menteri Pertanian waktu itu *kan* PTPN di bawah Kementerian Pertanian. Jadi, sampai berlakunya ketentuan tentang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, maka berlaku peraturan lama. Jadi, ketika peraturan baru berlaku, maka yang lama *stop*. *Gitu*, Bu.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Iya. Jadi, itu *enggak* masalah, Pak, yang penting *kan* sekarang harus.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**



Iya.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Tinggal yang tunggakan *aja*.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Jadi, kita tunggakan selesai dibayar, sudah selesai, Bu. Kemudian yang tadi hutang selisih itu, mungkin selisih *aja*, Bu. Kalau hanya kecil seperti itu. Baik, *makasih*.

Untuk Pak Muslim. Ya, banyakan dukungan kepada kami, Pak. Kami terima kasih, Pak, dukungan Bapak.

Untuk Pak Subardi. Tentu, Pak, di dalam transformasi industri gula, tidak sesimpel sebagaimana yang kami sampaikan. Karena, kalau, mungkin Bapak-Bapak yang di Komisi VI ini *kan* sudah lama mungkin sebelum saya jadi Dirut, Bapak-Bapak sudah ada di sini. Kalau cerita masa lalu *kan*, industri gula *kan* centang-perenang begitu *kan*. Dan terus terang kami jujur, baru tahun lalu *lah* setelah dibentuk SGN, untung.

Tentu kami juga belum sempurna sekali, Pak. Seperti contoh tadi di awal saya sampaikan, organisasi yang mengelola petani tebu *aja* kita *enggak* ada. Baru ini mau dibentuk, Pak. *Gimana* petani mau membangkitkan petani supaya memperbaiki kultur teknisnya, organisasinya *enggak* ada. Baru kami membentuk, Pak, Pak Pimpinan.

Jadi, tentu dengan bentukan organisasi itu, nanti fungsi daripada istilah sinder kalau zaman dulu, sinder yang menangani tebu rakyat. Itu maka dia nanti akan menangani penyuluhan, mempertemukan nanti dengan perbankan terhadap KUR-nya, mempertemukan tentang kebutuhan pupuknya dengan pupuk BUMN, pupuk Indonesia, mempertemukan dengan masalah asuransinya dan sebagainya-sebagainya. Di situlah nanti kita akan, sehingga hubungan antara, karena persoalannya banyak, Bapak.

**WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI
VI DPR RI):**

Izin, Pimpinan

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Ibu sekalian.

**WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI
VI DPR RI):**



Pak, izin, Pak. Tadi organisasi petani tebuinya belum, APTRI?

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Oh itu, itu di tebu, Pak. Tapi di PTPN *enggak* ada, Pak. Lawannya APTRI itu *enggak* ada. Jadi, contoh *lah*, kita punya 126.000 hektar tebu rakyat, *tapi* yang, lawannya yang PTPN mestinya *kan* ada satu kecamatan satu sinder. Sinder itu dari mulai merencanakan lahan, kapan di ratoonnnya dibongkar, varietasnya mana matang awal, matang tengah, matang akhir, kemudian di situ semua akan menentukan nanti kapan akan dipupuk, kapan akan *dikeletek*, ditebang. Karena kalau, kalau *enggak* ada yang mengelola, tebu matang akhir ditebang di awal, tentu yang ada bukan gula, tapi hanya air. Yang *gini-gini* ke depan itu tentunya dengan dikelola secara baik, saya *haqqul yaqin*, Pak, kalau 8 ton mestinya bisa. *Wong* tahun 2012 saja bisa *kok*. *Enggak* usah cerita zaman Belanda, 15 ton, Bu.

Jadi, kalau zaman, tadi sampaikan tahun '30, itu produktivitas tebu per hektar itu 15 ton, Bu. Kita hanya minta delapan saja, masa *enggak* bisa, *kan gitu*. Tentu dengan lahan kering dan sebagainya, yang disampaikan oleh Pak Pimpinan tadi.

Jadi, kami *haqqul yaqin* sanggup, Pak, dengan catatan mohon dukungan Bapak, terkait dengan, apa tadi, kredit yang jangan dikasih plafon, kemudian syukur-syukur setiap impor gula itu ada *levy*-nya. Mungkin BPDPKS perlu dilebur menjadi BPDP. Artinya di situ ada sawit dan nonsawit. Tentu ini akan sangat membantu. Dan itu, ini *kan* tidak perlu APBN, Pak. Artinya swasembada gula tanpa APBN.

F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.AP.):

Izin, Pimpinan, izin.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Rakyatnya sejahtera, petani, apa, konsumennya tidak terbebani.

F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.AP.):

Pak, izin.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Sedikit.

F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.AP.):



Pak Dirut.

F-PD(Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Sedikit.

F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.AP.):

Pimpinan.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Pak Ketua. Iya, silakan Rudi dulu.

F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.AP.):

Sedikit, Pak. Kalau BPDPKS dilebur itu, Pak, perlu perubahan undang-undang, Pak? *Gitu*, Pak.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Enggak.

F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.AP.):

Oh, *enggak* ya.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Cukup Perpres.

F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.AP.):

Oh *gitu*.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Undang-undangnya tadi disampaikan Bu Rieke sudah ada.

Silakan, Pak.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Ya, informatif, iya. BPDPKS menurut saya memang ini harus diundang ke sini, Pak Ketua. Bisa diundang ke sini, bisa, *gitu* ya. Nanti kita sandingkan dengan PTPN, Perhutani juga bisa, karena ada sebagian binaan juga di situ.



Nah, yang kedua, Pak Ghoni, ini juga mungkin bisa dilakukan ke depan, itu PTPN maupun Perhutani bisa mengembangkan peternakan, Pak. Karena juga impor daging sapi kita makin meningkat terus sekarang. Sekarang sudah 400.000 ton impornya. Jadi, kalau bisa dikembangkan oleh PTPN maupun Perhutani, menurut saya ini akan sangat membantu. Sepuluh ribu hektar saja, *enggak* usah gede-gede, ya. Di PTPN, atau 10.000 hektar atau 20.000 hektar di Perhutani, ini akan luar biasa, *gitu*.

Jadi, kalau ini dimulai, dimulai dengan yang kecil, apakah itu sapi-sawit, ataukah itu sapi dengan perkebunan tanaman keras lainnya. Menurut saya, ini akan menjadi hal yang, atau membuat seperti di Eropa *lah*, di luar negeri. Dibuat suatu hamparan yang memang dengan menggunakan, apa namanya, peternakan modern, *gitu*. Ini bisa dilakukan.

Jadi, banyak sebetulnya, karena Bapak ini *lender* dua-duanya. Kalau *lender* itu sebetulnya mau usaha apa *aja* bisa, *gitu*. Apalagi Pak Ghoni, *lender* sekarang, PTPN banyak juga yang di perkotaan-perkotaan. Itu bisa juga dijadikan, misalkan dijadikan *vertical house*, misalkan. Ini *kan* banyak juga *gitu*.

Makasih.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Siap, Pak. Jadi, sekaligus menjawab Pak Herman Khaeron. Memang kita dalam proses mencari mitra, Pak. Jadi, kita ada yang jelas untuk sapi, sapi, apa namanya, *dairy milk*, itu kita ada 5.000 hektar yang bisa, di daerah Ciwidey, daerah Lembang. Kami sudah proses, Pak, mencari mitra.

Kemudian, terkait pertanyaan dari Pak Subardi tadi. Kami sebenarnya di SGN tadi ada LP, apa, AGN (Akademi Gula Negara) yang sekarang menjadi LPP, jalan Jogja-Solo itu, kami juga melatih untuk internal dan petani, Pak. Jadi, mulai, kami mulai tahun ini sudah mulai melatih petani, karena bagian persiapan. Karena terutama, Pak Pimpinan, saya *kan* dari Jawa Tengah, yang menyedihkan itu, Jawa Tengah, industri gulanya hancur, *enggak* balik-balik.

Kalau Jawa Timur masih bagus, Pak. Di Jawa Tengah, di Kabupaten Peka, di *Karesidenan* Pekalongan itu zaman Belanda ada 19 PG. Itu sekarang tinggal 1, Pak. Dan kami dalam masa ke depan tentu akan membangun pabrik gula juga. Mungkin antara di daerah sekitar Brebes atau Tegal, satu lagi.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Gini, Pak, sedikit tambahan *aja*, Pak.



**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Nggih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

PTPN ini *kan on-farm*-nya, itu terikat dengan pemerintahan daerah.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Ya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Off-farm-nya, itu memang bisa PTPN. Loh yang pegang *on-farm*, lahan itu *kan* pemerintah daerah, Pak.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Ya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya *kan* tanya ke beberapa bupati. Dia juga punya *kok* lahan kas desa.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Mau *kok* kas desa itu disewa sama.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Mau, Pak, mau, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

PTPN itu.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**



Mau, mau.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tetapi, *Mbok* ajak BUMD Kabupaten itu untuk bagi-bagi saham *lah*. Jadi, ini cuma kurang komunikasi *aja*. Dlanggu kemarin itu mau selesai, Pak. Pemerintah Kabupaten Klaten mau minta kepada kepala desa untuk memberikan atau menyewakan lahan kas desanya untuk taman tebu, Pak. Masih banyak, Pak, cuma karena ego dari PTPN, tidak *ngerjasama* antara pemerintah daerah, BUM, Badan Usaha Milik Daerahnya dengan PTPN, dan rakyat itu, Pak. ini yang saya kira, formulasi ini, bahkan mungkin dengan investor, Pak. Jadi, investor, PTPN, BUMD, dan rakyat, ini menyatu, Pak. Saya kira kalau ini di.

DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):

Siap, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sinergikan, dikolaborasikan, Jawa Tengah itu akan bisa hidup semua, Pak.

DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):

Iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Karena bupatinya mau.

DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):

Siap, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Daripada *ngurus* Bumdes-Bumdes *yang*, lahan kas desa-kas desa sekarang ini juga pada, enggak yang ditanami, Pak. Banyak lahan yang kering-kering tadi di kas desa, Pak.

Makasih.

DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):



Terima kasih, Pak. Kami akan laksanakan, Pak, apa yang saran Bapak dan kami beberapa sudah kami lakukan di Jawa Tengah. Bahkan tahun ini, itu kita akan melakukan penanaman IPL istilahnya, kerja sama dengan desa tadi, itu di Jawa Tengah, berapa, 1000? 1300. Sebenarnya bukan PTPN *enggak* mau kerja sama, selama ini PTPN ini *enggak* punya duit, Pak, mohon maaf Pak. Jadi.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Makanya tadi investor, Pak.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Yang 1, 2 TCD *kan* tadi sekitar.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Hampir 1 triliun, Pak.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya. Iya, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Mesinnya itu, Pak.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nah, ini kan ada investor luar.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**



Iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kerja sama dengan PTPN dengan pemerintah daerah dan rakyat, Pak.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya, iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kalau *enggak* punya duit, Bapak buka misalnya.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dlanggu mau direvitalisasi *on-farm*, butuh dana 1,5 triliun.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Buka investor, Pak.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Siap, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Mereka investor hanya butuh jaminan lahan, Pak.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Ya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):



Kalau lahan itu dengan pemerintah daerah, saya kira ini bisa disinergikan, Pak.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Ya. Terima kasih, Pak. Kami akan melaksanakan, Pak, yang program-program kami juga seperti itu, Pak.

Kemudian, tadi ada pertanyaan tentang riset. Jadi, kami ini memiliki pusat riset itu cukup besar. Jadi, di Indonesia itu yang menyangkut pusat riset perkebunan itu milik PTPN, pusatnya di Bogor, Riset Perkebunan Nusantara. Kami punya pusat riset kelapa sawit di Medan, itu di Sumatera Utara itu kapasitasnya itu 40% produksi benih nasional. Jadi, paling besar. Lalu, kita punya pusat riset karet di Bogor dan di Sembawa, di Palembang juga itu riset untuk karet. Lalu, pusat riset tentang teh ada di Gambung. Pusat riset kopi dan kakao di Jember. Dan pusat riset tebu di Pasuruan.

Jadi, itu semua kita biayai. Kalau nilai obye, apa namanya, *budget* setahunnya, ya di atas 300 miliar, tapi yang dukungan dari PTPN itu sekitar 120 miliar. Jadi kita di, dari *holding* beserta *sSubholding* mengalokasikan khusus untuk riset, itu sekitar 120 miliar. Masih terlalu kecil sebenarnya. Kalau kita mau *leading* di sektor perkebunan, maka riset adalah kunci untuk, apa namanya, daya saing nasional.

Kemudian.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Izin. Izin, Pimpinan.

Sebelum pindah ke isu yang lain. Bapak, terima kasih sudah ada perhatian untuk riset ya. Tadi, kerja, apakah ada *enggak* kerja sama dengan perguruan-perguruan.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Ada, Pak.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Tinggi nasional.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Ada kok.



F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Nanti ditulis saja datanya, Bapak.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Ya.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Ya, karena tadi sebetulnya Bapak punya pusat riset tentang karet. Di mana itu, Pak?

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Di Sembawa, Lampung, di Bogor juga.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Di Sembawa.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Ada pusatnya.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Lampung, Bogor. Jangan terburu-buru untuk mengganti karet dengan pohon lain. Hasil risetnya seperti apa?

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Karena kita, *whatever*, kita butuh karet untuk berbagai peralatan dapur ya tetap butuh karet, Pak, *gitu*. Jangan hanya melihat karet hanya untuk membuat ban, begitu ya. Nah, itu pemetaan industrinya itu, mana kita bisa, apalagi harus TKDN. Industri nasional yang untuk perkakas yang membutuhkan karet saja, saya kira bisa menyerap hasil dari PTPN, terutama perkebunan karet. Tadi 3,5 hektar, juta hektar?

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Oh, itu Indonesia, rakyat, Bu,

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Punya rakyat?

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Kami punya paling 110.000.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Ya, 110.000 ada 3 juta setengah hektar, seluruhnya punya rakyat.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Punya rakyat.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Nah, kalau PTPN ini, sama seperti Mas Bimo katakan, bisa berkolaborasi. Bahkan untuk hilirisasi, pengembangan industri bahan baku, industri karet yang membutuhkan karet, saya rasa, ini *kans* yang cukup baik.

Terima kasih, Bapak.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Terima kasih, Bu, masukannya.

Tentang BPDPKS, saya tambahkan sedikit ya, Bu, pertanyaan Ibu tentang BPDPKS. Jadi, BPDPKS tadi sudah dijelaskan oleh Pak Herman Khaeron. Jadi, memang BPDPKS *tuh*, dananya itu dari setiap ekspor, baik ekspor CPO atau turunannya, kena *levy lah*. *Levy* itu dikumpulkan dalam badan layanan umum namanya BPDPKS.

Lah, seperti tadi saran, bukan saran, keterangan dari Pak Herman, itu *kan* memang untuk memperkuat petani. Persoalannya, Pak, memang selama ini seolah-olah, karena petaninya tidak memiliki kapasitas untuk menambal kekurangan dananya. Tapi seperti kami sampaikan tadi, dengan adanya kebijakan yang sudah berubah dari pemerintah untuk menambah bantuan atau subsidi dari 30 ke 60, sebenarnya isunya sudah selesai, tinggal implementasinya diharapkan secepat-cepatnya.



Dari Pak Pimpinan, Pak Aria Bima. Kami akan jalankan, Pak, masukan-masukan dari Bapak. Sangat, dan dari dulu Bapak selalu mengingatkan sama saya, tentang lahan bengkok. Kami *udah* inventarisasi juga di per kabupaten, rata-rata 2.500 hektar. Dan kalau dulu kami baru cerita sama Bapak, karena ceritanya *doang*, karena kekuatan PTPN-nya, Pak, yang *enggak* mampu. Tapi baru tahun inilah PTPN, harapan kami tahun ini, kalau tahun lalu untungnya, kalau kami biasanya *enggak* cerita untung, ya. Kalau cerita EBITDA-nya SGN itu tahun lalu sekitar 800 miliar, tahun ini mungkin 1,5 triliun.

Jadi, itu akan menjadi SGN semakin sehat. Petaninya sekarang kalau Bapak-Bapak terutama Pak Sarmuji, Jawa Timur, kalau petani *enggak* gaduh ke Bapak, *enggak ngadu* tentang gula, tentang tebu, berarti mereka sejahtera, Pak, tapi kalau tiap hari Bapak di WA, Pak Nasim Khan dan sebagainya, itu pasti gaduh. Mudah-mudahan Pak Aria juga, Pak Aria Bima juga *enggak* dapat keluhan-keluhan tentang petani, sekarang lagi senang. Yang saya takutkan, Pak, jangan sampai petani mengganti sawahnya untuk tebu, Pak. Karena harapan saya, tebu itu harus bertambah tahan kering.

Karena, Pak, tahun ini *aja*, luas tanaman tebu bertambah 6.000 hektar. Mungkin perlu ke depan perlu kita perhatikan, jangan sampai tebunya swasembada, padinya kurang. Kita pun bukan tujuan kami ke arah sana.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Izin, Pimpinan. Jawabannya terlalu cepat sekali, Bapak.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Oh *gitu*, Bu.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Iya, Bapak. Jadi, tidak membuat, kami *enggak* bisa *nyerep* loh, Pak.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Oh *gitu*, Bu.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Saya kalau jam *segini*, Onengnya kumat. Soal BPDPKS itu penting, Pak. Tadi, mohon diulangi.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Oke.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Saya ulangi, Bu, ya.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Pelan-pelan, termasuk menjawab yang saya sampaikan.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Baik, Bu. Saya ulangi pelan-pelan ya, Bu. Jadi, Ibu Rieke, BPDPKS itu di. Agak pelan ya, Pak, ya.

**WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI
VI DPR RI):**

Asal, asal jangan bisik-bisik *aja*, Pak.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Atau nanti saya jelaskan sama Ibu *lah*. Oke, jadi, Bu, selama ini BPDPKS, saya ambil contoh, Bu, dalam setahun itu katakanlah 60 triliun yang dikumpulkan. Jadi, bukan PTP yang *nyetor*, Bu. Setiap kita mengekspor, otomatis kena.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Iuran petani.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Itu iuran bukan diambil dari kami, setiap ekspor, siapa pun eksperturnya. Apakah pedagang, apa produsen, apakah eksportir, dia akan dikenakan namanya *levy*. Ada aturan-aturannya, Bu. Semakin tinggi harga CPO, semakin besar persennya. Nah, uang itu dikumpulkan oleh namanya lembaga biaya, Badan Layanan Umum BPDPKS.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Pertanyaan saya tadi, PTPN sendiri apakah kena *levy* itu atau tidak?

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**



Kalau ekspor, kena, Bu.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Ya, iya itu apa dari PTPN?

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Ya, *oke* nanti detailnya saya kirim ke Ibu.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Itu masih berhubungan.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya, Bu. Iya, nanti saya kirim ke Ibu, datanya, di sini.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Kayak *ngajak* berantem.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Eggak, Bu. sama, *enggak* berani aku berantem sama Ibu.

Jadi, Bu, *gitu* ya. Jadi, memang dukungan dari Komisi VI sangat penting, supaya segera direalisasikan bantuannya dari 60, dari 30 ke 60 juta. Saya hitung-hitung ya, Bu. Kalau hitung-hitungan saya tadi, setahun mau 500.000 hektar kali 60 juta, itu maknanya 30 triliun, Bu.

Bukan, seluruh rakyat. Ada 3 juta lahan rakyat yang umurnya sudah di atas 25 tahun, itu 3 juta. Kalau mau diselesaikan 5 tahun, berarti setahunnya harus di-*replanting* 60 juta, Bu. Betul, ya? Eh, iyalah, 60, 60, 600.000 hektar. 600.000 hektar, Bu, setahun. 600.000 hektar kalau kali 60 juta per hektar, itu 36 triliun. Kalau 36 triliun dibagi 60, kan mungkin sudah 60% dari dana BPDPKS, sedangkan luas sawit petani hanya 42%.

Tapi kalau cerita masa lalu yang Ibu sampaikan tadi lebih banyak dananya ke produsen CPO, kan *enggak* ada salahnya, Bu, kita selesaikan dulu urusan rakyat. Dalam 5 tahun diselesaikan *replanting*-nya, maka nanti ke depan rakyat tidak perlu sebesar itu.

Perlu kami sampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian, sebenarnya tidak ada haram-haramnya dijadikan untuk subsidi selisih harga antara solar, apa namanya, biodiesel dengan *fuel*, *fuel* solar. *Gapapa*, karena tujuannya dulu

dengan adanya penggunaan biosolar, maka otomatis volume yang diserap ke dalam negeri makin baik, makin banyak, harapannya harga CPO naik. Itu *kan* argumennya. Jadi, tidak haram *sih*, Bu, dengan bantuan kepada produsen biodiesel.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Izin, Pimpinan.

Saya tidak *ngomong* haram *loh*, silakan *aja*.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Bukan haram, Bu, ya.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Ya.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Tidak terlarang.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Tapi kalau posisi untuk memberikan subsidi,

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Dalam arti pada industri biodiesel, yang juga saya kira harus ada riset yang lebih matang lagi.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya, Bu.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Dengan komposisi yang persentasenya lebih besar daripada untuk *replanting* jutaan hektar lahan rakyat, saya kira.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya, Bu.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Ini tidak untuk, silakan, tetapi kita tetap pada posisi. Bapak tadi sudah mengatakan, kalau *replanting* ini didukung, saya kira ada persoalan 5 tahun sampai 7 tahun yang selesai. Boleh untuk biodiesel? Boleh.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya, Bu.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Aturannya membolehkan, tetapi komposisinya itu yang harus adil.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya, Bu, adil.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Saya kira. Ya, terima kasih.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Setuju, Bu, setuju. Bahkan nanti, Bu, kalau di-*replanting* punya rakyat, itu nanti produksi nasional itu naik, Bu. Sekarang 50 menjadi 60 juta ton, *kan enggak* ada masalah, Bu. Bisa ekspornya *nambah* malah, *gitu*, Bu. Menjelaskan kepada Ibu. Cukup ya, Bu? Nanti detail-detail.

Mungkin, saya rasa cukup, Pak. Dengan Bapak tentang *food estate*, Pak. Kami memang *enggak* buru-buru, Pak. Jadi, kami sudah hampir 6 bulan, Pak, membuat *piloting di*.

F-PD (DR. IR. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Katanya cukup.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Terakhir, terakhir.



Piloting di Merauke, Pak. *nanam* tebu ada 10 varietas, Pak. *Enggak, enggak* luas-luas, Pak, 1 hektar, saya coba di sana, dan ternyata bagus *kok*, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bagus, ya.

DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):

Jadi, memang maunya Papua itu jangan *nanam* sawit, Pak. Papua itu untuk padi dan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tebu.

DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):

Tebu *lah*, Pak.

Nah, isunya masalah, masalah kelayakan, Pak. kalau tidak didukung pembangunan infrastruktur, siapa pun *enggak* akan masuk, karena IRR-nya rendah. Jadi, di Papua hanya akan masuk akal industri mau masuk, pengusaha mau masuk, ketika katakanlah jembatan, bendungan, jalan, pelabuhan dibangun pemerintah. Bahkan kalau perlu, pembangunan di sana itu *full* mekanisasi, dan harus korporasi, Pak, rakyat ikut masuk.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):

Tapi harus korporasi. Karena kalau *enggak* pakai mekanisasi, susah *nyari* orang di sana.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (MOHAMMAD ABDUL GHANI):

Mungkin itu, Pak, tambahan.



Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya silakan, selanjutnya, Pak Dirut Perhutani.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Masih ada waktu, Pak Pimpinan?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Baik.

Makasih, Pak Pimpinan. Yang pertama, mungkin kami langsung saja Pak Herman Khaeron, terima kasih sekali, masukannya *nih* luar biasa. Mengingatkan kita semua, Pak Herman, khususnya kami di Perhutani.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Pak Ghoni, tolong matikan dulu *mic*-nya itu. *Mic*-nya matikan dulu.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Baik. Pak Herman, terima kasih, tadi banyak saran ke kami, kami sudah catat semua, Pak Herman. Memang, kami ini unik karena Perum, Pak. Namanya juga Perum, *gitu* ya, kami banyak harus menjalankan juga tugas-tugas dari Kementerian LHK. Bapak dulu di Komisi IV, dan kami juga masih intens juga dengan Komisi IV, Pak, untuk beberapa aktivitas, khususnya Kementerian LHK yang ada di Pulau Jawa.

Jadi, memang untuk mengembangkan bisnis, relatif pertimbangannya menjadi lebih banyak untuk di kami. Tapi kami akan terus berupaya, khususnya tadi saran Bapak, Pak, supaya tidak kembali ke zaman dulu, *gitu*, Pak, ya. Ber-reinkarnasi di tahun 1700-an begitu, zaman mesin uap dulu. Tapi intinya kami akan mencoba membuat pusat-pusat pendapatan baru di Perhutani, Pak, karena memang kami ini hanya dua *revenue* utama kami, satu menebang pohon, dua, menyadap getah pinus. Dua inilah yang mendominasi hampir 90% *revenue*-nya Perum Perhutani.

Nah, nanti kami akan *follow up*, Pak, saran Bapak, khususnya tadi misalnya mengembangkan wisata dengan Pak Ghani ya, dengan teman-teman PTPN, di Situ Patenggang. Kemudian juga untuk mengembangkan ternak, Pak Herman. Kami akan coba, cuma mungkin, Pak Herman,



barangkali bisa di *support* juga. Di sektor kami ini agak unik dibandingkan perkebunan, Pak. Setiap kami mengupayakan lahan hutan yang bisa *generate revenue*, kami itu harus membayar PSDH *kan*, Pak, yang tidak ada di, provisi sumber daya hutan. Nah, sehingga pasti kompetitifnya berbeda. Misalnya saya tanam tebu di lahan hutan, itu kalau teman-teman PTPN karena HGU, ya, dia tanpa ada beban iuran provisi sumber daya hutan tersebut, yang besarnya lumayan, itu 6% dari harga patokan yang dibuat oleh Kementerian LHK. Nah, pasti ada tambahan biaya, Pak.

Di satu sisi, misalnya untuk tebu, kami mengusahakan tebu ini per hektar, itu pasti lebih mahal dari teman-teman PTPN, Pak, karena membuka lahan hutan, itu otomatis pasti berbeda dengan lahan perkebunan. Dulu kan sudah *layering* yang paling *enggak* subur itu kehutanan, agak subur perkebunan, yang paling subur adalah pertanian, *gitu*.

Nah, kalau kami didorong untuk tebu kami yang sudah 11.000 hektar, itu per hektar itu sudah cukup mahal dibandingkan teman-teman PTPN. Ditambah provisi sumber daya hutan. Nah, ini kira-kira *problem-problem* di kehutanan, karena memang bentuknya Perum dan kami tetap berupaya, supaya ada tambahan-tambahan pendapatan baru di sektor kami. Tapi kami perhatikan Pak, Pak Herman. Terima kasih atas perhatian Bapak.

Izin, Pak Pimpinan. Ini tadi dari Pak Rudi Hartono Bangun, Pak. Ini karena masalah angka-angka. Yang pertama, perlu kami sampaikan, Pak Rudi, meskipun tadi Pak Ghani bilang mau membicarakan masalah EBITDA, tapi karena ditanya laba, kami sampaikan, Pak, Perhutani 5 tahun terakhir ini terus mencetak laba, Pak. Jadi, tahun 2023, *labaan*, laba *audited* kami, kami diaudit oleh EY, sama auditornya sama teman-teman PTPN, ini auditor yang 5 besar, Pak. Kami laba 502 miliar, Pak, ya. Jadi, 2020 kami masuk, kami laba 700, kemudian sedikit turun 428, ada di data. Kemudian, 2022 laba 550, dan kemarin kami masih bisa mempertahankan 502 miliar, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Lima ratus dua miliar?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Ya, laba kami. Laba bersih, Pak, laba bersih. Nah, untuk tahun 2023 yang kami sampaikan tadi, Pak, kami termasuk yang membayar dividen, atas.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tiga ratus miliar.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Laba 2022, Pak. Kami membayar 100 miliar. Memang cukup besar untuk ukuran Perum. Bisa dicek, mungkin Perum *enggak* banyak *tuh* yang bisa membayarkan dividen.

Nah, kemudian juga dari Bapak, *concern*-nya tentang tadi, misalnya hutang pihak ketiga. Tentunya kami punya, Pak, sebagai korporat kami punya hutang, tapi hutang kami *enggak* besar, Pak Pimpinan. Akhir tahun 2023, kami mencatat hutang kami itu 630 miliar.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Enam ratus?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Enam ratus tiga puluhan, Pak. Dengan laba kami yang 500, sebenarnya juga untuk ukuran korporasi, tidak mengkhawatirkan, karena *debt to EBITDA* kami masih di bawah satu, Pak. Jadi, untuk parameter-parameter keuangan, kami masih sangat aman, perbankan masih banyak yang akan memberikan pinjaman ke kita. Dan karena kami, tadi pertanyaan Bapak berikutnya *kan* kalau tanah dijual, bisa *menutupin* hutang apa *enggak? Gitu*.

Hutan itu bukan aset kami, Pak Rudi. Berbeda dengan teman-teman PTPN. Betul, Pak. Jadi, yang membedakan kami dengan PTPN, PTPN ini HGU, Pak, alas hak dia berusahanya, hak guna usaha, sehingga ini bisa di-*monetize* masuk ke neraca. Sehingga, asetnya PTPN itu *kan* hampir 150 triliun, dengan hanya 1 koma sekian juta. Kami *kan* 3 juta hektar, Pak, aset kami hanya 18 triliun, karena kami *enggak* mencatat luas kawasan hutan sebagai asetnya Perhutani. Karena kami hanya, betul, Pak, betul, Pak, hutan itu milik negara, betul, Pak, Pak Sarmuji. Jadi, kami hanya mengelolanya.

Nah, sebagai pengelola, kami juga diberi batasan untuk mengeksploitasi hutan tersebut, Pak. Saya itu punya RKAP ke Menteri LHK, "Eh, Perhutani, setahun kamu menebang," ini mungkin melanjutkan tadi Pak Muslim ya, saya itu menebang kayu yang masak tebang *gitu*, Pak. Kalau di hutan itu hanya 5.000 hektar dari 2,4 juta hektar yang kami kelola, hanya 5.000, Pak. Sehingga, produksi kayu kami itu *more and less* 900.000 m³. Itu didominasi oleh jati 400.000, sisanya rimba. Kami menyebutnya rimba, Pak. Di situ ada mahoni, pinus, dan lain sebagainya, selain jati.

Ada, Pak. Jadi, karena hutan ini tidak ada pagarnya dan mayoritas ada di Jawa, Pak, berinteraksi dengan masyarakat.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Yang ada pagarnya, Kebun Raya Bogor.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Kan itu kebun, Bu, bukan hutan. Kami hutan, ya.



KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Dirut, ini supaya gambaran.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Nggih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Salah satu yang disampaikan Pak Dirut *kan* potensi *supply* biomass ke PLTU. Nah, misalnya ada permintaan-permintaan yang cukup besar, target dengan sekian puluh ribu ton misalnya, Pak Dirut harus memotong tanaman dari berbagai sumber, bisa tanaman seperti akasia tadi disebutkan, apa, tanaman Akasia atau yang lainnya itu, tidak punya kewenangan penuh *dong?*

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Jadi.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kalau sampai kebutuhannya besar, tapi *scope* penebangannya dibatasi oleh menteri.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Betul, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh, iya, iya.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Prinsipnya karena kami ini harus menjaga kelestarian hutan di Jawa, Pak. Jadi, kita *enggak* boleh ugal-ugalan untuk *nebang gitu*, ya. Misalnya saya mau *men-generate revenue* saya untuk *di-push* begitu, itu saya nanti disempurit, Pak, oleh Kementerian LHK. Karena, percuma juga, kayu yang kami tebang, kami *enggak* bisa jual, karena setiap kayu yang kami tebang itu kan *di-barcode*, Pak, oleh Kementerian LHK. Ada lacak balaknya. Jadi, sebenarnya sertifikasi yang kami dapat

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Pak Wahyu.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):



Nggih.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Kalau Perhutani *kan* di Jawa, Inhutani itu masih ada?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Inhutani masih, Pak.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Masih ada, ya?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Masih, Pak.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Kok *enggak* pernah kedengaran, *gitu*.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Ada, Pak.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Inhutani

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Dirutnya *nih*, Pak, di sini, Pak.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Masih ada berapa Inhutani, masih ada.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

I dan V, Pak. Kami gabungkan.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Oh, digabung.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):



Iya.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Sekarang I dan V menjadi I dan II, *gitu?*

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Inhutani I sampai V, ini kami *regrouping*, Pak, tahun 2022, II dan III kami *inbrenkan* ke I, IV kami *inbrenkan* ke V, plus 1 anak perusahaan kami sendiri, kami masukkan ke V.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Tapi sekarang *holding*-nya di Perhutani.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Holdings-nya di Perhutani.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Oke.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Betul, Pak, betul.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Termasuk yang 2,4 juta itu dengan Inhutani?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Eenggak, Pak, karena Inhutani ini punya 1,2 sendiri, Pak.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Oh, jadi total berapa kalau dengan Inhutani?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Total 3,6.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Maksud saya, *dimasukin aja* ke presentasi, kalau memang sudah di *Holding, gitu.*



DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Sudah, Pak. Di materi kami, kami sampaikan, Pak, di halaman 3, bahwa kami sendiri 2,4 dan anak perusahaan kami 1,2. *Gitu* Pak, Pak Herman. Nah.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Sebetulnya biomassa itu bahaya juga, kalau *enggak* bisa *dijagain*, dikendalikan, pohon Mangga, pohon apa, bisa habis *tuh*, depan rumah, belakang rumah. Itu habis itu.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Ya, mungkin sedikit melanjutkan, Pak, terkait pertanyaan berikutnya. Tadi dari Pak Muslim, sudah sebagian kami jawab, Pak, termasuk ada tim kami yang waktu itu bekerja di daerah Aceh, Pak, untuk memungut getah di wilayah Aceh, Pak. Hanya saja di 2022, itu muncul Peraturan Gubernur, Pak, yang melarang getah Aceh keluar dari Aceh, sehingga kami tarik ini tim kami yang dari sana. Dulunya kami *trading* getah pinus di sana, Pak, baik Perhutani sendiri maupun anak perusahaan kami, Inhutani V.

Nah, sebenarnya kami berencana membangun industri pengolah getah. Itu kalau *enggak* di Aceh, nanti di Medan ya, Pak Dicky, ya. Untuk menampung getah-getah yang konsesinya Pak Prabowo yang THL itu, Pak. Mungkin. Betul, Pak, betul, betul, *nggih, nggih*.

Izin, Pak, berikutnya Pak Bardi. Memang kami terus mencoba untuk. Oh, Pak Bardi *gak* ada.

Baik, kami lanjut ke Bu Rieke. Terima kasih, Bu Rieke, tadi mempertanyakan BPJS dan sekaligus menjawab juga, nanti kami tugaskan tim kami untuk menyelesaikan, Bu Rieke, yang pertama.

Kemudian berikutnya, Bu Rieke, tentang riset. Kami sama dengan PTPN, Bu, kami punya pusat riset juga, cuma riset kami, riset terkait dengan pohon dan kami bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kami ada UGM, ada IPB, ada fakultas-fakultas yang, Universitas yang memiliki fakultas kehutanan. Risetnya khusus mencoba mencari varietas kayu jati yang mungkin tidak terlalu panjang daurnya, Bu. Karena kayu jati ini 1 tahun itu hanya bertambah 1 senti. Satu tahun 1 senti, Bu. Jadi, kalau mau cari kayu yang agak diameter panjang, Pak Aria, itu mesti butuh waktu puluhan tahun. Katakan 60 tahun, itu hanya 60 senti.

Iya, sekarang mungkin daur sudah mulai pendek, Pak. Sekarang 40 sampai 50 tahun. Iya, Pak. Jadi, memang. Siap, Bu, siap. Kami ada pusat riset kami di Cepu, Bu, karena dulu pusatnya jati di Cepu. Dan kami punya pusat *learning* juga di Madiun, Bu. Sekarang kami gabungkan. Jadi, Perhutani Forestry Institute, itu ada pusat *learning* sama pusat risetnya. Bu Rieke,



rasanya nanti untuk data-data tertulis kami sampaikan terpisah, Bu, ya, yang kaitannya sama data, ya.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Terima kasih ya, Pak.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Baik, sama-sama, Bu Rieke.

Kemudian, Pak Sarmuji. Terima kasih, Pak Sarmuji, tentang porang, Pak. Sebenarnya kami ini punya pabrik pengolah porang. Itu di Kediri, Pak. Betul, Pak.

WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Di mana?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Di Pare, Pak.

WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh, Pare.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Iya, di Pare. Itu kami pusat, punya pusat industri pengolahan kayu, dan puncak, punya dulu ada pabrik porang, *cuman mangkrak*, Pak. Dulunya, saya baca sejarah, Pak, teman-teman *tuh* ingin mengembangkan masyarakat di sekitar Pare itu untuk *nanam* porang. Nah, kemudian kita siapkan pabriknya. Nah, ternyata porang ini termasuk *unique*, Pak, terutama teknologi memisahkan getahnya supaya *enggak* beracun *gitu*, Pak. Nah, pada akhirnya, masyarakat sudah menanam, ternyata harganya jatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Harga jatuhnya itu harga jatuh porangnya, Pak? Bukan harga berasnya yang jatuh. Itu, yang saya *pengen* tahu itu, harga beras porangnya sangat tinggi, harga porangnya sangat rendah. Padahal *kan*, mestinya komponen bahan baku itu ya 60% misalkan, taruhlah begitu, tetapi ini *kan* jauh *banget* ini. Kalau 90.000, bayangan saya porang ya setidaknya-tidaknya 20.000, misalkan. Bahkan kalau hari ini porang harga 10.000, orang banyak sekali

nanam, Pak, tapi *kan* tidak seperti itu. Nah, saya ingin, sebenarnya ingin tahu akar soalnya itu apa *sih* sebenarnya.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Baik, Pak Pimpinan. Mohon izin, kalau secara teknis yang terjadi di *market*, barangkali kami masih dalam, Pak. Kenapa *sih* disparitasnya sangat tinggi, *gitu*, Pak, ya. Dari harga bahan baku ke bahan jadinya, itu terjadi sangat besar disparitasnya. Tapi faktanya, sebenarnya kami sendiri juga menanam porang, Pak. Karena porang ini termasuk pohon yang bisa tumbuh di bawah tegalan kami. Ya, Madiun, Bojonegoro, Saradan, itu di bawah jati kami itu, porang semua itu, Pak.

Nah, karena harga jatuh, sekarang kami *enggak* ambil, itu biarkan saja kami, kami biarkan di tanah, *toh* dia akan *nambah* besar, *gitu*. Supaya punya masyarakat *dulu* yang keluar, termasuk waktu Pak Presiden meresmikan yang di Ngawi itu, Pak.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Jalan *gak* itu, Pak?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Harganya jatuh, Bu. Jadi, dulu ekspektasinya kan sekitar 10.00, begitu, per kilonya, ternyata hanya 5.000. Nah, ini mungkin *problem*-nya, barangkali nanti kami coba akan cari tahu, Pak, ya, yang bisa meng-*offtake* dan bisa menyambungkan dengan industrinya, sekaligus *output* dari beras itu bisa tinggi, Pak.

WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Karena *gini*, porang itu bukan hanya, produk akhirnya bukan hanya beras, ada kosmetik, macam-macam, banyak sekali, ada mie porang. Jadi, bukan hanya beras. *Lah* itu *problem*-nya, kenapa *sih* kok jaraknya jauh? Itu dicari tahu betul itu, Pak.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Pak Wahyu.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Enggeh.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Sedikit ya, 30 detik *lah*. Saya ini penelitian doktor saya juga salah satunya porang. Jadi, porang itu sekarang dijual dalam bentuk bahan baku setelah dikeringkan, di-*export* ke Jepang ataupun Korea. Itu sebagai bahan lengket itu. Namun, dengan perkembangan modern saat ini, itu dijadikan beras buatan, ya.

Nah, buat beras buatan hari ini, kenapa mahal? Karena diproduksi dalam bentuk ataupun dalam jumlah yang sedikit. Kenapa disparitasnya semakin jauh? Karena proses menghilangkan rasa gatal, segala macam itu, yang memang tidak mudah. Itu masih disembunyikan teknologinya. Dengan produksi yang masih sedikit, maka memang itu menjadi mahal.

Nah, sekarang yang dimaksud mungkin oleh Pak Sarmuji, bukan hanya mengembangkan porang, dibudidayanya, tetapi di hilirnya, di *processing*-nya. Kalau *processing*-nya dibuat, maka itu akan memiliki nilai yang tinggi. Kalau hari ini 90.000, jual 70.000 *aja* laku itu, karena sekarang menjadi *lifestyle*, menjadi kebutuhan kesehatan kita. Makan beras porang itu lebih sehat dibandingkan dengan beras biasa, *gitu*.

Nah, saya kira itu. Mungkin yang dimaksud bukan hanya dibudidaya, kalau dibudidaya yang diperbesar, pasti jatuh harganya makin murah, *tapi* kalau dikembangkan di hilirnya, maka akan bernilai,. Nah, si petani akan semakin mahal dia di hulunya atau dibudidayanya.

Saya kira itu. *Makasih*.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Masalah perporangan nanti kita bikin waktu secara khusus, dan narasumbernya seorang doktor yang disertasinya porang.

Masih ada, Pak Dirut?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Cukup Pak, terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Sarmuji, perporangan menjadi catatan.

WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Porang itu hanya contoh saja. Mungkin ada banyak lagi tanaman-tanaman yang bisa dikerjasamakan dengan masyarakat. Seperti tadi kaliandra tadi.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):



Ya, kaliandra ini ternyata kalau *motong* juga masih izin ke KLH ya?

WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kaliandra *enggak*, kaliandra ini semak.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Pak, kalau *nanam* saya harus izin, Pak, karena akan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Loh.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Mengkonversi itu, Pak. Tapi sekarang saya sudah punya hampir 36.000 hektar.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kan permintaan kaliandra banyak dari PLTU, Pak.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Betul, Pak, betul.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tercukupi *enggak* sekarang permintaan itu?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Sebenarnya kalau mau mencukupi kebutuhannya PLTU *gak* cukup, Pak, untuk *co-firing* tadi.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, oke.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Karena butuhnya sangat besar, karena mau mengganti batu bara dengan pelet.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Nggeh.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kawan-kawan, kita segera akan membuat suatu keputusan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan PTPN Perkebunan Nusantara III dan *holding*, *holding* PTPN III dan Perum Perhutani:

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait pencapaian kinerja PT Perkebunan Nusantara III (*Holding*) dan Perum Perhutani tahun 2023, serta mendorong PTPN III (*Holding*) dan Perum Perhutani untuk meningkatkan kinerja perusahaan pada periode selanjutnya.

(RAPAT: SETUJU)

2. Dua, Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani beserta anggota *Holding* untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan kawasan Perhutani untuk pengembangan kawasan pariwisata nasional. *opo iki? Karepe opo? Oke ya.*

(RAPAT: SETUJU)

Oh termasuk PTPN. Bagi teman-teman yang ingin investasi pengembangan pariwisata kami persilakan. Yang sudah mau pensiun-pensiun atau ada teman-teman yang memang tertarik di, temannya tertarik di industri pariwisata.

- a. menyampaikan penjelasan terkait mekanisme investasi dengan Perum Perhutani, termasuk PTPN ya.
Iya wisata, mengembangkan kawasan Perhutani dan kawasan PTPN untuk pengembangan pariwisata nasional ya. Kedua,
- b. menyampaikan penjelasan terkait mekanisme investasi dengan Perum Perhutani.
Iya, menyampaikan penjelasan terkait mekanisme investasi, mekanisme investasinya, *wes ngono wae titik*. Untuk bermitranya kan terkait dengan poin A *kan?* Berkaitan dengan poin A menyampaikan penjelasan terkait mekanisme investasinya, jelaskan.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi VI DPR RI meminta PT Perkebunan Nusantara III (*Holding*) untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:



- a. Menyampaikan laporan perkembangan *subholding* di bawah PT Perkebunan Nusantara Group, PalmCo, SugarCo dan SupportingCo.

Cocok, Pak Dirut?

(RAPAT: SETUJU)

- b. Menyampaikan laporan kontribusi PT Perkebunan Nusantara Group kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Oh ya, menyampaikan laporan kontribusi, pembayaran *levy export*. iya, sek. B dulu, Pak, saya ketuk dulu, Pak, jangan cepat-cepat, Pak.

(RAPAT: SETUJU)

Ya. ini mana? ya itu ditambahkan, Perhutani dan PTPN yang nomor dua.

WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

C, C dihapus

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

- c. Pengembangan kawasan PT Perkebunan Nusantara untuk pengembangan, ya ini C sudah masuk. Di atas ya, hilangkan. Oh, mau di satu, sendiri-sendiri? Oh disendirikan, Pak.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Pak Ghoni, aman, Pak Ghoni. Tenang, Pak Ghoni, duduk yang nyaman, Pak Ghoni, di situ.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

- c. Pengembangan kawasan PT Perkebunan Nusantara Group untuk pengembangan kawasan pariwisata nasional serta mekanisme investasinya.

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi VI DPR RI mendukung Program Peremajaan Sawit Rakyat binaan PTPN, binaan PT Perkebunan Nusantara Group dengan merekomendasikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk meningkatkan bantuan Peremajaan Sawit Rakyat. Ini bantuan atau memang haknya *toh*?



**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Izin, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bukan bantuan berarti.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Izin, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Harus disebut angkanya dari 30 ke 60.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Karena sebenarnya kebijakan politisnya sudah ada, tinggal kebijakan itu harus dirumuskan dalam bentuk keputusan Komisi Pengarah.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, nanti kita.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Komisi pengarahnya ada 7 kementerian/lembaga. Pak Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian dan seterusnya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Untuk meningkatkan dana peremajaan, Pak, bukan bantuan, Pak. Meningkatkan dana peremajaan sawit dari 30 juta per hektar menjadi 60.



F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Liat peraturannya di mana.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Keputusan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dah, dah, dah, udah, lanjut dulu.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Sudah, Pak/Bu, tinggal dirumuskan dalam bentuk Komisi Pengarah. Rencana minggu ini, Bu, kalau *enggak*, minggu depan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya. Ya, ini kan bahan kita bawa ke rapat dengan Menteri BUMN, Pak. Biar Menteri BUMN yang *fight* di rapat lintas kementerian. Ini persoalannya kan di Menterinya Pak Sarmuji ini, Pak, di Menko.

**WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI
VI DPR RI):**

Oh, iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Koordinatornya *kan* beliau. Ya, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi 6 DPR RI, nomor 5, mendukung PT Perkebunan Nusantara III (*Holding*) beserta anggota *holding* dalam Program Swasembada Gula Konsumsi melalui peningkatan produktivitas usaha, pelaksanaan program dukungan bagi petani tebu, penetapan harga acuan pembelian yang berkeadilan, serta implementasi Kredit Usaha Rakyat, khusus klaster tebu.

Wah ini. Silakan Pak, Pak, Pak Dirut.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**



Ya, memang itu di Kementerian Perekonomian sudah dibahas, Pak. Itu *udah* mendukung *aja*, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, cocok ya, lima ya.

(RAPAT: SETUJU)

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya, Pak, cocok, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

6. Komisi VI DRP RI mendukung, perbaikan peraturan perundang-undangan, terkait. Peraturan perundang-undangan terkait, serta peraturan turunan lainnya, dalam rangka meningkatkan produktivitas petani tebu rakyat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Koordinasi, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan memasukkan KUR kluster tebu.
Cocok? Ya.

(RAPAT: SETUJU)

- b. Regulasi terkait Pabrik Gula dalam hal kewajiban Pembinaan Petani Tebu dan perluasan lahan tebu.

(RAPAT: SETUJU)

- c. Perbaikan peraturan perundang-undangan terkait, regulasi terkait pembentukan Badan Pengelola Dana Tebu.
Cocok ya?

(RAPAT: SETUJU)

- d. Terkait jaminan ketersediaan pupuk, nah ini penting, Pak, serta pemberlakuan Harga Acuan Pembelian untuk kepastian usaha tani.

ini yang masalah pupuk ini. Ya, ini kita tingkatkan, Pak, dari 7 juta ton ke 9 juta ton. Yang Bapak *butuhkan tuh* yang subsidi atau yang komersial? Hah? yang komersial. Kalau komersial, Bapak itu agennya apa? Kemarin agen *gak* mau beli karena harus beli dulu, maunya konsinyasi. Bapak beli tunai, *gak*?



**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Mungkin kalau itu bisa petani melalui BPD barangkali, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh, Petani.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya petani, supaya usaha kami.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya *gini*, Pak, petani, agen, pengecer, itu kalau suruh beli kontan dari pabrik, itu *gak* punya duit. kalau pupuk subsidi kan cuma 1.200 *enggak* salah. Nah, kalau pupuk nonsubsidi, itu 10.000

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Kita ada KUR-nya, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Hah?

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

KUR-nya *udah* ada.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh, *udah?* Nah, persoalan para distributor ini kalau harus beli dulu, terus baru jual, *enggak* punya duit untuk *kulaan*, Pak.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Garmen, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Hah?

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):



Garmen. Jadi, nanti biasanya, kalau yang Perum rakyat dengan BUMN.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA):

Pak, pakai *mic dong*, Pak.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Nanti, bayarnya pada waktu giling.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, Pak.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Waktu giling nanti dipotong.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Betul, Pak.

F-PD (Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Itu yang nanti di-*drop* dulu oleh KUR, *gitu*.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Izin, jelaskan, Pak. Polanya selama ini begini, Pak, ada kredit dari perbankan Himbara kepada petani, bayarnya waktu selesai giling. Tapi uangnya di depan, Pak, untuk bayar pupuk. Cuma *kan* sekarang pupuknya susah.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya *gitu*, Pak, ya.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Karena kemarin, *gini*, dari pabrik pupuk, kapasitas 14 juta ton itu kan dipakai subsidi 9, eh, 7 juta ton. Yang nonsubsidi tidak terserap, kemudian di-eksplor. Nah, kalau Bapak bisa serap, dengan catatan, pembelian ini *cash*,



Pak. Kalau *cash*, *enggak* punya itu yang namanya pedagang atau petani. PTPN beli dulu, Pak, ya.

PTPN/PERHUTANI:

Ya, izin.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan, Pak, direspons.

PTPN/PERHUTANI:

Izin, Pak. Dari mekanisme yang berjalan saat ini sebenarnya KUR itu nanti, *Insha Allah* sudah menyelesaikan, karena.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

PTPN/PERHUTANI:

Persoalannya pendanaan di awal.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Monggo, mau dana dari KUR.

PTPN/PERHUTANI:

Iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Atau dana PTPN.

PTPN/PERHUTANI:

Siap, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Yang penting pabrik pupuk, *pengennya* dibayar *cash*.

PTPN/PERHUTANI:

Ya betul, Pak.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Cuma selama ini, Pak Pimpinan, KUR itu belum 100%. *Lah*, kami minta dukungan supaya seluruh petani.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke. Dapat KUR.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Enggak ada pagu tadi.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, ya. Jaminan ketersediaan pupuk serta pemberlakuan Harga Acuan Pembelian untuk kepastian usaha tani. Ini terkait dengan,

- e. Pembangunan ekosistem Tebu Rakyat melalui korporasi berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM RI.

PTPN/PERHUTANI:

Mungkin korporasi atau korporatisasi, Pak. Korporasi?

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Jadi *gini*, Pak, di Kementerian Koperasi itu ada dana khusus.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Untuk korporasi.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Lah, persoalannya di.



KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

LPDP.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Iya, itu maksudnya, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya kan. Nah, nanti bunganya murah, 10 miliar satu korporasi, bunganya 4% kalau untuk produksi, kalau simpan pinjam 6%.

Setuju ini ya?

(RAPAT: SETUJU)

7. Kementerian, eh, Kementerian. Komisi VI DPR RI meminta PT Perkebunan Nusantara III (*Holding*) dan Perum Perhutani beserta anggota *Holding* untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengembangan dan penguatan industri hilirisasi komoditas perkebunan dan kehutanan yang bermitra dengan masyarakat.

Tolong kalau ngomong hilirisasi ini, abstraksi kita juga industrialisasi, Pak, ya. Jadi, ini hanya satu *step* industrialisasi ada hilirisasi. Kayak teh tadi, Pak, hilirisasinya sukses, *tapi* industrinya *enggak nyerap* .

(RAPAT: SETUJU)

- b. Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* secara konsisten.

(RAPAT: SETUJU)

- c. Melaksanakan transformasi usaha secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan serta mendorong efisiensi usaha dengan tetap memperhatikan pengembangan usaha yang berwawasan lingkungan.

Oke, apalagi satu PTPN, satu Perhutani. Kalau *enggak* berwawasan lingkungan, ya selesai sudah. Produsen O2 terbesar.

(RAPAT: SETUJU)



Delapan, *opo kuwi?*

8. Ya, hal-hal yang memang belum terjawab secara formal di forum rapat ini dijawab paling lama 5 hari atas pertanyaan Anggota secara tertulis.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu,

Demikian kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Perkebunan Nusantara III (*Holding*) dan Perum Perhutani. Sebelum saya akhiri, kami persilakan, bisa ngomong cepat ini, Pak, untuk *closing statement*. Diwakili Pak Dirut Utama PTPN III.

**DIREKTUR UTAMA HOLDING PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(MOHAMMAD ABDUL GHANI):**

Dari PTPN, Pak, mohon dukungan terus, jangan bosan-bosan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih.

Saya ucapkan terima kasih kepada Dirut, Pak Dirut PTPN III dan Pak Dirut Perum Perhutani beserta jajarannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi VI yang telah mengikuti rapat ini hingga selesai.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.21 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001

